

LAPORAN AKHIR
PENELITIAN FAKULTAS PERTANIAN



**KEBERLANJUTAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN (CSR) UNTUK PEMBERDAYAAN KOMUNITAS
DI KOTA PADANG PROPINSI SUMATERA BARAT**

TIM PENELITI :

Ferdhinal Asful, SP. M.Si (Ketua)
Dr. Ir. Ira Wahyuni Syarfi, MS (Anggota)
Syofyan Fairuzi, S.TP. M.Si (Anggota)
Yozi Rahmayani (Mahasiswa)

FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS
SEPTEMBER, 2018

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Keberlanjutan Program Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR) untuk Pemberdayaan Komunitas di Kota Padang Propinsi Sumatera Barat
2. Nama Rumpun Ilmu : Pemberdayaan Masyarakat
3. Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap : Ferdhinal Asful, SP. M.Si
 - b. NIDN : 0023027103
 - c. Jabatan Fungsional : Lektor
 - d. Program Studi : Agribisnis
 - e. Nomor HP : 081363498428
 - f. Alamat surel : ferdhinalasful@yahoo.com
4. Anggota Peneliti (1)
 - a. Nama Lengkap : Dr. Ir. Ira Wahyuni Syarfi, MS
 - b. Progam Studi : Agribisnis
 - c. Bidang Ilmu : Pembangunan Pertanian
5. Anggota Peneliti (2)
 - a. Nama Lengkap : Syofyan Fairuzi, S.TP. M.Si
 - b. Progam Studi : Agribisnis
 - c. Bidang Ilmu : Pembangunan Wilayah dan Pedesaan
- Anggota Peneliti (3) : Suci Riswayanti (BP. 1510222029)

Padang, 25 September 2018

Mengetahui
Ketua Jurusan

Ketua Peneliti

Mahdi, SP. M.Si. Ph.D
NIP.197104102000031002

Ferdhinal Asful, SP. M.Si
NIP. 197102232005011004

Menyetujui
Dekan Fakultas Pertanian

Dr. Ir. Munzir Busniah, M.Si
NIP. 196406081989031001

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mendeskripsikan pengelolaan program CSR di PT Semen Padang, dan (2) Mengidentifikasi keberlanjutan program CSR di PT Semen Padang. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Lambung Bukit yang berada di Kecamatan Pauh, Kota Padang. Pemilihan tempat penelitian dilakukan dengan sengaja (*purposive*). Desain penelitian ini berupa metode deskriptif dan jenis studi kasus, dimana dalam konteks penelitian, melalui metode ini dideskripsikan secara detail berbagai fenomena dan pola interaksi yang terjadi di komunitas yang menjadi mitra program CSR dan mengkaitkannya dengan konsep prinsip dan proses pemberdayaan komunitas. Sedangkan analisa data untuk tujuan kedua mengacu kepada penelitian Anandini (2011) yang memuat lima indikator keberlanjutan program pemberdayaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan program CSR PT Semen Padang di Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, Kota Padang dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sudah mengedepankan dua prinsip pemberdayaan komunitas secara optimal, yakni : (1) berbasis komunitas serta (2) transparansi dan akuntabilitas. Namun beberapa prinsip pemberdayaan komunitas yang belum optimal dilaksanakan adalah : (1) partisipasi, (2) integrasi, serta (3) kolaborasi. Selanjutnya, adanya harapan yang sangat tinggi dari para pemangku kepentingan terkait keberlanjutan program CSR PT Semen Padang di Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, Kota Padang dan secara umum harapan tersebut sudah sesuai dengan kenyataan. Namun apabila ditelusuri dari keempat aspek keberlanjutan, aspek lingkungan masih belum memenuhi harapan, sementara aspek kelembagaan, finansial, dan sosial budaya sudah memenuhi harapan para pemangku kepentingan.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN

RINGKASAN

DAFTAR ISI

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	5
1.3. Luaran Penelitian	5

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengantar	6
2.2. Pembangunan yang Berpusat pada Rakyat	6
2.3. Pemberdayaan Masyarakat	8
2.4. Pembangunan Berkelanjutan	10
2.5. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)	12

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1. Pengantar	15
3.2. Tempat dan Waktu	15
3.3. Metode Penelitian	15
3.4. Informan Penelitian	16
3.5. Strategi Pengumpulan Data dan Informasi	17
3.6. Topik Pengamatan	17
3.7. Metode Analisa Data	18

BAB 4. PROFIL KESEJARAHAAN PT SEMEN PADANG DAN PROGRAM CSR

4.1. Pengantar	24
4.2. Deskripsi Profil dan Sejarah Keberadaan CSR PT Semen Padang	24
4.3. Deskripsi Kelurahan Lambung Bukit	39
4.4. Deskripsi Profil dan Sejarah Keberadaan CSR PT Semen Padang di Kelurahan Lambung Bukit	52

BAB 5. PROFIL PENGELOLAAN PROGRAM CSR PT SEMEN PADANG DI KELURAHAN LAMBUNG BUKIT

5.1. Pengantar	55
5.2. Tahap Persiapan Program CSR	55
5.3. Tahap Perencanaan Program CSR	64
5.4. Tahap Pelaksanaan Program CSR	72
5.5. Tahap Monitoring dan Evaluasi Program CSR	79

BAB 6. PROFIL RESPONDEN DAN PERSEPSI PEMANGKU KEPENTINGAN TERHADAP KEBERLANJUTAN PENGELOLAAN PROGRAM CSR PT SEMEN PADANG DI KELURAHAN LAMBUNG BUKIT	
5.1. Pengantar	82
5.2. Profil Responden	82
5.3. Persepsi Responden terkait Keberlanjutan Pengelolaan Program CSR PT Semen Padang di Kelurahan Lambung Bukit	88
BAB 7. PENUTUP	
7.1. Kesimpulan	110
7.2. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	112

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan di Indonesia telah melewati beberapa paradigma sebagai acuan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Diawali dengan paradigma pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan, yang ternyata menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kemiskinan, pengangguran, serta ketidakmerataan pendapatan. Pada awalnya paradigma pembangunan yang berorientasi pada pemerataan ditujukan untuk memberikan peluang bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan berbagai akses terhadap kesejahteraan. Namun paradigma ini ternyata dalam realitasnya bagi berhasil menawarkan alternatif yang parsial terhadap paradigma yang dominan dengan orientasi pada pertumbuhan. Paradigma pembangunan yang berorientasi pemerataan ternyata cenderung memandang masyarakat hanya sekedar sebagai objek *assistencialism strategy* dan *charity strategy*. Akibatnya masyarakat bukannya menjadi semakin mandiri, tetapi menjadi makin tergantung pada birokrasi, dan yang terjadi cenderung *people-disempowering and de-humanizing development* (Nanga, 2000)

Selanjutnya Nanga (2000) menjelaskan bahwa berbagai kelemahan dari kedua paradigma pembangunan tersebut, pada akhirnya mendorong tumbuhnya paradigma alternatif dalam pembangunan, yakni pembangunan yang berpusat pada rakyat (*people centered development*). Paradigma ini diapungkan pertama kali oleh David Korten, dimana menekankan perhatian pada perkembangan manusia, kesejahteraan manusia, keadilan, kelestarian lingkungan hidup, serta kemandirian ekonomi. Logika yang mendominasi paradigma ini adalah keseimbangan ekologi manusia dan sumberdaya pembangunan adalah tumbuh dan berkembangnya inisiatif, kreatifitas, dan inovasi masyarakat. Dengan kata lain, masyarakat menjadi mandiri, *people empowering* dan pembangunan yang memanusiakan manusia (*humanizing development*).

Empowering, yang di Indonesia di kenal dengan istilah pemberdayaan merupakan proses dimana orang memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan keinginan (*willingness*) untuk mengkritisi dan menganalisis situasi yang mereka

hadapi, lalu mengambil keputusan dan tindakan yang tepat untuk merubah kondisi tersebut. Dengan demikian, terjadi proses dimana orang-orang didorong dan diyakinkan untuk memperoleh penuh keterampilan, kemampuan, dan kreatifitas. Lebih tegas menurut Payne (1997) dalam Syahyuti (2007), pemberdayaan membahas bagaimana individu, kelompok, atau komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan agar masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Intinya adalah “kemandirian”.

Abdul (2016: 61) menyatakan bahwa untuk proses mewujudkan kemandirian masyarakat, dibutuhkan adanya dorongan atau stimulus dari luar dengan berbagai program dan kegiatan. Salah satu pelaku pembangunan yang berperan untuk membangun kapasitas masyarakat melalui upaya menggugah kesadaran masyarakat agar mampu bangkit membangun kemandirian dan berusaha menyelesaikan masalahnya secara mandiri dan berkelanjutan, adalah sektor swasta atau perusahaan melalui program *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Secara umum, CSR merupakan salah satu dari beberapa tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan atau *stakeholders*. Dimana yang dimaksud dengan pemangku kepentingan dalam hal ini adalah kumpulan orang atau komunitas yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh berbagai keputusan, kebijakan maupun operasi perusahaan. Secara simultan perusahaan akan menjalankan tiga jenis tanggung jawab yang berbeda-beda kepada pemangku kepentingan, dimana ketiga jenis tanggung jawab yang berbeda-beda kepada pemangku kepentingan tersebut harus dijalankan secara seimbang. Penekanan kepada salah satu jenis tanggung jawab saja akan menyebabkan perusahaan berjalan secara tidak optimal. Ketiga tanggung jawab tersebut mencakup: *economic responsibility, legal responsibility dan social responsibility* (Roza, 2014: 1).

Lingkungan sosial juga sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan bisnis perusahaan dan kehidupan. Perusahaan juga sudah menyadari bahwa keberhasilannya dalam mencapai tujuan perusahaan, bukan hanya dipengaruhi oleh faktor internal perusahaan, melainkan juga oleh dukungan komunitas yang ada disekitarnya. Ini artinya sudah terjadi pergeseran relasi antara perusahaan dengan komunitas. Perusahaan yang semula memposisikan diri sebagai pemberi donasi

melalui kegiatan *charity* dan *philanthropy*, kini memosisikan komunitas sebagai mitra yang turut andil dalam kelangsungan eksistensi perusahaan (Asful, dkk, 2015).

Pada akhirnya, pembangunan yang berpusat pada rakyat berorientasi pada mewujudkan kemandirian masyarakat dan masyarakat yang mandiri akan menjadi landasan untuk mewujudkan keberlanjutan program pemberdayaan melalui program CSR. Secara lebih spesifik, menurut Suparjan dan Suyatno (2003: 171) *dalam* Zubaedi, (2007: 182) pembangunan berkelanjutan dapat diartikan sebagai suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan kualitas kehidupan generasi sekarang yang tidak menyebabkan penurunan kualitas kehidupan generasi yang akan datang. Kualitas hidup menyangkut aspek kebutuhan ekonomi, kebutuhan akan lingkungan alam yang bersih dan sehat, serta tingkat kebutuhan sosial yang diinginkan.

Di Kota Padang sebagai ibukota Propinsi Sumatera Barat terdapat juga terdapat beberapa Badan Usaha Milik Nasional (BUMN) yang menjalankan operasinya untuk pembangunan. Salah satu di antara BUMN tersebut merupakan BUMN strategis, yakni PT Semen Padang (yang berinduk ke PT Semen Indonesia) yang mengolah dan menghasilkan semen yang beroperasi di Kecamatan Lubuk Kilangan.

PT Semen Padang ini wilayah operasi perusahaannya berada di tengah-tengah masyarakat dan komunitas sehingga dalam setiap aktifitas operasinya senantiasa mempunyai interaksi dengan masyarakat dan komunitas yang berada di sekitar lokasi operasi. Keberadaan masyarakat di sekitar kawasan operasi perusahaan juga menjadi perhatian perusahaan, selain juga menjadi tanggung jawab perusahaan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan yang didalamnya mencantumkan tanggungjawab sosial dan lingkungan oleh penanam modal/perseroan. Selanjutnya melalui ISO 26000 tentang tanggung jawab sosial perusahaan makin dipertegas dengan CSR.

Dalam rentang waktu semenjak keluarnya UU dan peraturan yang mengatur tentang CSR, PT Semen Padang makin serius dalam menjalankan CSR nya dengan menggunakan berbagai strategi yang diawali dengan pembentukan biro yang mengelola CSR serta melakukan penyusunan dokumen perencanaan CSR untuk jangka waktu tertentu. Dengan kelembagaan serta dokumen perencanaan strategis yang jelas, maka PT Semen Padang telah melaksanakan program CSR semenjak

beberapa tahun yang lalu, khususnya di wilayah yang menjadi lingkaran terdekat atau diistilahkan dengan ring-1 perusahaan.

PT Semen Padang sebenarnya sudah cukup lama mengelola program CSR secara mandiri melalui Biro CSR. Namun sejak tahun 2015, CSR dari PT Semen Padang diserahkan pengelolaannya ke komunitas lokal melalui wadah Forum Pemberdayaan Masyarakat Nagari yang ada di kelurahan-kelurahan sekitar perusahaan serta kelurahan-kelurahan yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Hal ini dilakukan karena berdasarkan evaluasi dari pimpinan PT Semen Padang, program CSR selama ini belum memberikan manfaat dan dampak yang nyata bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Hal ini terjadi karena dana CSR diberikan kepada individu dan kelompok yang mengajukan proposal kegiatan, termasuk juga pihak kelurahan, pemuda, dll. Program CSR yang bersifat *top-down* inilah yang menjadi alasan bagi pihak pimpinan untuk memperbaiki tata kelola CSR dengan pendekatan komunitas.

Salah satu kelurahan yang menjadi sentra pelaksanaan program CSR PT Semen Padang ini adalah Kelurahan Lambung Bukit, yang mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian di sektor pertanian (sub-sektor tanaman pangan, sub-sektor tanaman hortikultura), serta sektor usaha mikro, sehingga mempunyai ketergantungan yang cukup tinggi terhadap alam. Kondisi ini cukup rentan berdampak pada penghidupan masyarakat/komunitas sehingga kelurahan ini tergolong pada kelurahan yang mempunyai tingkat kesejahteraan relatif lebih rendah dibandingkan dengan kelurahan-kelurahan lain di Kota Padang.

Keberadaan PT Semen Padang di satu sisi dengan program CSR nya mampu berperan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat/komunitas apabila dikelola dengan menekankan pendekatan pemberdayaan, baik secara prinsip maupun proses. Namun pada sisi yang lain apabila program CSR tidak dikelola dengan optimal, akan berakibat pada makin tingginya ketergantungan masyarakat/komunitas terhadap program pemberdayaan oleh perusahaan yang dipersepsikan oleh masyarakat dan komunitas sebagai “bantuan-bantuan” yang diberikan oleh perusahaan. Selain itu program yang dimaksud tidak mampu menumbuhkan adanya rasa memiliki masyarakat/komunitas terhadap akses terhadap sumberdaya (khususnya sarana) yang sudah difasilitasi ketersediaannya dengan program CSR

serta membangun kemandirian masyarakat dalam pengelolaan terhadap akses sumberdaya, sehingga pada akhirnya tidak akan mampu mewujudkan aspek keberlanjutan (*sustainability*) dari program CSR tersebut. Tidak selamanya perusahaan akan memberikan program CSR dan juga menjadi tanggung jawab pula dari masyarakat dan komunitas untuk mewujudkan kemandiriannya. Keberlanjutan program CSR ditentukan oleh bagaimana perusahaan mampu mengelola program dengan mengedepankan prinsip dan proses pemberdayaan, serta kesiapan masyarakat untuk mandiri guna meningkatkan kualitas kehidupan.

Beranjak dari uraian latar belakang dan rumusan permasalahan, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul: “Keberlanjutan Program Tanggung jawab Sosial Perusahaan (CSR) untuk Pemberdayaan Komunitas (Studi Kasus pada Program CSR PT Semen Padang di Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, Kota Padang)”. Untuk itu, peneliti mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1) Bagaimana pengelolaan program CSR PT Semen Padang ?, (2) Bagaimana keberlanjutan program CSR PT Semen Padang ?

1.2. Tujuan

- 1) Mendeskripsikan pengelolaan program CSR PT Semen Padang di Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, Kota Padang;
- 2) Mengidentifikasi aspek keberlanjutan program CSR PT Semen Padang di Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, Kota Padang.

1.3. Luaran Penelitian

- 1) Laporan penelitian;
- 2) Publikasi pada Jurnal Nasional Terakreditasi;
- 3) Publikasi berupa prosiding yang disampaikan pada Seminar/Konferensi Internasional;
- 4) Draft buku atau penambahan bab baru buku ajar/referensi perkuliahan.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengantar

Pada bagian ini akan dikupas mengenai rujukan kepuastakan terkait topik penelitian. Penelitian tentang CSR ini mengacu kepada pada beberapa landasan teori dan konsep, yakni (a) Pembangunan yang Berpusat pada Rakyat, (b) Pemberdayaan Masyarakat, (c) Pembangunan Berkelanjutan, serta (d) Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

2.2. Pembangunan yang Berpusat pada Rakyat

Pembangunan selama ini yang dilakukan dengan paradigma pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan dan di koreksi dengan paradigma pembangunan yang berorientasi pada pemerataan, ternyata menimbulkan juga menimbulkan permasalahan. Setelah pada paradigma pertama berdampak pada munculnya masalah kemiskinan, pengangguran, serta ketidakmerataan pendapatan, ternyata setelah paradigma kedua menimbulkan masalah baru, yakni ketidakmandirian masyarakat.

Beranjak dari fakta diatas, maka Korten (1993) *dalam* Mardikanto (2013: 143-144) menawarkan alternatif paradigma pembangunan baru yang dikenal dengan istilah *People Centered Development* (Pembangunan yang Berpusat pada Rakyat). Paradigma ini memandang bahwa inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumberdaya pembangunan dengan 3 (tiga) tema penting, yakni : *Pertama*, penekanan akan dukungan dan pembangunan usaha-usaha swadaya kaum miskin guna menangani kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri; *Kedua*, kesadaran bahwa walaupun sektor modern merupakan sektor utama bagi pertumbuhan ekonomi yang konvensional, tetapi sektor tradisional merupakan sumber utama bagi kehidupan sebagian besar rumah tangga miskin; *Ketiga*, kebutuhan akan kemampuan kelembagaan yang baru dalam usaha membangun kemampuan para masyarakat miskin sebagai penerima bantuan demi pengelolaan bantuan yang produktif dan swadaya berdasarkan sumberdaya lokal.

Ada perbedaan pandangan dalam melihat fokus pembangunan, dimana dalam menginterpretasikan pengertian *people-centered development* lebih difokuskan skala

prioritasnya pada unsur manusia dengan pendekatan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Penafsiran *people-centered development* dan *sustainable development* tidak jarang ditafsirkan secara berbeda oleh pelaksana pembangunan di beberapa negara yang sudah berkembang dan juga negara yang sedang berkembang, seperti Indonesia. Di Indonesia, aspek lingkungan dalam *people-centered development* seakan-akan ditiadakan. Sementara itu pengertian *people-centered development* seringkali hanya diputus pada pengertian pembangunan yang menempatkan manusia sebagai prioritas pembangunan, sedangkan pengertian berkelanjutan lebih diarahkan pada berkelanjutannya program pembangunan yang dijalankan oleh pelaku pembangunan dari lembaga pemerintah atau bukan pemerintah (Rukminto, 2008: 67).

Penjelasan lebih detail dikemukakan oleh Korten (1984: 299) dalam Rukminto (2008: 70) bahwa yang menjadi fokus dari *people-centered development* adalah untuk “*to enhance human growth and well-being, equity, and sustainability*” (untuk meningkatkan pertumbuhan dan kemakmuran manusia, meningkatkan keadilan, dan berkelanjutan), yang dilanjutkan dengan “*The dominant logic of this paradigm is that of a balanced of human ecology*” (pemikiran yang mendominasi paradigma ini adalah pembangunan yang memperhatikan keseimbangan ekologi manusia...). Dari kutipan Korten tersebut, terlihat bahwa meskipun paradigma *people-centered development* banyak memfokuskan pada unsur pertumbuhan dan kemakmuran manusia, tetapi aspek keadilan dan keberlanjutan ekologis juga menjadi perhatian dari pendekatan ini.

Berdasarkan hal tersebut, pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat merupakan suatu alternatif baru untuk meningkatkan hasil produksi pembangunan guna memenuhi kebutuhan penduduk yang sangat banyak dan terus bertambah, akan tetapi peningkatan itu harus dicapai dengan cara-cara yang sesuai dengan azas-azas dasar partisipasi dan keadilan dan hasil-hasil itu harus dapat dilestarikan untuk kelangsungan hidup manusia di bumi ini (Mardikanto, 2013: 56). Dengan pendekatan *people-centered development* ini, pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa pentingnya sinkronisasi antara pembangunan yang memfokuskan pada aspek ekonomi, ekologi, dan keadilan.

2.3. Pemberdayaan Masyarakat

Dalam kaitan dengan konsep pemberdayaan masyarakat, banyak para ahli yang mengemukakan definisi. Salah satunya adalah Payne (1997: 266) dalam Rukminto (2008: 77) yang mengemukakan bahwa suatu pemberdayaan (*empowerment*) pada intinya ditujukan guna membantu klien (masyarakat) memperoleh daya (otoritas/kewenangan) sehingga dengan daya tersebut mampu mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan terkait dengan masa depan diri mereka. Hal ini termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial mereka dalam melakukan tindakan. Agar mampu melakukan proses tersebut, maka perlu dilakukan upaya peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki.

Lebih jauh dijelaskan Shardlow (1998:32) dalam Rukminto (2008:78) bahwa berbagai pengertian yang mengungkap tentang pemberdayaan, pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok atau komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sendiri sesuai dengan keinginan mereka. Dalam kesimpulannya, Shardlow menggambarkan bahwa pemberdayaan sebagai suatu gagasan tidak berbeda dengan gagasan Biestek (1961) dalam Rukminto (2008:78) dengan istilah "*self determination*". Prinsip ini pada intinya mendorong klien untuk menentukan sendiri apa yang harus ia lakukan dalam kaitannya dengan upaya mengatasi permasalahan yang ia hadapi sehingga klien mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh untuk membentuk hari depannya.

Terdapat dua hal penting dalam pemberdayaan, yakni prinsip dan proses pemberdayaan. Kedua hal ini menjadi penting dalam kita melakukan analisa terhadap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Menurut Soedijanto (2001) dalam Mardikanto (2013: 246), prinsip-prinsip pemberdayaan meliputi: (1) kesukarelaan, (2) otonom, (3) keswadayaan, (4) partisipatif, (5) egaliter, (6) demokratis, (7) transparansi, (8) kebersamaan, (9) akuntabilitas, serta (10) desentralisasi. Sementara Dahama dan Bhatnagar (1980) dalam Mardikanto (2013: 244), mengemukakan 12 belas prinsip-prinsip pemberdayaan, yakni : (1) minat dan kebutuhan, (2) organisasi masyarakat bawah, (3) keragaman budaya, (4) perubahan budaya, (5) kerjasama dan partisipasi, (6) demokratis dalam penerapan ilmu, (7) belajar sambil bekerja, (8)

penggunaan metoda yang sesuai, (9) kepemimpinan, (10) spesialis yang terlatih, (11) segenap keluarga, serta (12) kepuasan.

Upaya pemberdayaan masyarakat dapat juga di lihat dari sisi keberadaannya sebagai suatu program dan proses. Pemberdayaan sebagai suatu program, merupakan pemberdayaan yang ditinjau dari tahapan-tahapan kegiatan guna mencapai suatu tujuan yang biasanya sudah ditentukan jangka waktunya. Konsekuensi dari pemberdayaan sebagai program ini adalah apabila program itu selesai maka dianggap pemberdayaannya juga sudah selesai dilakukan, baik yang dilakukan oleh instansi pemerintah melalui proyek atau organisasi non-pemerintah karena dukungan dana dari donor telah berakhir. Sedangkan pemberdayaan sebagai suatu proses, lebih menekankan pemberdayaan sebagai proses yang berkelanjutan sepanjang hidup seseorang. Sehingga dalam konteks individu maupun komunitas, pemberdayaan individu maupun komunitas sebagai sebuah proses tidak akan berakhir dengan selesainya suatu program yang dilaksanakan pemerintah maupun organisasi non pemerintah. Proses pemberdayaan akan berlangsung selama individu atau komunitas itu masih tetap ada dan mau berusaha memberdayakan diri mereka sendiri (Rukminto, 2008: 83)

Hogan (2000: 20) *dalam* Rukminto (2008: 85) menggambarkan proses pemberdayaan yang berkelanjutan sebagai suatu siklus yang terdiri dari 5 (lima) tahapan utama, yakni : (1) menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan dan tidak memberdayakan; (2) mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan penidakberdayaan; (3) mengidentifikasi suatu masalah ataupun proyek; (4) mengidentifikasi basis daya yang bermakna untuk melakukan perubahan, serta (5) mengembangkan rencana-rencana aksi dan mengimplementasikannya. Dari siklus diatas, menjadi makin jelas mengapa Hogan meyakini bahwa proses pemberdayaan yang terjadi tidaklah berhenti pada suatu titik tertentu, tetapi lebih merupakan sebagai upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan daya yang ada.

Selanjutnya apabila dalam suatu komunitas tersebut proses pemberdayaannya sudah berlangsung secara berkelanjutan, permasalahan bukan berarti sudah tidak ada lagi. Pada tahapan berikutnya, komunitas tersebut sudah dapat menjalin hubungan dengan sumberdaya-sumberdaya eksternal yang dapat membantu mengatasi permasalahan yang ada dan juga komunitas tersebut sudah mampu menggali potensi

yang ada dalam komunitas itu sendiri guna dikombinasikan dengan sumberdaya eksternal tersebut. Jadi pemberdayaan berarti mempersiapkan struktur dan sistem dalam komunitas agar dapat bersikap pro-aktif dan responsif terhadap kebutuhan komunitas (Rukminto, 2008: 87)

Pemberdayaan masyarakat secara program maupun proses, terkait dengan keberadaan agen pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku perubahan atau pemercepat perubahan (fasilitator). Sebagai fasilitator, keberadaan agen pengubah tidak mutlak harus hadir terus-menerus pada suatu kelompok/komunitas sasaran. Fasilitator lebih berperan untuk membuat agar kelompok sasaran menjadi lebih mempunyai daya sehingga nantinya mampu mengembangkan kelompok/komunitas mereka sendiri bila sudah tiba masanya program selesai. Akhirnya dalam kaitannya dengan upaya pemberdayaan, peran sebagai pemercepat perubahan (*enabler*) atau *community worker* lah yang sebaiknya di pilih oleh pelaku/agen perubahan (Rukminto, 2008: 87).

2.4. Pembangunan Berkelanjutan

Konsep berkelanjutan (*sustainability*) berawal dari sikap keprihatinan kaum pencinta lingkungan (*environmentalis*) terhadap konsekuensi jangka panjang dari praktek tekanan yang eksekutif terhadap daya dukung alami. Para aktivis LSM menunjukkan kepedulian yang cukup kuat terhadap perlunya mempertahankan prinsip-prinsip berkelanjutan dalam setiap proses pembangunan. Prinsip berkelanjutan ini telah menjadi bagian integral dalam pembangunan ekonomi masyarakat dunia, yang dikenal dengan istilah *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan). Sudah banyak definisi pembangunan berkelanjutan yang diapungkan para ahli. Namun definisi yang secara umum diterima oleh masyarakat internasional adalah definisi yang disusun oleh Brundtland Commission, yang memahami pembangunan berkelanjutan sebagai praktik pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tanpa menurunkan atau merusak kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Keberlanjutan dalam konteks ini sangat menekankan keterpaduan atau integrasi antara tiga sistem pokok, yakni lingkungan (*environmental*), ekonomi, dan sosial, serta memusatkan perhatian pada masalah-masalah kualitas kehidupan (Zubaedi, 2007: 180).

Lebih jauh Guy and Rogers (1999: 2) dalam Zubaedi (2007: 181) menjelaskan bahwa kerangka berpikir diatas memberi pemahaman bahwa keberlanjutan mencakup keberlanjutan lingkungan (*environmental sustainability*), keberlanjutan ekonomi (*economic sustainability*), serta keberlanjutan sosial (*social sustainability*). Keberlanjutan lingkungan meliputi empat dimensi: keberlanjutan lingkungan alam, sumberdaya alam (diperbaharui maupun yang tidak bisa diperbaharui), daya dukung alam, dan pelayanan alam. Pada prinsipnya adanya kesadaran dalam mempertahankan keseimbangan antara penggunaan sumberdaya alam dengan pengembalian sumberdaya alam demi menjamin terwujudnya lingkungan yang berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan menurut Zubaedi (2007: 182) pada dasarnya memerlukan tiga aspek, yakni keseimbangan ekologis, keadilan sosial, dan aspek ekonomi. Aspek keseimbangan ekologis berkaitan dengan upaya pengurangan dan pencegahan polusi, pengelolaan limbah, dan konservasi/preservasi sumberdaya alam. Aspek keadilan sosial berkaitan dengan upaya pemecahan masalah kependudukan, perbaikan pelayanan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, dll. Sedangkan aspek ekonomi berkaitan dengan upaya mengurangi kemiskinan, mengubah pola produksi, mengubah pola konsumsi ke arah yang seimbang, dll.

Untuk memasyarakatkan penerapan paradigma pembangunan berkelanjutan, Bank Dunia telah melakukan beberapa prakarsa. Salah satunya adalah menjabarkan konsep pembangunan berkelanjutan dalam bentuk kerangka Segitiga Pembangunan Berkelanjutan (*Environmentally Sustainable Development Triangle*) (Serageldin and Steer, 1994 dalam Zubaedi, 2007: 184).

Menurut kerangka tersebut, suatu kegiatan pembangunan dianggap berkelanjutan jika kegiatan tersebut secara ekonomis, ekologis, dan sosial bersifat berkelanjutan. Berkelanjutan secara ekonomis diartikan jika suatu kegiatan pembangunan dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi, pemeliharaan kapital, dan penggunaan sumberdaya, serta investasi secara efisien. Berkelanjutan secara ekologis diartikan jika kegiatan pembangunan tersebut dapat mempertahankan integritas ekosistem, memelihara daya dukung lingkungan, dan konservasi sumberdaya alam termasuk keanekaragaman hayati (*biodiversity*).

2.5. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility-CSR*) tidak terlepas dari konteks waktu pada saat konsep ini berkembang dan berbagai faktor yang terjadi di lingkungan internal maupun eksternal perusahaan yang mempengaruhi perkembangan konsep CSR. Terdapat tiga periode penting dalam perkembangan konsep CSR tersebut, antara lain: (a) Perkembangan awal konsep CSR di era tahun 1950-1960 an; (b) Perkembangan konsep CSR di era tahun 1970-1980; serta (c) Perkembangan konsep CSR di era tahun 1990-an sampai dengan saat ini (Roza, 2014).

Selanjutnya Karomah (2013: 6), menjelaskan bahwa definisi yang paling umum untuk mengartikan CSR adalah "*Komitmen keberlanjutan oleh perusahaan yang memiliki perilaku moral dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup tenaga kerja dan keluarganya dan juga masyarakat lokal secara luas*" (*World Business Council for Sustainable Development, 2005*). Pada intinya, CSR adalah perubahan hubungan antara bisnis dengan masyarakat di sekitarnya. Banyak orang percaya bahwa perusahaan tidak akan berlangsung lama jika mereka hanya berorientasi pada profit. Padahal, aktivitas mereka baik secara langsung maupun tidak akan berdampak positif maupun negatif terhadap masyarakat di sekitar mereka ataupun masyarakat dunia. Oleh karena itu, lembaga standarisasi internasional (ISO) memandang perlu untuk memberikan panduan terhadap pelaksanaan CSR. ISO 26000 mengartikan SR (*Social Responsibility*) sebagai tanggung jawab suatu organisasi yang atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis, yang: (1) Konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat; (2) Memperhatikan kepentingan dari para pemangku kepentingan; (3) Sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma internasional; serta (4) Terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi, dalam pengertian ini meliputi baik kegiatan, produk maupun jasa.

CSR secara global tidak hanya dimaknai sebagai sebuah aktivitas derma atau karitatif atau sikap sukarela yang dilakukan pihak perusahaan. Namun, paradigma baru CSR mengarah pada sebuah bentuk komitmen suatu perusahaan, dalam melakukan tanggung jawab atau timbal balik (*feed back*) kepada masyarakat dan

lingkungan, serta pembangunan ekonomi mandiri secara berkelanjutan. Semisal memodifikasi *business asusual* dan pemberian kredit mikro yang khusus kepada masyarakat miskin sebagai bentuk “bisnis mengatasi kemiskinan”. Lahirnya paradigma tersebut seiring dengan lahirnya konsep pembangunan berkelanjutan. Kesadaran tersebut lahir dan berkembang sebagai tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan, mengingat munculnya beragam konflik dan kesenjangan sosial antar tenaga dengan pemilik perusahaan, serta masyarakat disekitar lingkungan kerja. Pada tahun-tahun awal perkembangan paradigma tersebut, CSR masih dipandang sebagai sebuah tanggungjawab sosial yang dilaksanakan secara primitif. Belum adanya standar baku pedoman pelaksanaan dan penilaian terhadap pelaksanaan CSR menjadi kendala utama dalam kesepemahaman konsep (Ria dan Yusuf, 2014).

Selanjutnya pada tahun 2005 Phillip Kotler dan Nancy Lee sependapat bahwa aktifitas *Corporate Social Responsibility* harus berada pada koridor strategi perusahaan yang diarahkan untuk mencapai *bottom line business goal* seperti mendongkrak penjualan dan pangsa pasar, membangun *positioning* merk, menarik, membangun, memotivasi loyalitas karyawan, mengurangi biaya operasional hingga membangun citra korporat di pasar modal. Dengan argumentasi tersebut dapat dilihat bahwa *Corporate Social Responsibility* bukan merupakan aktifitas tempelan atau yang terpinggirkan, tapi merupakan denyut nadi perusahaan (Karlos, 2009).

Lebih jauh Carol dalam Karlos (2009) menyatakan bahwa secara umum etika dipahami sebagai aturan tentang prinsip-prinsip dan nilai-nilai moral yang mengarahkan perilaku seseorang atau kelompok masyarakat mengenai baik atau buruk dalam pengambilan kebijakan atau keputusan. Ada tiga pendekatan dalam proses pembentukan tanggung jawab sosial, yaitu: (1) Pendekatan moral, yaitu dengan kebijakan atau tindakan yang didasarkan pada prinsip kesantunan dengan pengertian bahwa apa yang dilakukan tidak melanggar atau merugikan pihak-pihak lain secara sengaja; (2) Pendekatan kepentingan bersama, yaitubahwa kebijakan-kebijakan moral harus didasarkan pada standar kebersamaan dan kewajiban; (3) Pendekatan manfaat, adalah konsep tanggung jawab sosial yang didasarkan pada nilai-nilai apa yang dilakukan oleh perusahaan menghasilkan manfaat besar bagi pihak-pihak berkepentingan secara adil. Dari ketiga kriteria tanggung jawab sosial

perusahaan tersebut, tanggung jawab sosial sebagai tanggung jawab sukarela menjadi kriteria ideal untuk membangun suatu pola kemitraan dalam suatu model program pemberdayaan masyarakat. Dengan berbasis pada nilai yang murni sebagai kontribusi sosial. Dengan sendirinya kemitraan akan membuka ruang partisipasi yang lebih luas. Melalui kriteria tersebut juga kemitraan akan menjadi garis tegas yang memisahkan motif tanggung jawab sosial perusahaan, antara tindakan ekonomi untuk memaksimalkan keuntungan dengan tindakan sosial sukarela. Sebagai tindakan sosial sukarela, kemitraan cenderung akan melibatkan partisipan yang tidak berorientasi ekonomi seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat serta masyarakat itu sendiri. Sebaliknya apabila tanggung jawab sosial lebih berorientasi pada pencapaian tujuan ekonomi perusahaan maka partisipan yang terlibat tentunya merupakan pelaku ekonomi. Tindakan sosial sukarela akan menjamin adanya kesesuaian tindakan masing-masing partisipan dengan tujuan pemberdayaan masyarakat sebagai tujuan bersama, sementara dalam tindakan ekonomi masing-masing partisipan lebih menyesuaikan tindakannya dengan nilai ekonomi yang diharapkan dari kemitraan.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Pengantar

Pada bagian ini akan diuraikan tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini. Adapun beberapa sub bab yang terdapat pada bagian ini, terdiri dari (a) Tempat dan Waktu, (b) Metode Penelitian, (c) Informan Penelitian, (d) Strategi Pengumpulan Data dan Informasi, (e) Topik Pengamatan, serta (f) Metode Analisa Data.

3.2. Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Lambung Bukit yang berada di Kecamatan Pauh, Kota Padang. Pemilihan tempat penelitian dilakukan dengan sengaja (*purposive*) dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Kelurahan Lambung Bukit berada pada lokasi yang menjadi lingkaran terdalam (ring - 1) dari PT Semen Padang;
- 2) Kelurahan Lambung Bukit merupakan lokasi pelaksanaan program CSR dengan pola baru semenjak tahun 2015 dan masih berlanjut sampai sekarang;
- 3) Kelurahan Lambung Bukit merupakan kelurahan yang mayoritas mata pencaharian masyarakatnya tergantung pada alam dan berada di sub-sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, perikanan, dan usaha mikro;
- 4) Kelurahan Lambung Bukit merupakan kelurahan yang termasuk pada kecamatan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang relatif rendah dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kota Padang.

Proses penelitian yang dimulai dari tahapan persiapan, kontrak perjanjian kerjasama penelitian sampai dengan penyerahan laporan penelitian dilaksanakan dalam jangka waktu 4 bulan, yakni bulan Juli 2018 sampai bulan September 2018.

3.3. Metode Penelitian

Desain penelitian ini berupa metode deskriptif dan jenis studi kasus, yakni penelitian tentang suatu objek penelitian yang berkenaan dengan suatu fakta yang spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas yang terjadi (Neuman, 2013). Dalam konteks penelitian, melalui metode ini dideskripsikan secara detail berbagai fenomena dan pola interaksi yang terjadi di komunitas yang menjadi mitra program CSR dan mengkaitkannya dengan konsep prinsip dan proses pemberdayaan komunitas. Adapun yang menjadi kasus adalah program CSR yang dilaksanakan di Kelurahan Lambung Bukit.

3.4. Informan Penelitian

a) Informan Pengamat (Key Informan)

Merupakan informan yang memberikan informasi tentang orang lain atau suatu hal kepada peneliti. Informan ini bisa orang yang tidak diteliti atau orang lain yang mengetahui orang yang kita teliti atau pelaku kejadian yang diteliti. Mereka dapat di sebut sebagai saksi suatu kejadian atau pengamat lokal. Untuk itu, informan pengamat yang dijadikan sumber informasi untuk penelitian di kelurahan berjumlah 6 orang yang terdiri dari: (a) perwakilan komunitas lokal (2 orang), (b) pendamping program (1 orang), (c) aparat kelurahan (1 orang), (d) perwakilan pengelola program (2 orang), (e) perwakilan perusahaan (1 orang)

b) Informan Pelaku (Responden)

Informan pelaku adalah informan yang memberikan keterangan tentang dirinya, perbuatannya, pikirannya, interpretasinya (maknanya) atau pengetahuannya. Dalam penelitian ini, yang menjadi informan pelaku adalah multi pihak yang berpartisipasi dalam pelaksanaan program CSR dari perusahaan. Dalam upaya memperoleh informasi dan data yang relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka pengumpulan informasi dan data dilakukan dengan menentukan secara sengaja informan pelaku terlebih dahulu (Afrizal, 2014:140).

Berdasar rujukan diatas, maka pada penelitian ini kriteria informan pelaku (responden) dalam penelitian ini adalah individu dan organisasi yang berpartisipasi dan menjadi mitra dalam pelaksanaan program CSR perusahaan semenjak tahun 2015 sampai saat ini.

3.5. Strategi Pengumpulan Data dan Informasi

Strategi pengumpulan data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Jenis Data dan Informasi

Terdapat dua jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian, yakni : (1) Data Primer; merupakan data yang dikumpulkan dari sumber pertama, serta (2) Data Sekunder; merupakan data pendukung yang diperoleh secara tidak langsung.

b) Sumber Data dan Informasi

Terdapat dua sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian, yakni : (1) individu dan/atau kelompok; merupakan sumber untuk memperoleh data primer dan menjadi sumber pertama, serta (2) instansi dan/institusi; merupakan sumber untuk memperoleh data pendukung, berupa dokumen-dokumen.

c) Teknik Pengumpulan Data dan Informasi

Terdapat 4 (empat) teknik pengumpulan data dalam penelitian, yakni : (1) wawancara mendalam, (2) Diskusi Kelompok Terfokus (FGD), (3) wawancara terstruktur, (4) pengamatan langsung (observasi), serta (5) studi literatur.

3.6. Topik Pengamatan

Untuk tujuan penelitian pertama, yakni Mendeskripsikan pengelolaan program CSR PT Semen Padang di Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, Kota Padang, topik yang diamati merujuk pada dokumen SOP CSR PT Semen Padang (2015), terdiri dari :

- 1) Tahap Pra Program CSR
 - a) Tahap Persiapan

- Evaluasi CSR
 - Penyusunan roadmap CSR
 - Rekrutmen tim pendamping
 - Penentuan calon lokasi/calon mitra
- b) Tahap Perencanaan
- Pemeriksaan ulang kelurahan sasaran
 - Sosialisasi dan penilaian persepsi
 - Pemahaman peta kelurahan
 - Pemetaan swadaya (*social mapping*)
 - Merancang tindakan bersama berbasis kebutuhan
 - Penyusunan dokumen RKPM tahunan
 - Penyepakatan rencana program (muskito)
- 2) Tahap Pengorganisasian
- a) Penyepakatan organisasi pengelola program CSR (level perusahaan dan lembaga pengelola)
- b) Penyepakatan organisasi pelaksana program CSR (level lembaga pengelola dan komunitas lokal yang menjadi mitra)
- 3) Tahap Pelaksanaan
- a) Program Campin Nagari
- b) Program Pandai Nagari
- c) Program Peduli Nagari
- d) Program Elok Nagari
- 4) Tahap Monitoring dan Evaluasi
- a) Monitoring
- b) Evaluasi
- 5) Tahap Pelembagaan (*Exit Strategy*)

Untuk tujuan penelitian kedua, yakni: Mengidentifikasi aspek keberlanjutan program CSR PT Semen Padang di Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, Kota Padang, topik yang diamati merujuk dari penelitian Anandini (2011), yang terdiri dari:

- 1) Keberlanjutan dari Aspek Kelembagaan
- 2) Keberlanjutan dari Aspek Pembiayaan

- 3) Keberlanjutan dari Aspek Sosial Budaya Masyarakat
- 4) Keberlanjutan Aspek Lingkungan

3.7. Metode Analisa Data

Metode analisa yang dilakukan terbagi ke dalam dua, yakni : *Pertama*, perspektif tingkat kepentingan dalam program CSR PT Semen Padang terkait keempat aspek keberlanjutan, yakni aspek kelembagaan, aspek pembiayaan, aspek sosial budaya, serta aspek lingkungan. Adapun metode analisa data untuk keempat aspek tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kondisi yang Diharapkan

a) Aspek Kelembagaan

Untuk membuat kriteria aspek kelembagaan yang terdiri dari 4 pernyataan digunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 Interval &= \frac{Skor\ tertinggi - Skor\ Terendah}{Jumlah\ Klasifikasi} \\
 &= \frac{(5 \times 4) - (1 \times 4)}{5} \\
 &= \frac{20 - 4}{5} = 3,2
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan rentang skala sehingga didapatkan kriteria mengukur aspek Kelembagaan yang dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Interval	Kriteria
4 – 7,2	Sangat Tidak Penting
>7,2 – 10,4	Kurang Penting
>10,4 – 13,6	Cukup Penting
>13,6 – 16,8	Penting
16,8 – 20	Sangat Penting

b) Pembiayaan

Untuk membuat kriteria aspek Pembiayaan yang terdiri dari 11 pernyataan digunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Interval} &= \frac{\text{Skor tertinggi} - \text{Skor Terendah}}{\text{Jumlah Klasifikasi}} \\
 &= \frac{(5 \times 11) - (1 \times 11)}{5} \\
 &= \frac{55 - 11}{5} = 8,8
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan rentang skala sehingga didapatkan kriteria mengukur aspek Pembiayaan yang dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Interval	Kriteria
11 – 19,8	Sangat Tidak Penting
>19,8 – 28,6	Kurang Penting
>28,6 – 37,4	Cukup Penting
>37,4 – 46,2	Penting
46,2 – 55	Sangat Penting

c) Aspek Sosial Budaya

Untuk membuat kriteria aspek Sosial Budaya yang terdiri dari 5 pernyataan digunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Interval} &= \frac{\text{Skor tertinggi} - \text{Skor Terendah}}{\text{Jumlah Klasifikasi}} \\
 &= \frac{(5 \times 5) - (1 \times 5)}{5} \\
 &= \frac{25 - 5}{5} = 4
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan rentang skala sehingga didapatkan kriteria mengukur aspek Sosial Budaya yang dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Interval	Kriteria
5 – 9	Sangat Tidak Penting
>9 – 13	Kurang Penting
>13 – 17	Cukup Penting
>17 – 21	Penting

21 – 25	Sangat Penting
---------	----------------

d) Aspek Lingkungan

Untuk membuat kriteria aspek lingkungan yang terdiri dari 6 pernyataan digunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 Interval &= \frac{Skor\ tertinggi - Skor\ Terendah}{Jumlah\ Klasifikasi} \\
 &= \frac{(5 \times 6) - (1 \times 6)}{5} \\
 &= \frac{30 - 6}{5} = 4,8
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan rentang skala sehingga didapatkan kriteria mengukur aspek Lingkungan yang dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Interval	Kriteria
6 – 10,8	Sangat Tidak Penting
>10,8 – 15,6	Kurang Penting
>15,6 – 20,4	Cukup Penting
>20,4 – 25,2	Penting
25,2 – 30	Sangat Penting

2. Kondisi yang Terjadi Saat Ini (Realitas)

a) Aspek Kelembagaan

Untuk membuat kriteria dari aspek Kelembagaan yang terdiri dari 4 pernyataan digunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 Interval &= \frac{Skor\ tertinggi - Skor\ Terendah}{Jumlah\ Klasifikasi} \\
 &= \frac{(2 \times 4) - (0 \times 4)}{3} \\
 &= \frac{8 - 0}{3} = 2,67
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan rentang skala sehingga didapatkan kriteria mengukur aspek Kelembagaan yang dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Interval	Kriteria
0 – 2,67	Tidak Ada
>2,67 – 5,34	Cukup
5,34 – 8	Baik

b) Aspek Pembiayaan

Untuk membuat kriteria aspek Pembiayaan yang terdiri dari 11 pernyataan digunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 Interval &= \frac{Skor\ tertinggi - Skor\ Terendah}{Jumlah\ Klasifikasi} \\
 &= \frac{(2 \times 11) - (0 \times 11)}{3} \\
 &= \frac{22 - 0}{3} = 7,3
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan rentang skala sehingga didapatkan kriteria mengukur aspek Pembiayaan yang dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Interval	Kriteria
0 – 7,3	Tidak ada
>7,3– 14,6	Cukup
14,7 – 22	Baik

c) Aspek Sosial Budaya

Untuk membuat kriteria aspek Sosial Budaya yang terdiri dari 5 pernyataan digunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 Interval &= \frac{Skor\ tertinggi - Skor\ Terendah}{Jumlah\ Klasifikasi} \\
 &= \frac{(2 \times 5) - (0 \times 5)}{3} \\
 &= \frac{10 - 0}{3} = 3,3
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan rentang skala sehingga didapatkan kriteria mengukur aspek Sosial Budaya yang dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Interval	Kriteria
0 – 3,3	Tidak Ada
>3,3 – 6,6	Cukup
6,7 – 10	Baik

d) Aspek Lingkungan

Untuk membuat kriteria aspek Lingkungan yang terdiri dari 6 pernyataan digunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 Interval &= \frac{Skor\ tertinggi - Skor\ Terendah}{Jumlah\ Klasifikasi} \\
 &= \frac{(2 \times 6) - (0 \times 6)}{3} \\
 &= \frac{12 - 0}{3} = 4
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan rentang skala sehingga didapatkan kriteria mengukur aspek Lingkungan yang dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Interval	Kriteria
0 – 4	Tidak Ada
>4 – 8	Cukup
>8 – 12	Baik

Untuk menjawab tujuan penelitian pertama, dilakukan dengan analisa data kualitatif. Analisa data mengacu kepada dua konsep pemberdayaan, yakni prinsip pemberdayaan yang dikemukakan oleh Soedijanto (2001) dalam Mardikanto (2013: 246) dan Dahama dan Bhatnagar (1980) dalam Mardikanto (2013: 244), serta proses pemberdayaan yang dikemukakan Hogan (2000: 20) dalam Rukminto (2008: 85).

Sedangkan untuk menjawab tujuan penelitian kedua, dilakukan dengan analisa data kualitatif. Analisa data mengacu kepada penelitian Anandini (2011) yang memuat lima indikator keberlanjutan program pemberdayaan.

BAB 4

PROFIL KESEJARAHAN PT SEMEN PADANG DAN PROGRAM CSR DI KELURAHAN LAMBUNG BUKIT

4.1. Pengantar

Pada bagian ini akan dimulai dengan hantaran tentang profil dan kesejarahan PT Semen Padang di Indonesia pada umumnya dan Propinsi Sumatera Barat pada khususnya. PT Semen Padang merupakan salah satu BUMN strategis yang ada di Kota Padang dan tentu saja keberadaannya berdampak bagi pembangunan daerah sejak berdiri sampai saat ini. Selanjutnya pada bagian ini juga akan dijelaskan mengenai latar belakang serta profil program CSR PT Semen Padang sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan terhadap daerah dan masyarakat. Pada bagian ini akan dijelaskan tentang Kelurahan Lambung Bukit secara lebih dekat melalui profil wilayah kelurahan, yang akan di sigi dari beberapa aspek, yakni : (a) kondisi geografis penggunaan lahan, (b) kondisi demografis dan SDM, (c) kondisi sarana prasarana penunjang, serta (d) kondisi kelembagaan penunjang. Deskripsi akan dibatasi dalam konteks eksistensi CSR PT Semen Padang dalam menunjang pembangunan wilayah di Kelurahan Lambung Bukit. Selanjutnya akan dideskripsikan juga latar belakang sejarah hadirnya PT Semen Padang di Kelurahan Lambung Bukit, sehingga penting adanya program CSR di wilayah tersebut.

4.2. Deskripsi Profil dan Sejarah Keberadaan CSR PT Semen Padang

4.2.1. Sejarah Keberadaan PT Semen Padang

PT Semen Padang merupakan pabrik semen tertua di Indonesia yang didirikan pada tanggal 18 Maret 1910, dengan nama *NV Nederlandsch Indische Portland Cement Maatschppi* (NV NIPCM) dan mulai beroperasi pada tahun 1913. Ketika Jepang menguasai Indonesia pada tahun 1942-1945, pabrik diambil alih oleh manajemen *Asano Cement* Jepang. Saat kemerdekaan Indonesia tahun 1945, pabrik diambil alih oleh karyawan dan selanjutnya diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia dengan nama Kilang Semen Indarung. Lalu pada saat agresi militer tahun 1947, pabrik dikuasai kembali oleh Belanda dan namanya di ganti menjadi *NV Padang Portland Cement Maatschappij* (NV PPCM). Pada tahun 1958 terjadi

nasionalisasi dari Pemerintah Belanda, dan pada tanggal 10 Februari 1973 didirikan Badan Hukum-Perseroan Terbatas. Profil kesejarahan terkait eksistensi PT Semen Padang sampai saat ini masih ada wujud fisik dari beberapa bangunan pabrik Indarung 1 dan menjadi destinasi wisata sejarah di Sumatera Barat.

Gambar 1. Eksistensi Pabrik PT Semen Padang di Masa Lalu



Dari latar belakang sejarah tersebut, kita berkesimpulan bahwa PT Semen Padang memiliki sejarah yang panjang dan dinamis. Selanjutnya pada tahun 1995 Pemerintah Indonesia mengalihkan kepemilikan sahamnya di Semen Padang ke PT Semen Gresik (Persero) Tbk bersamaan dengan pengembangan pabrik Indarung V. Pada tahun 2012, PT Semen Gresik (Persero) Tbk berganti nama menjadi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

Seriring dengan perjalanan waktu, sejak tahun 2013, PT Semen Padang melakukan kesinambungan tema. Di tahun 2013, temanya adalah *growth in sustainability*. Dalam hal ini, PT Semen Padang membuktikannya sebagai perusahaan yang tangguh dan tetap mempertahankan pertumbuhan kinerja di tengah persaingan industri semen. Selanjutnya di tahun 2014 temanya adalah penguatan untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Dalam hal ini, pertumbuhan kinerja PT

Semen Padang memberikan nilai tambah terhadap perekonomian Sumatera Barat pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Gambar 2. Eksistensi Pabrik PT Semen Padang di Masa Sekarang



Pada tahun 2015, temanya adalah bergerak untuk maju memenangkan persaingan dengan transparansi. Untuk itu, PT Semen Padang berkomitmen untuk meningkatkan dan mengoptimalkan seluruh sumberdaya yang dimiliki dan menerapkan keterbukaan informasi dalam rangka memenangkan persaingan yang ketat. Terakhir pada tahun 2016, temanya adalah melangkah mewujudkan kinerja unggul. Untuk itu, PT Semen Padang berusaha mewujudkan profitabilitas yang terus tumbuh melalui penciptaan *operational excellence* dan efisiensi biaya melalui program *cost transformation*.

4.2.2. Latar Belakang Program CSR PT Semen Padang

PT Semen Padang menyadari bahwa sebagai entitas bisnis, keberadaan perusahaan yang bertujuan untuk menciptakan *profit*, harus memberikan kontribusi bagi lingkungan dan masyarakat serta pembangunan nasional secara berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam menjalankan kegiatan usaha, PT Semen Padang senantiasa

fokus untuk menghasilkan keuntungan, dan secara bersamaan menyelenggarakan program dan kegiatan CSR.

PT Semen Padang memandang perlu untuk merealisasikan dan menyempurnakan program CSR sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan, pemberdayaan masyarakat sekitar, dan peningkatan hubungan dengan para pemangku kepentingan. PT Semen Padang menggunakan *Triple Bottom Line (Planet, People, dan Profit)*. Sebagai parameter yang perlu mendapatkan perhatian yang sama untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Dengan kehadiran ISO 26000 SR sebagai acuan mutakhir dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dengan tujuh *core subject*, yakni tata kelola, ketenagakerjaan, hak asasi manusia, konsumen, operasional berkeadilan, keterlibatan dan pengembangan masyarakat serta lingkungan, dinilai sangat relevan dengan *Triple Bottom Line*, sehingga dalam menjalankan strategi perusahaan diharapkan terus berkesinambungan dengan mengadopsi ISO 26000 dalam kebijakan CSR PT Semen Padang.

4.2.3. Visi dan Misi CSR PT Semen Padang

Keberadaan program CSR PT Semen Padang terkait dengan Visi dan Misi dari CSR PT Semen Padang. Dengan adanya perumusan Visi dan Misi, maka program CSR mempunyai arah yang jelas. Adapun Visi CSR PT Semen Padang adalah : “Memberdayakan masyarakat dengan mengoptimalkan sumberdaya dalam meningkatkan citra dan nilai perusahaan secara berkelanjutan yang berwawasan lingkungan”. Sedangkan Misi yang diemban CSR PT Semen Padang terdiri dari : (1) Menjaga citra perusahaan melalui peningkatan kualitas hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingan; (2) Menerapkan *good corporate governance* dan meningkatkan tanggungjawab sosial dalam rantai nilai perusahaan; (3) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat; (4) Membina hubungan industrial serta mengembangkan sumberdaya manusia; serta (5) Menghargai budaya dan tradisi kearifan lokal serta penghormatan terhadap HAM, (6) Meminimalisir dampak operasional, meningkatkan penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan serta menjaga kelestarian lingkungan, serta (7) Meningkatkan kualitas dan layanan pendidikan serta keterampilan masyarakat yang berkesinambungan.

Latar belakang Program CSR PT Semen Padang adalah : (1) Merupakan wujud dari implementasi Visi dan Misi perusahaan dalam mengembangkan “Industri yang Berwawasan Lingkungan” melalui perbaikan ekonomi dan kehidupan sosial serta lingkungan di sekitar tempat beroperasinya perusahaan; (2) Hubungan timbal balik yang harmonis dan saling menguntungkan antara perusahaan dan masyarakat lingkungan merupakan salah satu faktor penentu keberlanjutan (*sustainability*) perusahaan dan terciptanya keamanan lingkungan perusahaan; serta (3) CSR merupakan salah satu aspek sistem manajemen dalam Sistem Manajemen Semen Padang (SMSP) dalam rangka pemenuhan kebutuhan stakeholders secara seimbang; serta (4) Pemenuhan ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

4.2.4. Metodologi dan *Roadmap* CSR PT Semen Padang

PT Semen Padang merancang target dan melaksanakan program CSR Secara sistematis dan terpadu yang dilakukan dengan metode partisipatif. Metode ini dilakukan dengan memberdayakan potensi daerah yang ada agar dapat meningkatkan kemampuan, penghasilan, serta kemakmuran bagi masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. Dalam jangka panjang, PT Semen Padang melakukan monitoring dan evaluasi atas program program CSR yang dilakukan agar program program CSR tersebut dapat mencapai tujuan serta *roadmap* yang diterapkan.

4.2.5. Kebijakan CSR

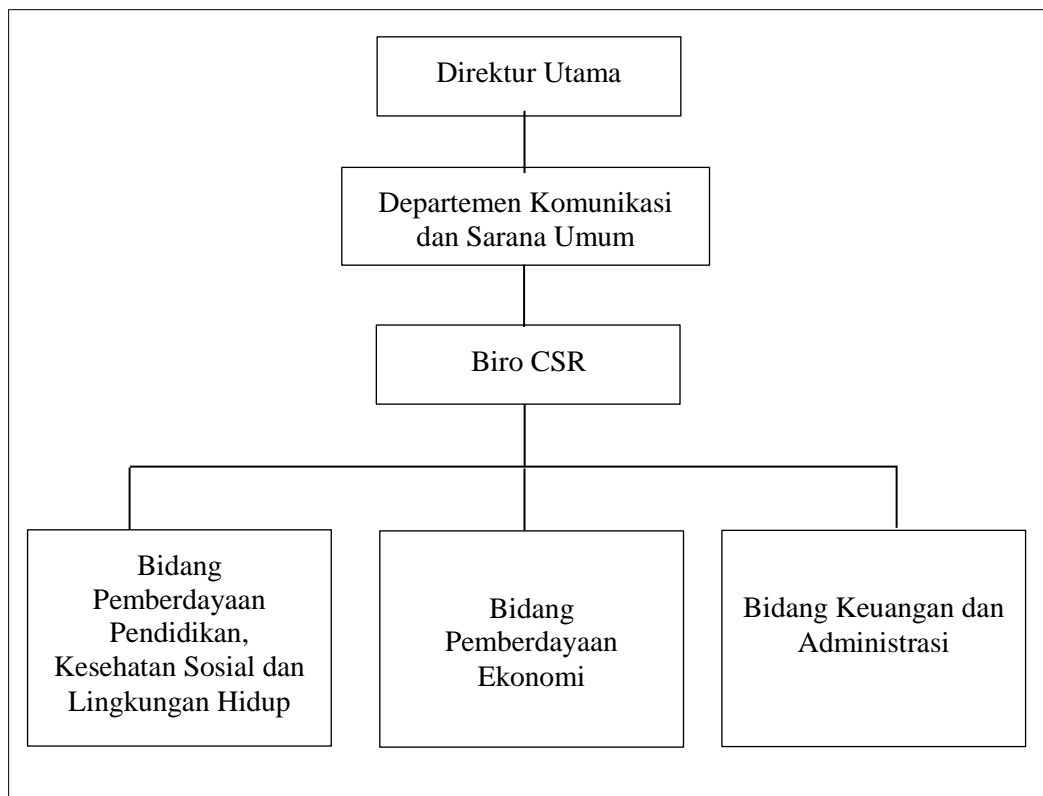
Kebijakan CSR PT Semen Padang dikomunikasikan kepada seluruh *stakeholder* serta diimplementasikan secara konsisten dan dievaluasi untuk peningkatan secara berkelanjutan. Program CSR PT Semen Padang merupakan wujud atas implementasi visi dan misi perusahaan dalam mengembangkan “industri berwawasan lingkungan”, yang merupakan strategi perusahaan untuk meningkatkan daya saing, sehingga perusahaan tetap tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan, berlandaskan *Triple Bottom Line* yang diselaraskan dengan *best practice* ISO 26000 SR.

4.2.6. Strategi CSR

Sejalan dengan konsep *Triple Bottom Line* dan ISO 26000 SR, PT Semen Padang telah menyusun *strategic Flagship CSR* yang disesuaikan dengan arah pengembangan Perusahaan, yaitu : (1) Membangun Perusahaan berkinerja unggul (*Profit*), (2) Membangun dan memberdayakan SDM unggulan (*People*), serta (3) Pelestarian lingkungan dan konversi energi (*Planet*).

4.2.7. Struktur Organisasi Pengelola CSR

Guna mendukung pelaksanaan kegiatan program CSR, Semen Padang telah menunjuk secara formal unit kerja yang mengelola kegiatan CSR setiap tahun. Dalam perjalanannya, telah terjadi beberapa kali penyempurnaan organisasi yang melaksanakan kegiatan program CSR tersebut. Adapun struktur organisasi pengelolaan CSR PT Semen Padang saat ini ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. SM.02.02/080/KD/DESDM/06.016 tanggal 28 Juni 2016 adalah sebagai berikut :



Deskripsi tugas dari masing-masing struktur organisasi pengelolaan CSR PT Semen Padang, dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Direktur Utama

- Menetapkan Kebijakan dan sasaran *Key Performance Index* (KPI) program CSR;
- Memastikan kesesuaian kebijakan dengan program-program CSR;
- Mengevaluasi efektivitas dan efisiensi program CSR.

2) Departemen Komunikasi dan Sarana Umum

- Mengkoordinir penyusunan Rencana Jangka Panjang (RJP) bersama *partner*, pelaksana survei dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
- Mengkoordinir pelaksanaan RKA;
- Memastikan efektivitas pelaksanaan RKA, termasuk pencapaian KPI program CSR;
- Memutuskan penyaluran program dan pembinaan, dalam pemberdayaan ekonomi yang diberikan;
- Melakukan kerja sama dengan unit-unit lainnya dalam penyusunan program;
- Bekerja sama dengan unit-unit lainnya dalam hal penyusunan program;
- Pengawasan terhadap pelaksanaan program;
- Memastikan kesesuaian kebijakan dengan program-program CSR;
- Mengevaluasi efektivitas kebijakan program CSR.

3) Biro CSR

- Melakukan Penyusunan RJP dan RKA bersama *partner*;
- Melaksanakan RKA;
- Memastikan efektivitas pelaksanaan program sesuai RKA termasuk pencapaian KPI program CSR;
- Melakukan evaluasi efektivitas penyaluran program CSR;
- Memutuskan pelaksanaan program yang diberikan;
- Melakukan kerja sama dengan unit-unit lainnya dalam penyusunan program;
- Mengkoordinir penyusunan laporan realisasi kegiatan dan pencapaian KPI bulanan program CSR;

- Bertanggung jawab terhadap kebutuhan data dan dokumentasi audit internal dan eksternal;
 - Mengevaluasi efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program.
- 4) Bidang Pemberdayaan Pendidikan, Kesehatan Sosial dan Lingkungan Hidup
- Menyusun perencanaan, program dan pelaksanaan;
 - Melaksanakan program penyaluran secara efektif;
 - Melakukan monitoring dan evaluasi serta efektivitas terhadap program yang telah dilaksanakan;
 - Mengkomunikasikan aktivitas program secara internal dan eksternal;
 - Menyusun laporan aktivitas secara periodik;
 - Mengevaluasi pelaksanaan program;
 - Bertanggung jawab terhadap kebutuhan data dan dokumen audit internal dan eksternal.
- 5) Bidang Pemberdayaan Ekonomi
- Menyusun perencanaan, program dan pelaksanaan;
 - Melaksanakan penyaluran program secara efektif;
 - Melakukan monitoring dan evaluasi serta efektivitas terhadap program yang telah dilaksanakan;
 - Mengkomunikasikan aktivitas program secara internal dan eksternal;
 - Menyusun laporan aktivitas secara berkala;
 - Bertanggung jawab terhadap kebutuhan data dan dokumentasi audit internal dan eksternal;
 - Mengevaluasi pelaksanaan program.
- 6) Bidang Keuangan dan Administrasi
- Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran;
 - Melaksanakan fungsi kontrol atas anggaran Biro CSR;
 - Melaksanakan fungsi akuntansi dan keuangan;
 - Menyusun laporan evaluasi eektivitas penyaluran program CSR;
 - Menjalankan fungsi verifikasi dan administrasi CSR;
 - Membuat pelaporan atas kegiatan CSR secara berskala (bulanan dan tahunan);

- Menyiapkan dan bertanggung jawab terhadap bahan presentasi, publikasi, kebutuhan data dan dokumentasi audit internal/eksternal;
- Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan *Information Communication Technology* (ICT) di CSR.

4.2.8. Anggaran CSR

Semen Padang terus mendorong pelaksanaan kegiatan CSR sebagai suatu program yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan dan keberlanjutan program dalam jangka panjang untuk menciptakan keseimbangan antara perusahaan, masyarakat dan lingkungan sekitar. Sumber dana program CSR Semen Padang berasal dari biaya perusahaan yang dianggarkan dalam RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan). Dana tanggung jawab sosial perusahaan dalam bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan selain bersumber dari dana yang dialokasikan perusahaan, juga berasal dari alokasi laba bersih perusahaan tahun sebelumnya, sisa dana PKBL tahun sebelumnya, serta pengembalian dana pinjaman, pendapatan jasa administrasi pinjaman dan pendapatan jasa giro yang diterima pada tahun berjalan.

Sumber pendanaan untuk CSR PT Semen Padang bersumber dari:

- a) Penyisihan laba bersih perusahaan maksimal 2% dan atau sesuai dengan keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS) untuk program kemitraan
- b) Penyisihan laba bersih perusahaan maksimal 2% dan atau sesuai dengan keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS) untuk program Bina Lingkungan (BL) dan BUMN peduli
- c) RKAP (rencana kerja anggaran perusahaan) untuk program CSR Non PKBL yang disahkan pada rapat pemegang saham (RUPS)
- d) Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan atau jasa giro dari dana program kemitraan setelah dikurangi beban operasional
- e) Hasil bunga deposito dan atau jasa giro dari dana program bina lingkungan dan BUMN peduli

- f) Alokasi dana dari program CSR anak perusahaan, lembaga penunjang dan afiliasi (APLP dan A) PT Semen Padang

Di samping enam poin di atas, khusus untuk program kemitraan sumber dana yang lain adalah pengembalian dana bergulir (setoran mitra binaan melalui bank dan auto rekening mitra binaan), saldo kas, dan saldo rekening koran pada bank, pengelolaan keuangan dilakukan melalui sistem administrasi keuangan akutansi yang independen dan dikelola secara transparan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.

4.2.9. Dampak Kualitatif Pelaksanaan Kegiatan CSR

Pelaksanaan kegiatan CSR PT Semen Padang dengan berlandaskan Triple Bottom Line bagi para pemangku kepentingan dan perusahaan mampu memberikan dampak positif. Secara kualitatif, dampak yang dihasilkan yakni pemenuhan harapan masyarakat selaku salah satu pemangku kepentingan, mendukung pelestarian lingkungan hidup, memenuhi ketentuan hukum/peraturan perundang-undangan, serta pemenuhan norma dan etika yang berlaku.

Prioritas dan manfaat yang diharapkan dari program-program CSR memiliki dampak positif terhadap perusahaan, yakni peningkatan citra perusahaan (*corporate image*), pengembangan dan pengamanan aset, serta penguatan daya saing perusahaan. Ketiga manfaat tersebut akan berpengaruh terhadap tujuan utama program CSR, yakni keberlanjutan (*sustainability*) dan pertumbuhan (*growth*).

4.2.10. Profil Program CSR PT Semen Padang

Program CSR PT Semen Padang, secara garis besar dikelompokkan ke dalam tiga program, yakni : (1) Program Basinerji Mambangun Nagari, (2) Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL), serta Program Non PKBL. Secara garis besar, ketiga kategori program CSR PT Semen Padang, dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Program Basinerji Mambangun Nagari (BMN)

Merujuk kepada *strategic flagship*, PT Semen Padang menjabarkan CSR dalam pilar-pilar program yang dilaksanakan secara sinergi bekerjasama dengan segenap pemangku kepentingan. Adapun pilar-pilar program

CSR Semen Padang meliputi (1) Campin Nagari, (2) Pandai Nagari, (3) .
Secara terperinci keempat program ini dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Program Campin Nagari

Merupakan program-program yang mendukung misi CSR Semen Padang terkait *core subject* ISO 26000 SR-Operasional yang berkeadilan, Tata Kelola dan Suara Konsumen. Beberapa program utama yang dilaksanakan melalui program Campin Nagari antara lain :

- Program pemasaran : sertifikasi pekerja konstruksi/ tukang, program perumahan yang terjangkau dan berkelanjutan, produk dan pelayanan yang berkelanjutan;
- Program penelitian dan pengembangan serta jaminan kualitas : Inovasi produk turunan semen untuk konstruksi berkelanjutan;
- Implementasi *governance*, *risk* dan *compliance* secara terpadu.

b) Program Pandai Nagari

Merupakan program yang mendukung misi CSR Semen Padang terkait *core subject* ISO 26000 SR-Ketenagakerjaan. Semen Padang Pandai Nagari memiliki beberapa program utama antara lain :

- Implementasi *Human Capital Master Plan* (HCMP) yang terdiri dari : *Leadership Development Program* (LDP), *Talent Management* (TM), *Knowledge Management* (KM), dan *Specialization*;
- Mendorong terjalinnya hubungan sosial pekerja dan dialog sosial;
- Memastikan terpenuhinya hak-hak dasar pekerja, kondisi kesejahteraan, asuransi, kesehatan dan keselamatan serta kualitas pelayanan pekerja.

c) Program Peduli Nagari

Merupakan program-program yang mendukung misi CSR Semen Padang terkait *core subject* ISO 26000 SR. Semen Padang Peduli Nagari menjadi salah satu progra pemberdayaan dan pengembangan masyarakat serta hak azasi manusia, dengan program utama antara lain :

- Lumbung Nagari ; peningkatan produktivitas peternakan, perikanan da pertanian, kemitraan untuk mitra binaan, dukungan pemasaran untuk produk mitra binaan, dan pengembangan *ecopreneurship*;
- Sehat Nagari ; perbaikan gizi ibu dan anak, revitalisasi posyandu, serta kampanye lingkungan dan perilaku hidup sehat;
- Pengembangan Pendidikan Keterampilan dan Budaya ; beasiswa berprestasi, sekolah hijau (adiwiyata), dan Loka Latihan Keterampilan (Lolapil);
- Investasi sosial terhadap pembangunan infrastruktur dan penguatan kelembagaan sosial masyarakat.

d) Program Elok Nagari

Merupakan program-program yang mendukung misi CSR Semen Padang terkait *core subject* ISO 26000 SR-Lingkungan Hidup. Beberapa program utama Semen Padang Elok Nagari antara lain :

- Pengendalian emisi;
- Pengendalian limbah cair;
- Pengelolaan limbah padat;
- Penggunaan energi terbarukan dan ramah lingkungan;
- Penggunaan teknologi ramah lingkungan dan menurunkan konsumsi energi fosil;
- Keanekaragama hayati;
- Lingkungan hijau.

b. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

Implementasi program CSR PT. Semen Padang terbagi atas 3 (tiga) kategori yaitu: Program Kemitraan (PK), Program Bina Lingkungan (BL), dan Program CSR Non-PKBL. Ketiga program tersebut diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap *para* pemangku kepentingan dalam hal memenuhi harapan masyarakat dan para pemangku kepentingan, meningkatkan pelestarian lingkungan, dan menjalankan perusahaan dengan menjunjung etika dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Adapun ketiga kategori program CSR PT Semen Padang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Kemitraan (PK)

Usaha yang dapat dibiayai dalam program kemitraan adalah usaha kecil menengah (UKM) yang produktif di semua sektor ekonomi (industri/perdagangan/pertanian/perkebunan/perikanan/jasa lainnya) dengan ketentuan :

- Memiliki kriteria sebagai usaha kecil (termasuk usaha mikro), yaitu memiliki kekayaan bersih maksimal Rp 200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1 milyar;
- Milik Warga Negara Indonesia;
- Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;
- Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha berbadan hukum, termasuk koperasi;
- Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan;
- Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun;
- Belum memenuhi persyaratan perbankan (*non bankable*).

2. Program Bina Lingkungan (BL)

Program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat sekitar mencakup :

a) Bantuan bencana alam

Program yang dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian dan untuk meringankan beban bagi korban bencana alam, antara lain bantuan kebutuhan bahan pokok (sembako), bantuan pengobatan dan tenaga medis, bantuan tenaga relawan, bantuan alat berat dan lain sebagainya.

b) Pendidikan dan pelatihan

Program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan baik keahlian, penegetahuan maupun prilaku masyarakat, antara lain bantuan biaya pendidikan/ beasiswa, Lokal Latihan Keterampilan (LOLAPIL) bagi anak putus sekolah, pengadaan, peralatan sekolah (sekolah umum, pesantren dan madrasah) penyuluhan pengetahuan kepada masyarakat, dan lain sebagainya.

c) Peningkatan kesehatan

Program yang bertujuan untuk peningkatan kesehatan masyarakat sekitas, seperti renovasi balai pengobatan masyarakat, melakukan kegiatan donor darah dan khitanan massal, pegobatan gratis dan lain sebagainya.

d) Pengembangan sarana dan prasarana umum

Program yang dijalankan dengan tujuan untuk membangun hubungan harmonis dan memberi kontribusi signifikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti rehabilitasi prasarana pendidikan, pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan sarana umum dan lain sebagainya.

e) Sarana ibadah

Program partisipasi perusahaan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama di masyarakat

yang diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan pembangunan dan perbaikan sarana ibadah, bantuan pelaksanaan kegiatan keagamaan (MTQ, pemberian hewan qurban, dll), dan kegiatan lainnya.

f) Pelestarian alam

Program disusun yang ditujukan untuk mengurangi dampak lingkungan yang timbul akibat kegiatan operasional perusahaan, mencakup kegiatan penghijauan, bantuan bibit tanaman, program untuk mengatasi perubahan iklim dan lain sebagainya.

3. Program CSR Non-PKBL

Program CSR Non-PKBL adalah program yang ke-tiga CSR PT. Semen Padang di luar Program Kemitraan (PK) dan Program Bina Lingkungan (BL). Program ini mencakup :

- a) Bantuan sosial yang ditujukan untuk mendukung kegiatan sosial masyarakat dan kegiatan keagamaan, seperti sumbangan untuk acara keagamaan, perayaan hari besar nasional, kegiatan pensiunan, dan lain-lain sebagainya;
- b) Program yang dirancang dan di eksekusi oleh perusahaan dan ditujukan untuk masyarakat umum seperti kegiatan olah raga, operasional pendidikan, seni dan budaya misalnya : kegiatan bazaar, pengembangan prestasi olah raga, pembinaan masyarakat adat, dll;
- c) Memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar untuk berkontribusi kepada perusahaan *outsourcing* pekerjaan, menjadi rekanan bisnis perusahaan;
- d) Mendukung kegiatan operasional dan pengembangan pendidikan, melalui Yayasan Igaras PT. Semen Padang termasuk memberikan kesempatan sebagai karyawan PT. Semen Padang Group bagi lulusan terbaik;
- e) Pendekatan khusus kepada masyarakat sekitar untuk wilayah-wilayah pengembangan usaha perusahaan;

- f) Melakukan penelitian/survei dalam rangka penentuan program bantuan yang diberikan.

Untuk mengantisipasi masalah yang dihadapi maupun yang akan timbul antara masyarakat dan perusahaan, maka dalam penentuan lokasi sasaran dari program CSR PT Semen Padang didasarkan kepada urutan skala prioritas.

4.2.1. Prestasi dalam Pengelolaan Program CSR

Pada tahun 2017, CSR PT Semen Padang berhasil memperoleh pengakuan di level nasional. Dalam ajang Indonesia *Corporate Social Responsibility Award* (ICA), CSR PT Semen Padang berhasil memperoleh penghargaan dalam 15 kategori. Terdapat lima program yang mendapatkan penghargaan *platinum*, yakni : (1) PKBM Integrasi di Kelurahan Batu Gadang, (2) Forum Nagari Indarung, (3) Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Delapan Asnaf melalui Unit Pengelolaan Zakat PT Semen Padang, (4) Klinik Semen Padang Peduli Sehat, serta (5) Pemberdayaan Posyandu Terintegrasi di Kelurahan Lambung Bukit.

Selanjutnya penghargaan kategori *gold* untuk 5 program, yakni : (1) Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen, (2) Pengolahan Gas Buang menjadi Energi Listrik melalui WHRPG, (3) Investasi Sosial Pemberdayaan Lumbung Keuangan Nagari, (4) Pemberdayaan Masyarakat melalui Bank Sampah Berbasis Rumah Tangga dan Komunal, serta (5) Kelompok Usaha Nagari Kelurahan Padang Besi. Sedangkan untuk penghargaan kategori *silver* diraih melalui program *Emergency Respons* Bencana Banjir melalui Pengembangan Jembatan Baringin.

Pada tahun 2018 ini, kebijakan PT Semen Padang tetap berkomitmen untuk melaksanakan program dan kegiatan untuk masyarakat yang dikelola oleh Biro CSR PT Semen Padang. Pendanaan untuk program dan kegiatan CSR ini mengacu pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) untuk tahun 2018. Program dan kegiatan CSR tahun 2018 ini merupakan kelanjutan dari program CSR tahun 2017 dengan slogan : *Basinergi Mambangun Nagari*.

4.3. Deskripsi Kelurahan Lambung Bukit

4.3.1. Kondisi Geografis dan Penggunaan Lahan

Kelurahan Lambung Bukit merupakan salah satu kelurahan dari sembilan kelurahan yang terdapat di Kecamatan Pauh, Kota Padang. Sebelumnya wilayah Kecamatan Pauh termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Padang Pariaman, namun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980, sejak tanggal 21 Maret 1980 menjadi wilayah administrasi Kota Padang, dengan ibukota kecamatan terletak di Kelurahan Cupak Tengah. Adapun luas Kelurahan Lambung Bukit adalah 38,80 km², yakni termasuk wilayah terluas dibandingkan dengan 8 kelurahan lainnya di Kecamatan Pauh. Sedangkan jarak Kelurahan Lambung Bukit ke ibukota kecamatan sekitar 2,5 km, ke ibukota Kota Padang sekitar 10 km, serta ke ibukota Propinsi Sumatera Barat sekitar 13 km. Adapun luas dan jarak kelurahan ke Ibukota (kecamatan, kota, dan propinsi) untuk Kecamatan Pauh dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Luas dan Jarak Kelurahan di Kecamatan Pauh ke Ibukota, Tahun 2018

No	Kelurahan	Luas (km ²)	Jarak ke (km)		
			Kecamatan	Kota	Propinsi
1	Pisang	3,99	3,0	7	3,0
2	Binuang Kampung Dalam	2,97	2,0	9	5,0
3	Piai Tengah	4,97	1,5	10	4,0
4	Cupak Tengah	2,99	0,8	9	7,0
5	Kapalo Koto	35,83	1,0	9	7,5
6	Koto Luar	18,92	2,5	11	12,0
7	Lambung Bukit	38,80	2,5	10	13,0
8	Limau Manis Selatan	12,96	4,0	14	13,0
9	Limau Manis	24,86	2,0	10	20,0
	Luas Kecamatan Pauh	146,29			

Sumber Data : Pauh dalam Angka, 2014.

Adapun kelurahan yang didominasi jenis penggunaan lahannya dengan hutan lindung itu adalah Kelurahan Lambung Bukit. Topografi wilayahnya cenderung berbukit dengan aliran Batang Gunung Nago yang membelah kawasan kelurahan mulai dari hulu sungai di Kampung Batu Busuk sampai ke hilir kawasan kelurahan di Kampung Pinang. Areal perbukitan yang melingkupi kawasan Kelurahan Lambung Bukit menyimpan ancaman bahaya bencana alam longsor apabila lingkungan

sekitarnya tidak dikelola dengan baik. Kelurahan Lambung Bukit sudah beberapa kali mengalami bencana alam berupa banjir dan longsor. Bencana banjir terakhir yang terjadi adalah sekitar tahun 2016 lalu yang mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi masyarakat.

Area hutan lindung dan hutan rakyat mendominasi kawasan di Kecamatan Pauh, yang meliputi 82% dari total luas wilayah kecamatan. Sedangkan sisanya sejumlah 18% berupa areal persawahan, kebun, dan ladang. Adapun perincian penggunaan lahan di Kecamatan Pauh, dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jenis Penggunaan Lahan di Kecamatan Pauh, Tahun 2018

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1	Hutan lindung	10.103
2	Hutan rakyat	1.895
3	Sawah	1.095
4	Tegalan atau kebun	488
5	Pekarangan	224
6	Ladang atau huma	219
7	Lain-lain	605
	Total	

Sumber Data : Pauh dalam Angka, 2014.

Namun seiring dengan kemajuan zaman, bentang alam Kelurahan Lambung Bukit yang mayoritas berupa hutan dan areal persawahan, secara perlahan mulai berkurang akibat eksploitasi sumberdaya alam yang dilakukan atas nama pembangunan. Saat ini sedang dilakukan pembangunan jalan dan juga perumahan di beberapa lokasi di Kelurahan Lambung Bukit, khususnya di Kampung Batu Busuk, Kampung Sungkai dan Kampung Pinang. Pembukaan jalan baru akan memudahkan akses transportasi sehingga akan mengundang investor dan orang luar untuk membeli lahan dan menggunakannya untuk berbagai kepentingan.

Kekayaan sumberdaya alam yang dimiliki Kelurahan Lambung Bukit sepatutnya dijaga kelestariannya dari upaya eksploitasi mengingat bentang alam yang rawan dengan terjadinya berbagai bencana alam. Untuk itu, masyarakat telah berusaha mengelola berbagai potensi sumberdaya alam yang ada sebagai sumber mata pencaharian masyarakat.

Adapun bentang alam Kelurahan Lambung Bukit, dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar. 3. Bentang Alam Kelurahan Lambung Bukit



Upaya pengelolaan potensi sumberdaya alam yang ada di Kelurahan Lambung Bukit, baik di sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan rakyat, kehutanan rakyat, usaha mikro, maupun jasa sudah dilakukan atas inisiatif masyarakat dan melalui kerjasama dengan multi pihak. Beberapa aktifitas sumber mata pencaharian warga masyarakat di Kelurahan Lambung Bukit, sebagaimana terlihat pada Gambar berikut.

Gambar. 4. Ketersediaan dan Kondisi Sumber Mata Pencaharian Masyarakat



	
<p>Kondisi usaha peternakan dan pertanian di Kelompok UPPO Kampung Sungkai</p>	<p>Usaha mikro pengolahan dan pemasaran lele kering (lekker) oleh ibu ibu Kampung Pinang yang didampingi PKPU HI dan IZI</p>

4.3.2. Kondisi Demografis dan Sumberdaya Manusia

Secara demografi, jumlah penduduk Kelurahan Lambung Bukit menurut data tahun 2013 berjumlah 3.439 jiwa dengan proporsi sejumlah 1.730 jiwa laki laki dan sejumlah 1.709 jiwa perempuan. Apabila dibandingkan dengan 8 kelurahan, maka jumlah penduduk Kelurahan Lambung Bukit termasuk paling rendah. Secara terperinci, jumlah penduduk di Kecamatan Pauh, dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Kecamatan Pauh per Kelurahan, Tahun 2013

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Proporsi Jenis Kelamin	
			Laki Laki	Perempuan
1	Pisang	8.061	4.306	4.295
2	Binuang Kampung Dalam	6.121	3.174	2.947
3	Piai Tengah	3.989	2.054	1.935
4	Cupak Tengah	9.300	4.453	4.847
5	Kapalo Koto	8.268	4.372	3.914
6	Koto Luar	7.889	3.877	4.012
7	Lambung Bukit	3.439	1.730	1.709
8	Limau Manis Selatan	9.970	5.127	4.843
9	Limau Manis	7.268	3.620	3.648
	Luas Kecamatan Pauh	64.863	32.713	32.150

Sumber Data : Pauh dalam Angka, 2014.

Kelurahan Lambung Bukit merupakan salah satu kelurahan yang mempunyai jumlah KK miskin tertinggi di Kecamatan Pauh dan Kota Padang. Data tahun 2015 menunjukkan bahwa penduduk di Kelurahan Lambung Bukit berjumlah 3.554 jiwa

dengan Rumah Tangga Miskin berjumlah 347 KK. Walaupun angka kemiskinan rumah tangga masih tinggi, ada kecenderungan terjadi penurunan setiap tahun.

Penyebab masih tingginya angka rumahtangga miskin, disebabkan karena : (a) masih ada wilayah yang cukup terisolasi dari akses jalan dan listrik sehingga menyulitkan warga untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Kondisi ini terdapat di beberapa RT di Kampung Batu Busuk dan di Kampung Sungkai; (b) budaya masyarakat yang cenderung pasrah, malas, dan tergantung kepada bantuan dari pihak luar, khususnya pemerintah sehingga dorongan dari dalam diri untuk meningkatkan taraf hidup masih rendah; serta (c) secara struktural, program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang dilakukan berbagai pihak belum terintegrasi sehingga program dan kegiatan pengentasan kemiskinan belum mampu menyelesaikan akar penyebab kemiskinan dan belum mampu menawarkan solusi yang efisien dan efektif.

4.3.3. Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana Pendukung

Bahasan mengenai sarana dan prasarana pendukung bagi aktifitas masyarakat di Kelurahan Lambung Bukit, akan dijelaskan ketersediaan dan kondisi sarana pendidikan, kesehatan/lingkungan, budaya, dan ekonomi. *Pertama*, sarana pendidikan yang tersedia untuk di akses warga masyarakat di Kelurahan Lambung Bukit ketersediaannya relatif kurang apabila dibandingkan dengan 8 kelurahan lainnya di Kecamatan Pauh. Data pada Tabel 4 dan 5 dapat menjelaskan kondisi ketersediaan sarana pendidikan.

Tabel 4. Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Pauh, Tahun 2013

No	Kelurahan	TK	SD	SLTP	SLTA	PT
1	Pisang	3	4	-	-	-
2	Binuang Kampung Dalam	-	4	2	-	-
3	Piai Tengah	-	2	-	-	-
4	Cupak Tengah	2	1	-	1	-
5	Kapalo Koto	2	3	1	1	-
6	Koto Luar	2	3	2	-	-
7	Lambung Bukit	0	2	1	-	-
8	Limau Manis Selatan	5	3	1	1	-
9	Limau Manis	1	3	-	1	1
	Jumlah di Kecamatan Pauh	15	26	7	4	1

Sumber Data : Pauh dalam Angka, 2014.

Tabel 5. Jumlah Sarana Pendidikan di Kelurahan Lambung Bukit, Tahun 2018

No	Sarana Pendidikan	Jumlah	Lokasi	Kondisi
1	PAUD	2	Lambung Bukit Batu Busuk	Baik
2	TK	0	-	-
3	SD	2	Batu Busuk, Lambung Bukit	Baik
4	MTSS	1	Batu Busuk	Baik
4	Rumah Pintar	1	Sungkai	Baik
5	Sanggar Belajar	2	Sungkai, Batu Busuk	Baik
6	Pustaka/Taman Bacaan	2	Sungkai	Baik

Walaupun ketersediaan sarana pendidikan yang berkualitas relatif kurang di Kelurahan Lambung Bukit, namun melalui Program CSR PT Semen Padang telah dilakukan beberapa program di bidang pendidikan. Selain dalam bentuk kegiatan fisik (rehabilitasi sekolah), juga dilakukan berbagai kegiatan non-fisik, seperti pengadaan buku, lomba-lomba, beasiswa, dan lain-lain. Untuk PAUD, terdapat PAUD Melati II dan PAUD Bustanul Ulum. Untuk SD, ada SD Negeri 10 Padang dan SD Bustanul Ulum. Bahkan SD Bustanul Ulum di Kampung Batu Busuk termasuk sekolah yang memperoleh beragam prestasi untuk tingkat kecamatan dan tingkat Kota Padang. Untuk jenjang pendidikan menengah pertama, terdapat juga Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTSS). Selain itu melalui program CSR Bank Nagari juga sudah dibangun Rumah Pintar yang difasilitasi oleh Komunitas Sahabat Nagari yang berlokasi di Kampung Sungkai. Sedangkan sebagai wujud program pengabdian berkelanjutan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Andalas, sejak tahun 2016 sudah diinisiasi wadah sanggar belajar dan pustaka bekerjasama dengan Kelompok Tani di Kampung Sungkai.

Untuk memperoleh akses pendidikan ke jenjang SLTP dan SLTA, warga tidak kesulitan karena di di kelurahan sekitarnya relatif tersedia dengan jumlah yang memadai. Namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan di bidang pendidikan di Kelurahan Lambung Bukit, yakni : (a) angka putus sekolah yang cukup tinggi karena budaya masyarakat sehingga menyimpan potensi kerawanan sosial; (b) ketidakmampuan untuk mengakses jenjang pendidikan tinggi sehingga potensi pengangguran siswa tamatan SLTA cukup tinggi. Data bulan September 2018 dari Forum Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lambung Bukit,

menunjukkan bahwa dari sejumlah tamatan SLTA tahun 2018, hanya satu orang yang diterima kuliah di Universitas Andalas; serta (c) program dan kegiatan di bidang pendidikan yang dilakukan pihak terkait masih berjalan sendiri-sendiri dan belum terintegrasi sehingga nilai manfaat dan dampaknya belum optimal.

Adapun dokumentasi beberapa layanan serta kegiatan di bidang pendidikan di Kelurahan Lambung Bukit, dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar 5. Dokumentasi Layanan dan Kegiatan di Bidang Pendidikan di Kampung Sungkai Kelurahan Lambung Bukit



Kedua, Sarana Kesehatan dan Lingkungan; di Kelurahan Lambung Bukit untuk sarana kesehatan relatif cukup tersedia dan bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mendapatkan layanan di setiap kampung. Sementara berbagai program dan kegiatan terkait dengan kesehatan dan lingkungan juga dilaksanakan oleh instansi pemerintah terkait dan juga oleh pihak PT Semen Padang melalui program CSR. Walaupun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan di bidang ini, yakni : (a) masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan sehingga

bisa berdampak pada rentannya terjadi gangguan kesehatan dan penyakit; (b) masih belum terintegrasinya berbagai program layanan kesehatan dan lingkungan oleh pihak terkait sehingga belum efisien dan efektif. Adapun sarana kesehatan dan lingkungan yang tersedia di Kelurahan Lambung Bukit, dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Ketersediaan dan Kondisi Sarana Kesehatan dan Lingkungan di Kelurahan Lambung Bukit, Tahun 2018

No	Jenis Sarana dan Layanan	Jumlah	Kondisi
1	Posyandu	3	Baik
2	Puskesmas Pembantu	1	Baik
3	Perawat/Bidan	4	Baik

Ketiga, Sarana Perekonomian (Pertanian, Perikanan, Peternakan); merupakan faktor yang penting bagi peningkatan taraf kehidupan masyarakat di Kelurahan Lambung Bukit. Mayoritas mata pencaharian masyarakat Kelurahan Lambung Bukit bergerak di sektor pertanian dan jasa/perdagangan. Sub-sektor pertanian yang potensial dan diusahakan oleh masyarakat adalah tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan rakyat, perikanan darat, peternakan rakyat. Sedangkan sektor jasa/perdagangan masih didominasi oleh warung kelontong/jualan. Untuk mendukung permodalan usaha, juga terdapat berbagai lembaga yang memberikan jasa pinjaman mikro. Sementara untuk usaha pengolahan hasil pertanian masih relatif kurang tersedia. Selain itu juga terdapat berbagai fasilitas untuk wisata edukasi dan ekowisata. Adapun ketersediaan berbagai sarana perekonomian yang bisa di akses masyarakat di Kelurahan Lambung Bukit, dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 7. Ketersediaan dan Kondisi Lembaga Perekonomian dan Wisata di Kelurahan Lambung Bukit, Tahun 2018

No	Jenis Sarana dan Layanan	Jumlah	Kondisi
1	Kelompok Tani	3	Aktif
2	KJKS-BMT	1	Aktif
3	LKN	1	Aktif
4	Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO)	1	Aktif
5	Villa (Kampung Inggris)	1	Aktif
6	Destinasi wisata alam dan pendidikan	-	Aktif
7	Pabrik air mineral "ayia"	1	Aktif

Gambar 6. Dokumentasi Layanan dan kegiatan di Bidang Ekonomi dan Wisata di Kelurahan Lambung Bukit

	
<p>Pendidikan untuk petani dan mahasiswa tentang pertanian organik</p>	<p>Lorent la Villa (Kampung Inggris) dan wisata edukasi</p>
	
<p>Balai Pertemuan Petani</p>	<p>Pabrik air mineral AYIA</p>
	
<p>Pemandian alam di Kampung Batu Busuak</p>	<p>Pertemuan komunitas penggerak wisata kelurahan lambung Bukit</p>
	
<p>Wisata tubing menyusuri aliran sungai di Kelurahan Lambung Bukit</p>	<p>Kegiatan kelompok sadar wisata Kampung Pinang</p>

Upaya untuk mengembangkan usaha masyarakat sudah dilakukan oleh berbagai pihak, namun belum memberikan manfaat dan dampak positif untuk peningkatan taraf kehidupan masyarakat di Kelurahan Lambung Bukit. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yakni : (a) Masih rendahnya inisiatif keswadayaan dari masyarakat sehingga sangat tergantung dengan bantuan (khususnya finansial) dari pihak terkait; (b) kelompok tani belum terorganisir dengan baik sehingga kurang bermanfaat untuk petani; (c) lembaga/organisasi yang melayani perekonomian masyarakat masih bergerak sendiri-sendiri dan belum terintegrasi sehingga nilai manfaatnya masih rendah.

Keempat, Kondisi dan Ketersediaan Prasarana Pendukung. Akses ke setiap kampung sudah bisa ditempuh dengan kendaraan roda dua maupun roda empat. Namun kondisi jalan raya pada beberapa tempat sudah berlobang dan cukup membahayakan para pengendara, seperti jalan di Kampung Pinang. Terdapat dua jembatan yakni dari arah Kelurahan Kapalo Koto menuju Kelurahan Lambung Bukit yang kondisinya belum permanen, serta jembatan menuju Kampung Batu Busuk yang baru dibangun setelah banjir bandang tahun 2017 lalu. Sedangkan irigasi Gunung Nago beserta irigasi sekunder dan tersier cukup memenuhi kebutuhan pengairan untuk kebutuhan usaha tani. Sementara listrik dan air bersih cukup tersedia, namun di Kampung Sungkai sampai saat ini belum dialiri listrik. Kedepan seiring dengan pelebaran jalan ke Kampung Batu Busuk, maka pemerintah pun akan mengadakan listrik. Adapun ketersediaan dan kondisi sarana prasarana pendukung di Kelurahan Lambung Bukit dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar 7. Dokumentasi Kondisi Prasarana Pendukung di Kelurahan Lambung Bukit





4.3.4. Kelembagaan Penunjang Lainnya

Lembaga penunjang yang penting untuk peningkatan taraf kehidupan masyarakat di Kelurahan Lambung Bukit adalah lembaga sosial budaya. Lembaga ini dapat menjadi kekuatan bagi masyarakat untuk membangun keswadayaan. Adapun ketersediaan dan kondisi dari lembaga sosial budaya di Kelurahan Lambung Bukit dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 8. Ketersediaan dan Kondisi Lembaga Sosial Budaya di Kelurahan Lambung Bukit, Tahun 2018

No	Jenis Kelembagaan Penunjang	Jumlah	Kondisi
1	Bundo Kanduang	1	Aktif
2	PKK	3	Aktif
3	Kelompok Pemuda	3	Aktif
4	Majelis Taklim	5	Aktif
5	Sangat Seni	3	Aktif
6	Komunitas Penggerak Wisata	1	Aktif
7	Kelompok Sadar Wisata	3	Aktif

Berdasarkan uraian mengenai Deskripsi Kelurahan Lambung Bukit, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa Kelurahan Lambung Bukit mempunyai potensi untuk berkembang, baik dari sisi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya sosial, sumberdaya ekonomi, maupun kelembagaan. Namun potensi yang ada belum optimal dikelola oleh masyarakat sehingga masih terdapat beragam permasalahan yang menyulitkan masyarakat untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Selain aspek internal tersebut, juga terdapat tantangan/ancaman secara eksternal, baik dari sisi faktor alam maupun intervensi multi pihak. Adapun ringkasan deskripsi potensi dan permasalahan yang dimiliki/dihadapi oleh masyarakat Lambung Bukit, dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 9. Ringkasan Profil Kelurahan Lambung Bukit, Tahun 2018

No	Aspek yang Dideskripsikan	Potensi + Peluang	Permasalahan + Tantangan
1	Kondisi geografis dan sumberdaya alam	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bentang alam yang indah dengan kekayaan sumberdaya alam (hutan, sungai, bukit, sawah, ladang, kolam, dll) ▪ Adanya beragam mata pencaharian masyarakat dalam memanfaatkan potensi sumberdaya alam 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rawan bencana alam (banjir, longsor) ▪ Letak kampung yang cukup terisolir
2	Kondisi demografis dan SDM	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya anak muda terdidik yang kreatif dan inovatif untuk mengelola potensi sumberdaya lokal 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih rendah ▪ Masih tingginya ketergantungan pada pihak luar ▪ Kesulitan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi
3	Kondisi sarana dan prasarana pendukung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Antar kampung sudah dihubungkan dengan fasilitas jalan dan jembatan yang memadai ▪ Adanya aset PLTA PT Semen Padang sebagai potensi wisata (ekologi, sejarah, dan edukasi) ▪ Adanya bendungan irigasi yang memadai untuk mendukung mata pencaharian masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya kondisi jalan antar kampung yang masih jalan tanah dan rusak ▪ Prasarana listrik belum ada di Kampung Sungkai sehingga menghambat aktifitas masyarakat

4	Kondisi kelembagaan lokal terkait ekonomi dan wisata	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya lembaga lokal yang sudah terorganisir cukup baik dalam mengelola program pemberdayaan ekonomi ▪ Adanya bisnis air yang dilakukan oleh korporasi (air mineral dengan merek Ayia) ▪ Adanya lembaga lokal yang cukup terorganisir dalam menggerakkan potensi wisata 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya konflik kepentingan antar lembaga yang ada di tingkat lokal dalam berebut pengaruh ▪ Lembaga yang dibentuk pemerintah kurang aktif ▪ Usaha ekonomi produktif terkait pengolahan sumberdaya lokal masih terbatas ▪ Belum ada event wisata yang berkala ▪ Pembangunan prasarana jalan yang cukup masif rawan secara ekologi dan alih fungsi lahan
5	Kondisi kelembagaan penunjang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya lembaga lokal yang cukup terorganisasi untuk kegiatan sosial dan budaya ▪ Masih kuatnya jiwa gotong royong masyarakat (arisan, julo-julo, dan kongsi) ▪ Banyaknya kepedulian pihak terkait untuk berperan dalam pemberdayaan masyarakat ▪ Adanya program CSR PT Semen Padang dengan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelembagaan sosial budaya belum diorganisir secara optimal sebagai potensi wisata ▪ Nilai manfaat dan keberlanjutan program multi pihak masih rendah ▪ Kolaborasi multi pihak dalam menjalankan program pemberdayaan secara terintegrasi masih terbatas

Walaupun secara internal terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat serta secara eksternal juga terdapat tantangan/ancaman terhadap upaya peningkatan taraf kehidupan masyarakat di Kelurahan Lambung Bukit, namun masih terdapat juga beragam potensi yang bisa dioptimalkan serta peluang yang bisa dikelola dari berbagai program dan kegiatan multi pihak, termasuk kontribusi PT Semen Padang melalui program CSR bagi masyarakat di Kelurahan Lambung Bukit. Selanjutnya, secara spesifik akan dideskripsikan kontribusi PT Semen Padang melalui program CSR di Kelurahan Lambung Bukit.

4.4. Deskripsi Profil dan Sejarah Keberadaan CSR PT Semen Padang di Kelurahan Lambung Bukit

Kelurahan Lambung memiliki sejarah yang panjang dengan keberadaan PT Semen Padang. Pasokan air untuk kebutuhan pembangkit tenaga listrik atau PLTA

bagi PT Semen Padang sejak berdiri lebih dari seratus tahun yang lalu, bersumber dari sungai yang ada di kawasan Kelurahan Lambung Bukit. Berawal dari daerah Patamuan, salah satu kawasan paling hilir dari Kelurahan Lambung Bukit, air dialirkan melalui bangunan irigasi yang di bangun sejak masa penjajahan Belanda dahulu, melewati berbukitan dan jurang yang cukup dalam di Kampung Batu Batu Busuk di Kelurahan Lambung Bukit. Situs bangunan irigasi yang kokoh dan indah itu, beserta bangunannya sampai saat ini masih ada dan berdiri kokoh sebagai kekayaan sejarah masa lalu. Berbagai situs ini menyimpan potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata, apabila dikelola dengan baik yang dilengkapi dengan informasi sejarahnya. Adapun beberapa dokumentasi tentang situs ini dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar 8. Dokumentasi Situs Sejarah Bangunan PLTA PT Semen Padang di Kampung Batu Busuk Kelurahan Lambung Bukit



Pentingnya keberadaan Kelurahan Lambung Bukit dalam menyediakan pasokan air untuk kebutuhan pembangkit tenaga listrik atau PLTA bagi PT Semen Padang sejak awal berdiri itulah yang mendasari, sehingga Kelurahan Lambung Bukit termasuk kawasan prioritas (ring-1) untuk program CSR PT Semen Padang, walaupun saat ini pembangkit tenaga listrik tersebut sudah tidak berfungsi. Tidak berfungsinya pembangkit tenaga listrik tersebut bukan disebabkan tidak adanya pasokan air yang tersedia, melainkan karena peralatan pembangkit itu yang sudah rusak dan membutuhkan perbaikan yang serius, sementara PT Semen Padang tidak mampu untuk melakukannya.

Sejak awal berdirinya, berbagai program dan kegiatan telah dilakukan PT Semen Padang untuk memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat yang ada di Kelurahan Lambung Bukit, khususnya di Kampung Batu Busuk. Sebagai sebuah perusahaan yang mempunyai tujuan bisnis, tentu PT Semen Padang berharap agar bisnisnya berjalan lancar, terutama terkait kebutuhan vital dan strategis, yakni pasokan energi listrik untuk kebutuhan aktifitas bisnis (produksi, pengolahan, sampai menghasilkan semen). Selain itu juga untuk penerangan/listrik.

BAB 5

PROFIL PENGELOLAAN PROGRAM CSR PT SEMEN PADANG DI KELURAHAN LAMBUNG BUKIT

5.1. Pengantar

Pada bagian ini akan dikupas secara mendalam mengenai profil pengelolaan program CSR PT Semen Padang di Kelurahan Lambung Bukit. Fokus bahasan dibatasi pada periode waktu 2015 sampai dengan tahun 2018 dimana program CSR yang dilakukan sudah menggunakan pendekatan yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Selama rentang waktu 2015-2019, program CSR PT Semen Padang diberi tajuk “Basinerji Mambangun Nagari” (CSR BMN). Uraian pada bagian ini mencakup tahapan dalam pengelolaan program, yakni : *Pertama*, Tahap Persiapan Program CSR BMN, dengan kegiatan : (a) Evaluasi, (b) Penyusunan Roadmap, (c) Penataan Organisasi, (d) Rekrutmen Tim Pendamping, dan (e) Penentuan Kelurahan Sasaran. *Kedua*, Tahap Perencanaan Program CSR BMN, dengan kegiatan : (a) Rekrutmen Mitra Lokal, (b) Pemeriksaan Ulang Kelurahan Sasaran, (c) Sosialisasi dan Penilaian Persepsi, (d) Pemetaan Swadaya (Pemetaan Sosial), (e) Penyusunan Rencana Aksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, (f) Penyusunan Rencana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat. *Ketiga*, Tahap Pelaksanaan Program CSR BMN, dengan kegiatan: (a) Pengorganisasian Komunitas Sasaran, (b) Pelaksanaan Program Bidang Ekonomi, (c) Pelaksanaan Program Bidang Pendidikan, (d) Pelaksanaan Program Bidang Kesehatan, (e) Pelaksanaan Program Bidang Sosial Budaya dan Keagamaan, serta (e) Pelaksanaan Program Bidang Lingkungan dan Infrastruktur. *Keempat*, Tahap Monitoring, Evaluasi dan *Exit Strategy* Program CSR BMN. Dinamika pengelolaan program CSR BMN akan diuraikan pada bagian berikut.

5.2. Tahap Persiapan Program CSR Basinerji Mambangun Nagari

Tahap persiapan CSR BMN merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan sebelum program direncanakan bersama komunitas di kelurahan sasaran. Untuk tahap ini pelaksanaannya masih berada di PT Semen Padang dan belum melibatkan

komunitas sasaran program. Adapun tahap ini meliputi 4 (empat) kegiatan, yakni : (1) evaluasi, (2) penyusunan roadmap, (3) rekrutmen pendamping, serta (4) penentuan kelurahan sasaran. Tahap persiapan ini dilakukan sepenuhnya oleh pihak CSR PT Semen Padang. Secara terperinci mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan, dapat dijelaskan pada bagian berikut.

1) Evaluasi

Kegiatan ini dilakukan dalam upaya mengevaluasi program CSR yang telah dilakukan selama ini oleh perusahaan selama beberapa tahun. Program CSR PT Semen Padang dilakukan selama ini berdasarkan usulan individu, kelompok, dan kelurahan serta nagari. Usulan-usulan tersebut selanjutnya dipertimbangkan untuk didanai sesuai dengan permintaan, baik mencakup bidang fisik (pembangunan prasarana dan sarana), serta permodalan usaha untuk Usaha Mikro/Kecil/Menengah.

Pada akhir tahun 2014, pimpinan PT Semen Padang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pencapaian program sebelum adanya kebijakan CSR dan program CSR yang sudah dilakukan. Dari hasil evaluasi internal yang melibatkan konsultan independen, diperoleh kesimpulan bahwa program CSR yang dilakukan selama ini cenderung belum memberikan manfaat dan dampak kemandirian dan keberlanjutan bagi komunitas dan masyarakat.

Dalam pemaparan Direktur Utama PT Semen Padang pada tahun 2016 dalam sebuah acara Lokakarya Multi Pihak yang diadakan di Pusat Alih Teknologi-Pengembangan Kawasan Pertanian (PAT-PKP) Universitas Andalas, di Alahan Panjang, pencapaian manfaat program CSR PT Semen Padang dalam konteks kemandirian dan keberlanjutan komunitas dan masyarakat yang menjadi sasaran program, pencapaiannya baru pada kisaran persentase 60%.

Atas hasil kajian dan rekomendasi dari konsultan independen tersebut, maka pada tahun 2015, manajemen PT Semen Padang melakukan perubahan konsep dan pendekatan dalam program CSR.

Sejak tahun 2015 dilakukan perubahan paradigma pengelolaan CSR PT Semen Padang dengan tajuk CSR BMN.

2) Penyusunan Roadmap

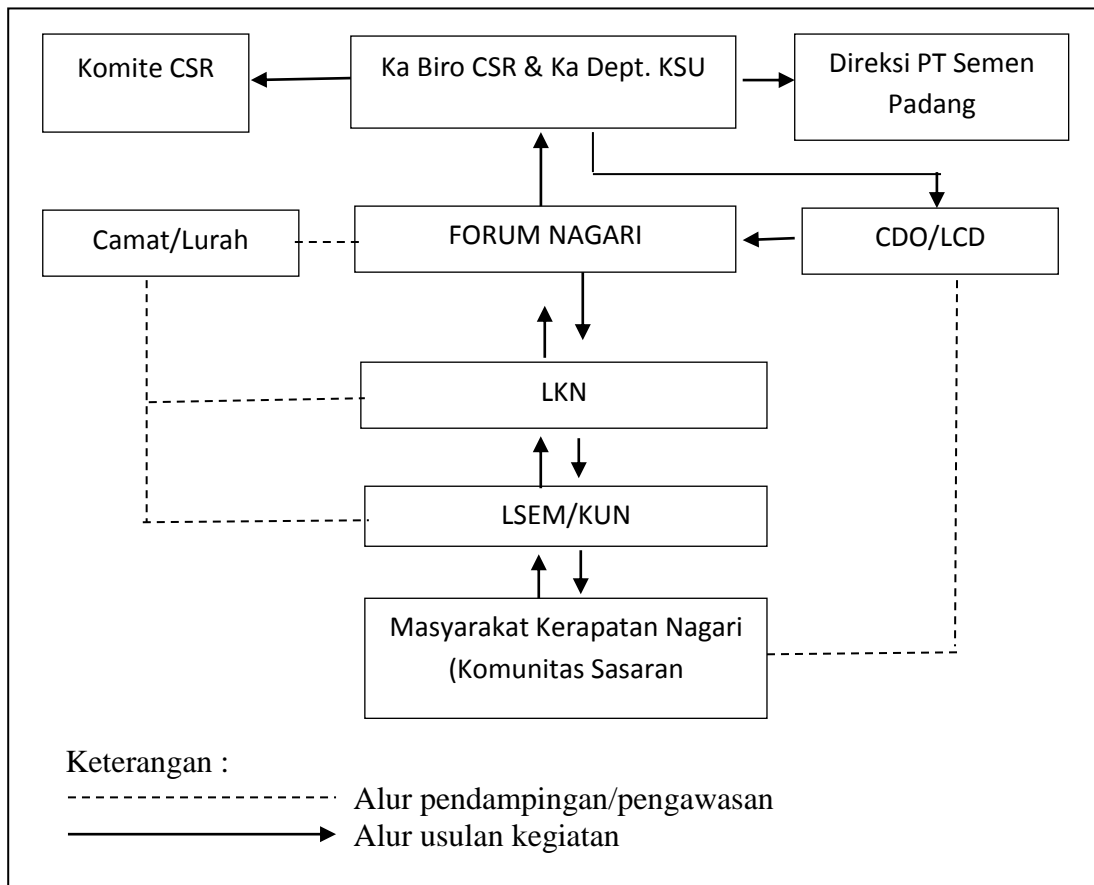
Roadmap atau peta jalan CSR merupakan salah satu dokumen perencanaan strategis yang akan memandu organisasi agar sebuah program bisa mencapai tujuan yang optimal. Dokumen *roadmap* ini dihasilkan sebagai tindak lanjut dari kegiatan evaluasi sebelumnya. Dokumen ini merupakan rencana rinci yang memuat tahapan sistematis mengenai pelaksanaan suatu program dan kegiatan dalam kurun waktu tertentu. Untuk program CSR yang akan direncanakan untuk beberapa tahun ke depan, maka PT Semen Padang melakukan kegiatan penyusunan dokumen *roadmap* untuk perencanaan program CSR. Penyusunan dokumen ini dilakukan pada tahun 2015 dengan memanfaatkan jasa konsultan pemberdayaan masyarakat. Keluaran dari kegiatan ini adalah dihasilkannya dokumen *roadmap* CSR PT Semen Padang untuk selama periode waktu 2015-2019. Dokumen *roadmap* atau panduan umum CSR ini dijabarkan dalam dokumen teknis memuat panduan teknis (SOP) penyelenggaraan program CSR PT Semen Padang dengan judul program CSR Basinergi Mambangun Nagari. Roadmap ini sudah dibuat dengan baik dan lengkap.

3) Penataan Organisasi

Untuk mengoperasikan *roadmap* yang sudah dirancang, maka pihak manajemen PT Semen Padang melakukan re-organisasi pengelolaan CSR. Struktur pengelolaan CSR di formulasi ulang, dimana di internal PT Semen Padang, terdiri dari : (1) Direksi PT Semen Padang, (2) Kepala Biro CSR dan Kepala Departemen KSU, serta (3) Komite CSR. Selanjutnya di eksternal PT Semen Padang melibatkan partisipasi : (1) Pemerintah Daerah, (2) Camat/Lurah, (3) Lembaga Mitra, (4) *Technical Assistance*, (5) CDO dan LCO, (6)

Forum Nagari/Forum PMK, (7) LBD, (8) LKN, (9) LSEM, (10) KUN, serta (11) Komunitas Sasaran. Struktur dan mekanisme kerja CSR BMN sudah disusun dengan baik dan lengkap. Adapun struktur dari program CSR BMN dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar 9. Skema Struktur dan Mekanisme Kerja CSR BMN



4) Rekrutmen Tim Pendamping

Dalam program CSR Basinergi Mambangun Nagari, pihak CSR PT Semen Padang memandang penting adanya peran pendamping agar program berjalan dengan optimal sesuai dengan pedoman yang sudah disusun. Sebagai implementasi awal dari dokumen *roadmap*, maka pihak CSR PT Semen Padang melakukan rekrutmen tim pendamping yang terdiri dari dua posisi, yakni :

a) ***Community Development Officer*** (CDO)

Merupakan Penanggung Jawab Kegiatan Pendampingan (PJKP) di bawah supervisi Kepala Bidang dan Kepala Biro CSR PT Semen Padang yang bertindak sebagai Penanggung Jawab Teknik (PJT). Tugas CDO terdiri dari :

- Secara umum bertanggung jawab kepada Kepala Biro CSR dan secara khusus kepada Kabid-Kabid CSR sesuai dengan bidang yang ditangani, yang terdiri dari : administrasi, keuangan, sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi serta pelaporan;
- Bertindak sebagai anggota pembina/pengawas Forum Nagari/Forum PMK;
- Melakukan supervisi terhadap Rencana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat/RKPM (tingkat kelurahan dan kecamatan) sesuai Rencana Aksi Komunitas (CAP) dan perubahannya yang diusulkan oleh Forum Nagari/Forum PMK;
- Memfasilitasi pencairan dana CSR BMN ke Lumbung Keuangan Nagari (LKN) dan Forum Nagari/Forum PMK sesuai *invoice* yang sudah disetujui Penanggung Jawab Teknis (PJT) dan Penanggung Jawab Kebijakan (PJK) Manajemen PT Semen Padang ke Bank Mediasi LKN dan Forum Nagari/Forum PMK tingkat Kecamatan;
- Bersama LCO melakukan pendampingan kegiatan Forum Nagari/Forum PMK, Lembaga Sosial Ekonomi Masyarakat (LSEM), LKN, Kelompok Usaha Nagari (KUN), khususnya untuk program unggulan;
- Bersama LCO dan Forum Nagari/Forum PMK mengembangkan roadmap *Local Business Development/CBD* dan klaster ekonomi antar Forum Nagari/Forum PMK;

- Bersama LCO dan Forum Nagari/Forum PM Tingkat Kecamatan mengembangkan buletin “Basinergi Mambangun Nagari”, demplot BMN, Rumah Dagang BMN, Klinik BMN, madrasah/surau BMN, dll;
- Bersama PJT memfasilitasi pengembangan kerjasama kemitraan antara Forum Nagari/Forum PMK dengan Komite CSR dan para pemangku kepentingan lainnya;
- Melakukan kunjungan lapangan dan mengevaluasi secara berkala pencapaian sasaran-sasaran utama program BMN, baik dari segi kelembagaan, keuangan, dan implementasi program (Campin Nagari, Pandai Nagari, Peduli Nagari, dan Elok Nagari);
- Bersama PJT dan Forum Nagari/Forum PM mengembangkan sistem penghargaan Basinergi Mambangun Nagari Award maupun sanksi dalam pelaksanaan dan pengawasan kerja LCO, LKN, KUM, dan implementasi program termasuk pencapaian hasil CID berdasarkan indikator Proper;
- Dibawah supervisi PJT, membantu pelaksanaan Temu Komite CSR Basinergi Mambangun Nagari;
- Melakukan penilaian kinerja Forum Nagari Forum Nagari/ Forum PM, LKN, LSEM, KUN, dan LCO yang dilakukan setiap enam bulan sekali;
- Mendampingi PJT mengikuti kegiatan koordinasi, konsultasi, dan kunjungan supervisi lapangan;
- Dibawah supervisi PJT, memfasilitasi kegiatan: (a) pemetaan swadaya/pemetaan sosial, (b) technical assistance, (c) pelatihan-pelatihan, (d) audit, (e) magang, (f) pendampingan LCO/Forum Nagari/Forum PMK/ LSEM/KAN/KUN, serta (g) kegiatan lainnya;
- Memfasilitasi penyediaan brosur, leaflet, poster, serta papan informasi yang terkait dengan program BMN;

- Supervisi dan asistensi *time sheet*, serta laporan kegiatan LCO;
- Membantu tugas-tugas lain yang ditugaskan PJT.

b) *Local Community Organizer* (LCO)

Merupakan pekerja sosial-tenaga pendamping masyarakat program BMN di tingkat kelurahan dan kecamatan. Pendampingan diberikan kepada LKN, LSEM, KUN, dan penerima manfaat program dan pelaksanaan empat pilar program BMN, yang mempunyai misi :

- Meningkatkan peran serta aktif masyarakat secara kelompok maupun perorangan;
- Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dan sistem kelembagaan/kelompok setempat;
- Membangun solidaritas sosial sesama komunitas dalam setiap penyelenggaraan program BMN.

LCO dipekerjakan secara sukarela yang berasal dari penduduk kelurahan dan/atau dari kecamatan dalam melaksanakan tugas pendampingan, LCO mempunyai latar belakang pekerja sosial dan memiliki kemampuan melaksanakan peran fasilitatif, kependidikan, keperwakilan, dan peran-peran teknis dalam pelaksanaan program BMN.

Fungsi dan tugas LCO adalah :

- **Dalam proses persiapan/penumbuhan**, LCO punya peran khusus sebagai berikut :
 - Melakukan pemeriksaan ulang kondisi dan profil kelurahan bersama aparat kelurahan;
 - Bersama Lurah dan Rukun Tetangga melakukan sosialisasi program BMN secara terus-menerus;
 - Melaksanakan pemetaan ulang swadaya;
 - Bersama Lurah dan Forum Nagari/Forum PMK menyelenggarakan kegiatan musyawarah nagari

untuk menyusun dan menetapkan peserta program BMN (peserta dapat berubah sesuai dengan perkembangan status komunitas sasaran, Rencana Aksi Pemberdayaan Masyarakat/CAP lima tahunan dan program tahunan Rencana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat/RKPM);

- Bersama LKN dan Forum Nagari/Forum PMK mengorganisir komunitas sasaran yang bergabung dalam kelompok, baik untuk kelompok usaha, non usaha, dan kepanitiaan;
- Mengorganisir dan mendorong perseorangan dan keluarga peserta program BMN untuk membentuk kelompok;
- Bersama LKN memfasilitasi pembentukan, perintisan, penumbuhan, penguatan, dan pengembangan KUN;
- Bersama LKN dan Forum Nagari/Forum PMK melakukan penilaian kinerja KUN secara berkala setiap enam bulan;
- Membantu tugas-tugas persiapan lainnya.

▪ **Dalam proses bantuan peran teknis**, LCO mempunyai peran khusus sebagai berikut :

- Melakukan bimbingan teknis terhadap penyusunan proposal oleh LSEM, LKN, KUN, dan program-program yang diusulkan sesuai RKPM;
- Membantu LKN dalam menghimpun dan menseleksi usulan-usulan KUN dan pencairan dana CSR BMN;
- Mengembangkan sistem informasi yang sederhana untuk mendorong adanya keterbukaan dalam penggunaan dana CSR BMN dan pengaduan-pengaduan masyarakat;

- Membantu LKN dan KUN dalam tata cara mengelola administrasi, pencatatan, dan pelaporan kegiatan;
- Membantu tugas-tugas dan peran teknis lainnya.
- **Dalam proses peningkatan kapasitas kelembagaan dan akses terhadap sumberdaya pembangunan,** LCO mempunyai peran khusus sebagai berikut :
 - Membantu perkuatan, pengembangan, dan pemandirian LKN dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan, khususnya pemberdayaan komunitas sasaran yang telah terorganisir dalam LSEM/KUN dan dapat akses terhadap sumberdaya pembangunan di luar dari program CSR BMN;
 - Membantu tugas-tugas pendampingan lainnya.

Proses rekrutmen Tim Pendamping sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan SOP CSR BMN serta tugas dan tanggung jawab yang akan dijalankan di lapangan juga sudah jelas dan lengkap. Kegiatan pengembangan kapasitas Tim Pendamping juga dilakukan secara berkelanjutan oleh pihak CSR PT Semen Padang sehingga Tim Pendamping punya kapasitas yang memadai untuk mendampingi program. Walaupun demikian, dalam menjalankan pendampingan masih ditemukan adanya kecenderungan arogansi dan sikap emosional sebagai pendamping saat menghadapi dinamika masyarakat di lapangan. Kondisi ini bisa dipahami mengingat mereka masih berusia muda dan ada target yang mesti dicapai, sementara proses di masyarakat membutuhkan waktu dan kesabaran ekstra.

5) Penentuan Lokasi Kelurahan

Untuk mengantisipasi masalah yang dihadapi maupun yang akan timbul antara masyarakat dan perusahaan, maka dalam penentuan lokasi sasaran program didasarkan kepada urutan skala prioritas :

1. **Ring I**, mencakup seluruh kelurahan yang berbatasan langsung dengan fasilitas produksi/pabrik/tambang/PLTA PT Semen Padang, sebagai berikut :
 - a. Seluruh kelurahan di Kecamatan Lubuk Kilangan
 - b. Kelurahan yang berbatasan langsung dengan fasilitas produksi di kecamatan Lubuk Begalung dan Kecamatan Pauh
 2. **Ring II**, mencakup :
 - a. Dalam Kota Padang (di luar Ring I)
 - b. Seluruh kelurahan yang berbatasan langsung dengan fasilitas produksi PT. Semen Padang di luar Indarung (Teluk Bayur, Ciwandan, Malahayati, Belawan, Tanjung Priok, Dumai, Batam)
 3. **Ring III**, mencakup wilayah Sumatera Barat di luar Kota Padang
 4. **Ring IV**, mencakup wilayah di luar Sumatera Barat/Nasional
- Berdasarkan temuan lapangan, Kelurahan Lambung Bukit merupakan kelurahan yang layak dikategorikan pada ring I dari CSR PT Semen Padang. Beberapa kelurahan lain di Kecamatan Pauh, terutama yang kondisi kesejahteraan masyarakat relatif minim, perlu mendapatkan perhatian, yakni Kelurahan Limau Manis, Kelurahan Limau Manis Selatan, dan Kelurahan Koto Lua.

5.3. Tahap Perencanaan Program CSR

Tahap ini merupakan tahap yang dilakukan untuk merencanakan program CSR BMN dan pada tahap ini dilakukan dengan melibatkan partisipasi komunitas penerima manfaat serta multi pihak lainnya yang terkait dengan program BMN. Adapun pada tahap perencanaan ini meliputi serangkaian kegiatan yang terdiri dari : (1) Rekrutmen dan Pembekalan Tim Forum Nagari/Forum PMKLB dan Tim Pengelola LKN, (2) Pemeriksaan Ulang Kelurahan Sasaran, (3) Sosialisasi dan Penilaian Persepsi, (4) Pemahaman Peta Kelurahan Sasaran, (5) Pemetaan Swadaya/Pemetaan Sosial, (6) Merancang Tindakan Bersama Berbasis Kebutuhan,

(7) Penyusunan Dokumen RKPM Tahunan, serta (8) Pengajuan Usulan, Penilaian Usulan dan Kesepakatan Pelaksanaan. Secara terperinci mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan ini, dapat dijelaskan pada bagian berikut.

a) Rekrutmen dan Pembekalan Tim Forum Nagari/Forum PMKLB dan Tim Pengelola LKN

Kegiatan ini bertujuan untuk menseleksi personil yang akan mengelola kelembagaan lokal sebagai mitra program CSR BMN. Personil kedua kelembagaan lokal ini dipilih dari masyarakat setempat dengan beberapa kriteria dan diprioritaskan dari kalangan generasi muda terdidik. Selanjutnya personil Forum Nagari/Forum PMKLB dan pengelola KLN akan dilakukan pembekalan berupa pelatihan untuk penguatan kapasitas atas biaya dari pihak PT Semen Padang. Bahkan untuk tahun 2018, pelatihan dilakukan dengan mengirimkan tim ke Bandung. Setelah direkrut dan dilatih, para personil akan bekerja untuk jangka waktu 5 tahun. Personil Forum Nagari/Forum PMKLB serta personil Pengelola LKN di Kelurahan Lambung Bukit direkrut melalui seleksi yang transparan berdasarkan usulan dari tokoh masyarakat, pihak Kelurahan dan LPM. Selama 4 tahun bekerja, kedua Tim yang personilnya berkualifikasi sarjana muda dan sarjana ini mampu bekerja optimal dan meraih beberapa prestasi, serta dapat diterima oleh para pemangku kepentingan di Kelurahan Lambung Bukit.

b) Pemeriksaan Ulang Kelurahan Sasaran

Kegiatan ini merupakan kegiatan penilaian Kelurahan Lambung Bukit sebagai sasaran program CSR BMN sebagai dasar untuk menentukan strategi dan langkah pemberdayaan masyarakat untuk jangka panjang, menengah, maupun pendek. Kegiatan ini dilakukan bersama utusan masyarakat melalui Forum Musyawarah yang dikenal dengan istilah Musyawarah Kito (Muskitito). Kegiatan ini berjangka waktu 5 tahun yang di mulai pada tahun September 2015 dan setiap tahun sampai tahun 2018 dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk memetakan kondisi dan profil kelurahan (*annual review*). Proses pelaksanaan kegiatan ini melibatkan CDO, LCO bersama Pokja Forum PMKLB dan aparat kelurahan yang secara berkala setiap tahun melakukan

peninjauan lapangan dan menyesuaikan data sekunder dengan data terakhir yang ada di kelurahan dan kantor statistik /instansi terkait. Kegiatan ini secara administratif, termuat dalam dokumen SOP (Format A-1, A-2, dan A-3). Keluaran dari kegiatan ini selain tersedianya data kelurahan yang valid dan data sesuai dengan kondisi terkini, juga menjadi bahan penilaian apakah lokasi sasaran sudah sesuai dan konsisten dengan tujuan dan sasaran program BMN serta bahan untuk penilaian pencapaian dari keberhasilan pelaksanaan program CSR. Hasil dari kegiatan ini adalah ditetapkannya Kelurahan Lambung Bukit sebagai lokasi program BMN untuk periode waktu 5 tahun (2015-2019).

Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini masih terkendala pada ketersediaan data yang valid dan aktual mengenai profil nagari di kantor Kelurahan. Selain itu ketersediaan data yang terintegrasi antar pihak yang terkait dengan penyediaan data pembangunan di Kelurahan Lambung Bukit juga masih belum ada. Terakhir, database berbasis teknologi informasi juga belum tersedia di Kelurahan. Padahal data yang valid, aktual, terintegrasi, dan berbasis teknologi informasi sudah merupakan kebutuhan di era modern ini.

c) Sosialisasi dan Penilaian Persepsi

Kegiatan ini secara umum bertujuan untuk lebih memasyarakatkan Program CSR BMN. Secara khusus bertujuan : (1) meningkatkan kesadaran kritis masyarakat dalam pelaksanaan program secara mandiri dan berkelanjutan, (2) menyebarluaskan informasi program melalui penyebaran informasi (berupa poster, leaflet, folder) kepada para pemangku kepentingan, (3) menanamkan pengetahuan yang memadai bagi komunitas sasaran dan pemangku kepentingan lainnya akan pentingnya partisipasi dalam pengelolaan program, (4) menanamkan visi, misi, tujuan dan prinsip pemberdayaan masyarakat serta nilai-nilai program Basinergi Mambangun Nagari, (5) menjaga transparansi dan membangun kontrol sosial yang melakat pada setiap kegiatan dalam program, serta (6) menerima umpan balik dari hasil penilaian persepsi keberadaan perusahaan dan pelaksanaan program CSR BMN.

Penanggungjawab kegiatan pendampingan adalah CDO yang ditugaskan oleh Biro CSR PT Semen Padang. Pelaksana kegiatan di Kelurahan Lambung Bukit

adalah LCO bersama FPMKLB dan Lurah. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan terus menerus dalam setiap tahapan dari daur program sehingga para penerima manfaat (warga masyarakat) serta para pemangku kepentingan lainnya bisa berpartisipasi secara optimal. Sesuai dengan rencana, kegiatan tahunan ini secara formal telah dilaksanakan sejak tahun 2016 dalam sebuah Forum Sosialisasi dan dilakukan terus menerus setelah itu dalam forum-forum formal dan informal yang melibatkan warga masyarakat di Kelurahan Lambung Bukit. Indikator keberhasilan yang diharapkan dari kegiatan ini adalah : (a) tumbuhnya kesadaran masyarakat tentang pemberdayaan (pentingnya, tujuan dan prinsip), (b) diketahuinya informasi mengenai FPMKLB, (c) mengertinya masyarakat sasaran dan para pemangku kepentingan mengenai langkah langkah program Basinergi Mambangun Nagari, serta (d) tumbuhnya kesadaran kritis warga akan pentingnya transparansi dan kontrol sosial yang melekat secara keseluruhan dalam program BMN. Hasil yang diharapkan di masing masing indikator keberhasilan adalah minimal 30% dari hasil pre-test dan 70% dari hasil post-test terhadap warga masyarakat mampu mengetahui.

Dalam realisasinya, kegiatan ini masih terkendala dari sisi masih kurangnya inisiatif warga masyarakat untuk mengenal lebih jauh terkait program. Hal ini disebabkan karena setelah puluhan tahun masyarakat dibuat menjadi pasif sehingga inisiatif untuk bergerak dengan kemauan sendiri cenderung masih rendah. Untuk itu, perlu dilakukan kegiatan sosialisasi dan penyadaran terus menerus serta berkelanjutan terhadap masyarakat dan komunitas sebagai penerima manfaat.

Program sosialisasi Basinergi Mambangun Nagari (BMN) CSR PT. Semen Padang adalah salah satu bentuk kegiatan dari program forum nagari untuk mensosialisasikan program-program apa saja yang akan dilaksanakan oleh forum nagari dalam pengelolaan dana CSR PT. Semen Padang. Program Sosialisasi BMN CSR PT. Semen Padang Kelurahan Lambung Bukit telah dilaksanakan pada tanggal 6 November 2017 dengan dana sejumlah Rp 4.500.000. Dalam sosialisasi ini melibatkan pembicara dari Koordinator Lumbung Keuangan Nagari (LKN) CSR PT Semen Padang dan pihak PT Semen Padang sendiri serta para pemangku kepentingan yang ada di kelurahan

Lambung Bukit. Dalam kegiatan ini telah dijelaskan bahwa kedepannya tahun 2018 kegiatan atau program forum nagari 85 persennya adalah program pemberdayaan masyarakat dan 15 persen untuk kegiatan lainnya. Dalam kegiatan ini telah dilakukan monitoring dan evaluasi oleh pihak terkait.

d) Pemahaman Peta Kelurahan

Kegiatan ini merupakan kegiatan pemetaan perubahan sejarah melalui peristiwa-peristiwa penting tentang pemerintahan, kependudukan, sosial, ekonomi, dan lingkungan Kelurahan Lambung Bukit. Dari kegiatan ini akan tergambar keadaan Kelurahan Lambung Bukit sebelum perusahaan beroperasi, saat perusahaan beroperasi dan *exit strategy*, khususnya terkait dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan PT Semen Padang melalui program CSR BMN, maupun program yang dilakukan pemerintah dan pihak terkait lainnya. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada bulan Oktober 2015 dengan penanggung jawab kegiatan CDO, pelaksana LCO, sekretaris FPMKLB dan koordinator-koordinator Pokja FPMKLB.

Pada akhirnya dari kegiatan ini akan dihasilkan Peta Kelurahan yang secara komprehensif memuat : (1) peta sejarah kelurahan, (2) peta lingkungan, (3) peta potensi sumberdaya, (4) peta kantong kemiskinan, (5) peta kalender musim, (6) peta transek/penampang melintang kelurahan, (7) peta bagan hubungan kelembagaan, (8) peta peranserta perempuan dalam peningkatan pendapatan rumahtangga, serta (9) peta potensi konflik.

Namun temuan lapangan menunjukkan bahwa Peta Kelurahan dengan seluruh kelengkapannya ini belum ada tersedia dokumennya di kantor Kelurahan. Sedangkan dari kegiatan CSR BMN, hanya tersedia dokumen dalam *software* dan tidak ada dalam bentuk cetakan. Padahal dokumen ini dibutuhkan multi pihak untuk mengenal dan mengintegrasikan program-program pembangunan untuk Kelurahan Lambung Bukit. Adanya banyak institusi yang melakukan program pemberdayaan di Kelurahan Lambung Bukit. Dengan adanya dokumen Peta Kelurahan, maka setiap institusi akan berpedoman pada dokumen tersebut dalam perencanaan program secara kolaborasi. Selain itu,

dokumen ini dibutuhkan juga sebagai acuan dalam setiap pelaksanaan Musrenbang Kelurahan.

e) Pemetaan Swadaya (Pemetaan Sosial)

Kegiatan ini bertujuan untuk menemu-kenali kebutuhan nyata yang terkait dengan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat (khususnya komunitas miskin) yang menjadi sasaran/penerima manfaat program CSR BMN. Kegiatan ini dilakukan secara swadaya oleh masyarakat atau Tim Pemetaan Swadaya dengan melibatkan LCO dan FPMKLB dalam periode waktu tertentu. Waktu pelaksanaannya adalah di bulan November 2015 dan dilakukan penyempurnaan setiap tahun (*annual review*). Indikator keberhasilan dari kegiatan ini terdiri dari : (1) peta dan profil keluarga miskin dan komunitas terkena dampak langsung operasi perusahaan, (2) peta dan profil potensi relawan dan sumberdaya manusia, (3) peta dan profil masalah serta potensi ekonomi masyarakat, (4) peta dan profil masalah serta potensi lingkungan dan pemukiman, (5) peta dan profil masalah serta potensi sosial budaya, (6) peta dan profil masalah serta potensi kelembagaan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, serta (7) peta dan profil kebutuhan masyarakat.

Adapun keluaran yang diharapkan dari masing-masing kegiatan pemetaan swadaya atau pemetaan sosial ini adalah : (1) terpetakannya kembali komunitas sasaran program, (2) partisipasi kader-kader kelurahan dalam melaksanakan program, (3) adanya rencana program pengembangan ekonomi lokal, (4) adanya rencana program pembangunan sarana/prasarana pemukiman dan lingkungan, (5) adanya rencana program peningkatan kualitas kehidupan sosial budaya di masyarakat, (6) menguatnya peran kelembagaan sosial, budaya, dan ekonomi lokal, serta (7) adanya daftar kebutuhan pemberdayaan masyarakat.

Namun temuan lapangan menunjukkan bahwa dokumen hasil Pemetaan Swadaya ini dengan seluruh kelengkapannya belum ada di kantor Kelurahan dan hanya berupa *software* dan hanya bisa di akses di internet. Padahal dokumen ini dibutuhkan multi pihak untuk mengenal dan mengintegrasikan program-program pembangunan untuk Kelurahan Lambung Bukit. Selain itu,

dokumen ini dibutuhkan juga sebagai acuan dalam setiap pelaksanaan Musrenbang Kelurahan.

f) Merancang Tindakan Bersama Berbasis Kebutuhan

Kegiatan yang dikenal juga dengan istilah *Community Action Plan* (CAP) pada prinsipnya bertujuan untuk menyusun program 5 (lima) tahun kedepan yang bersumber dari gagasan kegiatan masyarakat dan rencana pembangunan kelurahan yang diusulkan untuk dibahas. Selain itu juga bersumber dari Peta Kelurahan yang telah disusun secara swadaya melalui kegiatan Pemetaan Swadaya. Dokumen CAP Kelurahan Lambung Bukit ini memuat daftar usulan kegiatan dan aspirasi masyarakat lainnya untuk program berjangka menengah (waktu 5 tahun) yang disesuaikan dengan rencana perusahaan. Proses penyusunan dokumen CAP ini diusulkan dan dibahas dalam Forum Rembug Warga yang dikenal dengan istilah Muskito (Musyawarah Kito). Muskito pertama diadakan pada bulan Desember 2015 dan pembahasan CAP akan diadakan kembali pada periode waktu 5 tahun berikutnya pada tahun 2019. Dalam Forum ini juga diberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan di Kelurahan Lambung Bukit, terkait visi, misi, dan nilai dari program BMN.

g) Penyusunan Dokumen RKPM Tahunan

Kegiatan ini pada prinsipnya bertujuan untuk menyusun program 1 (satu) tahun kedepan yang bersumber dari gagasan kegiatan masyarakat dan rencana pembangunan kelurahan yang diusulkan untuk dibahas. Selain itu juga bersumber dari Peta Kelurahan yang telah disusun secara swadaya melalui kegiatan Pemetaan Swadaya. Dokumen RKPM Tahunan Kelurahan Lambung Bukit ini memuat daftar usulan kegiatan dan aspirasi masyarakat lainnya untuk program berjangka pendek (waktu 1 tahun) yang disesuaikan dengan rencana perusahaan. Proses penyusunan dokumen ini diusulkan dan dibahas dalam Forum Rembug Warga yang dikenal dengan istilah Muskito (Musyawarah Kito). Muskito pertama diadakan pada bulan Desember 2015 dan pembahasan RKPM akan diadakan kembali pada periode waktu 1 tahun berikutnya dan

setiap tahun sampai tahun 2019. Dalam Forum ini juga diberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan di Kelurahan Lambung Bukit, terkait visi, misi, dan nilai dari program BMN.

Temuan lapangan terkait dengan kegiatan ini selama program CSR BMN, dokumen RKPM berhasil disusun setiap tahun dengan baik melalui fasilitasi Forum Nagari/Forum PMKLB. Namun dokumen publik ini baru dipublikasikan secara online (berupa software) sehingga hanya bisa diakses oleh warga yang punya kesadaran teknologi informasi saja. Padahal mayoritas masyarakat di Kelurahan Lambung Bukit masih menggunakan teknologi informasi untuk kegiatan yang kurang produktif.

h) Pengajuan Usulan, Penilaian Usulan dan Kesepakatan Pelaksanaan

▪ Pengajuan Usulan

Setelah RKPM disepakati dalam Muskito, selanjutnya dilakukan kegiatan pengusulan proposal yang tertulis secara rinci oleh segenap LSEM maupun KUN melalui Forum Nagari/Forum PMKLB dan LKN. Penyusunan usulan dilakukan bersama Pokja Forum Nagari/ Forum PMKLB. Muatan isi usulan proposal memuat jenis kegiatan yang diajukan, biaya, sumber dana, cara melaksanakan, pemeliharaan, keterkaitan dengan dampak sosial dan lingkungan, penambahan pendapatan, dll.

▪ Penilaian Usulan

Usulan proposal yang masuk ke Forum Nagari/Forum PMKLB dan telah direkapitulasi, diteruskan ke LKN untuk di nilai layak/tidaknya secara teknis, lingkungan, dan keuangan agar sesuai dengan ketentuan petunjuk teknis dan pedoman LKN. Cara penilaian ditentukan oleh LKN dan diteruskan/ direkomendasikan ke Forum Nagari/Forum PMKLB dan Lurah untuk dibahas dan diputuskan, khususnya untuk program infrastruktur. Hasilnya diumumkan dalam pertemuan Forum Nagari/ Forum PMKLB yang menghadirkan pelaksana program (LSEM/ KUN/Panitia Pelaksana), dan memberikan penjelasan serta menanggapi usulan pelaksana program. Khusus untuk program dana bergulir, LKN

menyusun peringkat/prioritas berupa : layak utama, layak bergilir (daftar tunggu), tidak layak tetapi perlu diperbaiki, dan tidak layak sepenuhnya. Keputusan berdasarkan musyawarah atau pemungutan suara (bila diperlukan) di tingkat Forum Nagari/Forum PMKLB. Usulan yang disetujui harus diumumkan terbuka, dan pada saat pencairan dana juga diumumkan terbuka. Kelompok harus melaporkan penyerapan dana program CSR BMN dan kemajuan kegiatannya maupun pembayarannya setiap bulannya.

▪ **Kesepakatan Pelaksanaan**

Kegiatan usaha ekonomi maupun pembangunan sarana/prasarana lingkungan pemukiman kelurahan serta pelatihan atau kegiatan pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, keagamaan, dll, ditandatangani persetujuannya oleh LKN. Selain itu juga dilampiri dengan surat yang ditandatangani oleh perwakilan LSEM/KUN/Panitia Pelaksana. Jika satu minggu (7 hari) kesepakatan ini tidak ada tanggapan dari pihak manapun, maka LSEM/KUN/Panitia Pelaksana tetap terus menjalankan kegiatannya.

Temuan lapangan terkait dengan kegiatan ini selama program CSR BMN, sudah tiga kali setiap tahun dalam rentang waktu usulan tahun 2016, 2017, dan 2018 masyarakat mengajukan usulan kegiatan. Namun usulan tersebut masih didominasi oleh ego masing-masing kampung dan komunitas sehingga kegiatan cukup banyak, sehingga tidak fokus dan berdampak pada usulan kegiatan dalam jumlah dana yang terbatas.

5.4. Tahap Pelaksanaan Program CSR

Merujuk kepada *strategic flagship*, PT Semen Padang menjabarkan CSR dalam 4 (empat) pilar-pilar program yang dilaksanakan secara sinergi bekerjasama dengan segenap pemangku kepentingan. Adapun pilar-pilar program CSR Semen Padang meliputi (1) Campin Nagari, (2) Pandai Nagari, (3) Peduli Nagari dan Elok Nagari. Untuk Kelurahan Lambung Bukit, sejak program CSR BMN dimulai tahun 2015 dan sampai saat ini tahun 2018 telah dilaksanakan 2 dari 4 pilar program CSR BMN

sesuai dengan sasaran penerima manfaat, yakni masyarakat dan komunitas. Secara terperinci kedua program ini dapat diuraikan sebagai berikut :

e) Program Peduli Nagari

Merupakan program-program yang mendukung misi CSR Semen Padang terkait *core subject* ISO 26000 SR. Semen Padang Peduli Nagari menjadi salah satu program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat serta hak azasi manusia, dengan program utama antara lain :

- **Lambung Nagari** ; peningkatan produktivitas peternakan, perikanan dan pertanian, kemitraan untuk mitra binaan, dukungan pemasaran untuk produk mitra binaan, dan pengembangan *ecopreneurship*. Program ini selama periode waktu 2016-2018 telah dilaksanakan di Kelurahan Lambung Bukit dengan beberapa kegiatan, sebagai berikut :

(1) Pembinaan Organisasi Masyarakat

Peningkatan sumber daya manusia merupakan hal yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas. Berkenan dengan hal itu, telah diadakan pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Selanjutnya peserta yang telah selesai mengikuti pelatihan dan telah tumbuh kecakapan serta ketrampilan khususnya dalam pengorganisasian. Ada dua kegiatan yang telah dilaksanakan, yakni :

- **Pelatihan Pengorganisir Masyarakat**; Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 19-20 Oktober 2016 dengan jumlah dana Rp 4.500.000. Dalam kegiatan ini telah dilakukan evaluasi dan monitoring, sehingga dapat mewujudkan tujuan dari kegiatan tersebut. Adapun dokumentasi kegiatan dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar 10. Kegiatan Pelatihan Pengorganisir Masyarakat



▪ **Pemberdayaan Pemuda;** Organisasi sosial kepemudaan merupakan wadah pembinaan dan pengembangan serta pemberdayaan dalam upaya pengembangan kegiatan ekonomis produktif dengan pendayagunaan serta potensi yang tersedia di lingkungan baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang telah ada. Sebagai organisasi kepemudaan, semua ini terwujud dari regenerasi organisasi demi kelanjutan organisasi serta pembinaan anggota pemuda baik dimasa sekarang dan akan datang. Kegiatan Pemberdayaan Pemuda Kelurahan Lambung Bukit ini telah dilaksanakan pada tanggal 22 sampai 23 September 2017 dengan jumlah dana Rp 6.75.000. Kegiatan ini telah dilakukan monitoring dan evaluasi oleh pihak terkait. Adapun dokumentasi kegiatan dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar 11. Kegiatan Pemberdayaan Pemuda



(2) Penguatan Kelompok Tani

Program penguatan kelompok tani bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kelompok dalam melaksanakan kegiatan pertanian dalam meningkatkan perekonomian

masyarakat. Pemberdayaan kelompok tani berupa kegiatan pengorganisasian struktur kelompok, pembukuan kelompok, kas, buku anggota, buku daftar hadir dan lain-lain sebagainya. Dalam pelaksanaan program ini juga kelompok tani dibekali dengan pengetahuan tentang pemanfaatan potensi-potensi yang ada di area pertanian dengan materi analisis SWOT. Kemudian kelompok tani Sungkai Permai diberikan bantuan bibit pala, cengkeh dan durian untuk ditanam di lahan anggota kelompok.

- Tujuan dari program ini adalah untuk dapat memberdayakan anggota kelompok tani yang lebih kurang 75 petani untuk bisa menjadi petani yang mandiri dan bisa memanfaatkan potensi yang ada di sekitar lahan mereka. Kegiatan ini berupa penguatan kelompok tani Sungkai Permai, Kelurahan Lambung Bukit. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 27 September 2017 dengan jumlah anggaran Rp 11.250.000. Dalam kegiatan ini juga telah dilakukan monitoring dan evaluasi oleh pihak terkait.

Gambar 12. Kegiatan Penguatan Kelompok Tani



(3) Pengembangan Kawasan Wisata Batu Busuk

- Kegiatan pengembangan kawasan wisata Batu Busuk Kelurahan Lambung Bukit telah dilaksanakan di Batu Busuk (RW 3) pada bulan Agustus 2017 dengan dana sejumlah Rp 8.437.000. Kegiatan yang dilakukan berupa rehabilitasi lubang peninggalan Jepang yang ada di kawasan tersebut. Dalam kegiatan ini telah dilakukan monitoring dan evaluasi oleh pihak terkait.

Gambar 13. Kegiatan Pengembangan Kawasan Wisata



- **Pengembangan Pendidikan Keterampilan dan Budaya Nagari** ;
Program ini selama periode waktu 2016-2018 telah dilaksanakan di Kelurahan Lambung Bukit dengan beberapa kegiatan, antara lain :

(1) Beasiswa

Pendidikan merupakan hal utama dalam perkembangan dan kemajuan bangsa. Banyaknya Rumah Tangga Miskin yang tidak mampu menyekolahkan anaknya karena keterbatasan biaya pendidikan. Froum nagari sebagai perpanjangan tangan CSR Semen Padang memberikan bantuan perlengkapan sekolah siswa dari Rumah Tangga Miskin (RTM) sebanyak 20 orang siswa. Dengan bantuan perlengkapan sekolah ini diharapkan dapat memotivasi siswa kurang mampu untuk tetap dapat bersekolah seperti halnya siswa-siswa lainnya.

Program pemberian beasiswa murid di SD Negeri 10 Lambung Bukit, dari kelas 3 sampai kelas 5 yang data-data siswa diambil dari Rumah Tangga Miskin (RTM) kelurahan Lambung Bukit dan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2016 dengan realisasi dana program sejumlah Rp 9.000.000. Kegiatan ini telah dilakukan monitoring dan evaluasi oleh pihak terkait.

(2) Pengembangan Seni dan Budaya

Ada dua kegiatan yang telah dilakukan, yakni :

- **Pengembangan Kelompok Sanggar Seni Gunung Nago Saiyo**

Kegiatan ini dalam bentuk pengadaan perlengkapan untuk sanggar seni Gunung Nago Saiyo. Dengan adanya

tambahan alat dan perlengkapan sanggar hendaknya dapat meningkatkan kegiatan sanggar untuk kedepannya. Dalam hal ini sanggar seni Gunung Nago Saiyo telah menambah perlengkapan dan peralatannya dengan membeli 1 set baju randai dan 10 buah delta batik, 3 set gendang dol, serta pasir dan semen untuk memperbaiki gelanggang latihan randai. Pelaksanaan program ini hendaknya juga berdampak bagi masyarakat disekitarnya untuk selalu terlibat dan berperan aktif dalam melestarikan budaya randai dan kegiatan sanggar lainnya.

Kegiatan telah dilaksanakan pada tanggal 21 November 2016 dengan alokasi dana sejumlah Rp 11.250.000. Dalam kegiatan ini juga telah dilakukan monitoring dan evaluasi oleh pihak terkait. Adapun dokumentasi kegiatan dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar 14. Kegiatan Sanggar Seni Gunung Nago Saiyo



▪ Pengembangan Kelompok Sanggar Seni Sungkai Sakato

Kegiatan pengadaan perlengkapan sanggar seni Sungkai Sakato telah dilaksanakan untuk meningkatkan kegiatan sanggar untuk kedepannya. Dalam hal ini sanggar seni Sungkai Sakato telah menambah perlengkapan dan peralatan sanggar mereka dengan membeli 16 buah *talempong* beserta standar *talempong*, satu buah *gandang tassa*, dua buah *gandang tambua* dan pakaian *anak daro*. Pelaksanaan kegiatan ini hendaknya juga berdampak bagi masyarakat disekitarnya untuk selalu terlibat dan berperan

aktif dalam melestarikan budaya randai dan kegiatan sanggar lainnya.

Kegiatan telah dilaksanakan pada tanggal 28 November 2016 dengan alokasi dana sejumlah Rp 11.250.000. Dalam kegiatan ini juga telah dilakukan monitoring dan evaluasi oleh pihak terkait. Adapun dokumentasi kegiatan dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar 15. Kegiatan Sanggar Seni Sungkai Sakato



f) Program Elok Nagari

Merupakan program-program yang mendukung misi CSR Semen Padang terkait *core subject* ISO 26000 SR-Lingkungan Hidup. Dari beberapa program, maka yang dilaksanakan di Kelurahan Lambung Bukit termasuk ke dalam kategori lingkungan hijau. Adapun beberapa kegiatan dalam rentang waktu 2016-2018 yang mendukung lingkungan hijau di Kelurahan Lambung Bukit, antara lain :

1. Sosialisasi Sekolah Hijau

Kegiatan yang dilaksanakan berupa sosialisasi tentang sekolahku hijau dari tim adiwiyata SD Bustanul Ulum dan pemakai tong sampah 3R sebanyak 3 buah di SD Negeri 10 Lambung Bukit. Kegiatan sosialisasi dilakukan sebanyak 2 kali dan akan berlanjut kedepannya yang dilaksanakan di SDN 10 Lambung Bukit. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 30 September 2016 dengan realisasi dana program sejumlah Rp 7.425.000. Dalam kegiatan ini telah dilakukan evaluasi dan monitoring, sehingga dapat mewujudkan tujuan dari program tersebut.

Gambar 16. Sosialisasi Sekolah Hijau



2. Lingkungan Hijau

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pengadaan tanaman produktif untuk warga masyarakat. Tanaman produktif adalah semua jenis tanaman yang dapat menghasilkan (buah) sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia. Beberapa contoh tanaman produktif diantaranya : pohon mangga, pohon rambutan, pohon kelapa dan lainnya. Selain dimanfaatkan untuk penghijauan fungsi tanaman produktif adalah untuk di ambil hasilnya.

Kegiatan penanaman pohon produktif dilaksanakan di tempat yaitu Batu Busuk (RW 3), Lambung Bukit. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal Mei 2017 dengan realisasi dana program sejumlah Rp 7.500.000. Dalam kegiatan ini juga telah dilakukan monitoring dan evaluasi.

5.5. Tahap Monitoring dan Evaluasi Program CSR

Tahapan ini merupakan tahapan yang penting dalam siklus pengelolaan program CSR BMN di Kelurahan Lambung Bukit. Dengan adanya monitoring, diharapkan kendala yang ditemui saat program dan kegiatan dilaksanakan, bisa diantisipasi segera oleh segenap pelaku. Sementara dengan adanya kegiatan evaluasi, diharapkan menjadi pedoman untuk penyempurnaan pengelolaan program CSR BMN pada tahun berikutnya. Tahap ini meliputi dua kegiatan, yakni : pengaduan dan monitoring evaluasi.

5.5.1. Pengaduan

LKN wajib membuka papan informasi dan kotak pengaduan masyarakat. Demikian pula, Forum Nagari/Forum PMKLB dapat

menyediakan kotak pengaduan/bersedia menampung pengaduan masyarakat. Dalam hal ini Forum Nagari/Forum PMKLB dan atau LKN dapat menyediakan suatu cara penanganan pengaduan, baik berupa perselisihan, kelalaian, dan penyimpangan.

5.5.2. Monitoring dan Evaluasi

Secara umum pemantauan mandiri dapat dilakukan oleh masyarakat atas temuan, aspirasi dan pengaduan yang disalurkan melalui komunikasi langsung ke Lurah/Camat dan atau melalui LKN dan atau langsung ke Forum Nagari/Forum PMKLB.

Secara khusus kegiatan monitoring dan evaluasi dalam program CSR BMN, dapat berupa : (1) Melibatkan masyarakat peduli yang terorganisir dalam Kelompok Komunitas Peduli (KKP); (2) Menggunakan pihak ketiga (pemeriksa independen) untuk mengkaji kesesuaian prinsip-prinsip penyelenggaraan program CSR BMN, rencana dan realisasi program, transparansi dan akuntabilitas pembiayaan, penerima manfaat program, persepsi kepuasan masyarakat lokal terhadap program dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan aspek yang perlu di monitoring dan di evaluasi.

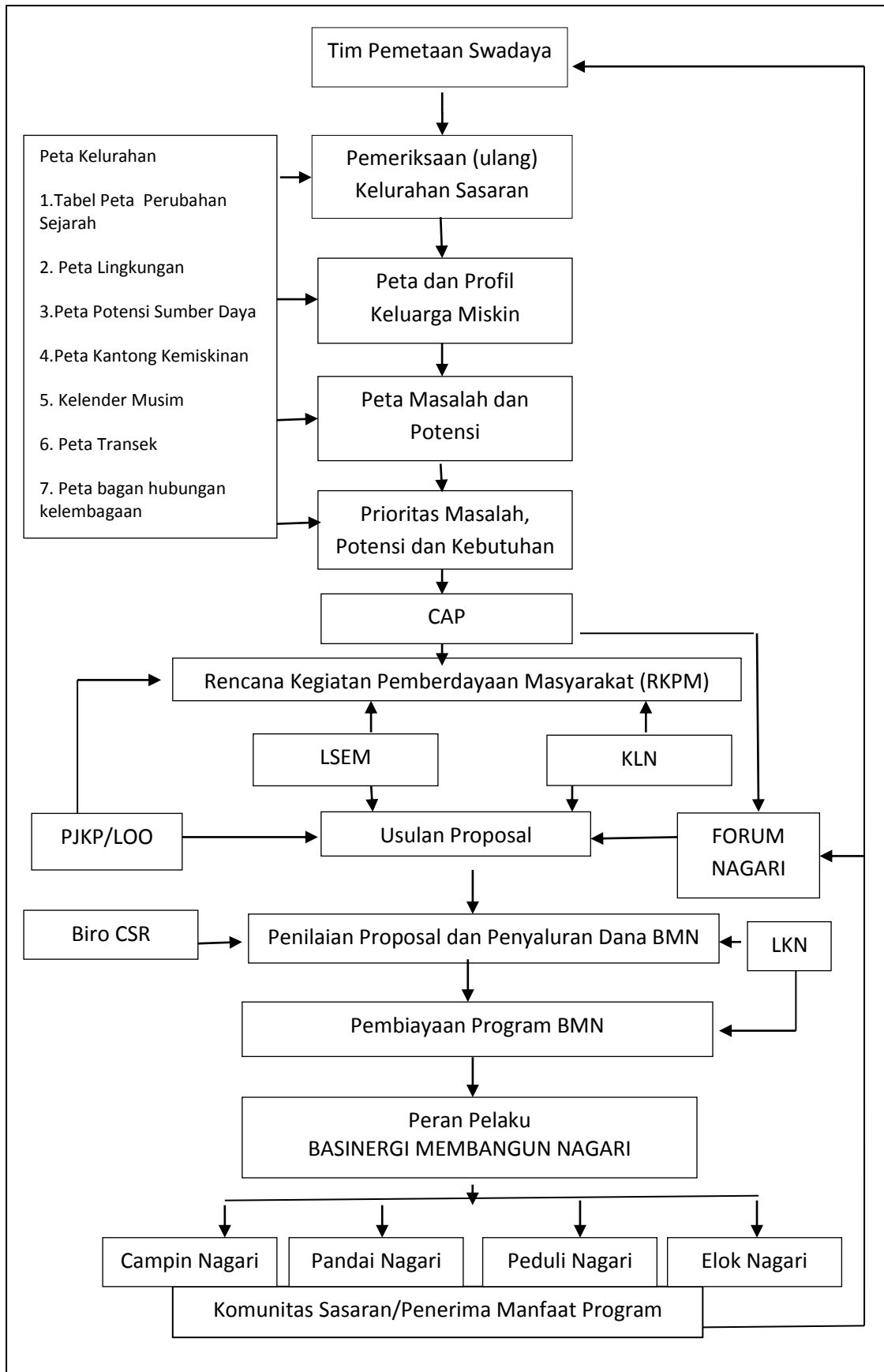
Dalam prakteknya, selama program CSR BMN dilaksanakan di Kelurahan Lambung Bukit relatif berjalan lancar sehingga tidak ada pengaduan terkait kelalaian, perselisihan, dan penyimpangan. Masih cukup kuatnya rasa kebersamaan masyarakat sehingga berdampak pada minimnya pengaduan masyarakat terhadap pengelolaan program CSR BMN.

Namun terkait dari hasil monitoring dan evaluasi program, pada saat kegiatan evaluasi tahun 2018, diperoleh beberapa temuan sebagai berikut : *Pertama*, program yang dilaksanakan belum fokus sehingga dana program disebar dalam jumlah yang kecil agar setiap kampung dan kelompok masyarakat memperoleh kesempatan. *Kedua*, usulan program dan kegiatan dari masyarakat masih didominasi oleh program dan kegiatan fisik, sementara pihak CSR BMN lebih bertujuan untuk program pemberdayaan. Namun

demikian, setiap tahun sudah terdapat pengurangan persentase program dan kegiatan fisik. *Ketiga*, masih terbatasnya inisiatif dari masyarakat dalam merencanakan program dan kegiatan yang berkualitas untuk pemberdayaan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Adapun proses pengelolaan keseluruhan kegiatan dalam program CSR BMN, dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar 10. Skema Proses Pengelolaan Program CSR BMN



BAB 6

PROFIL DAN PERSEPSI PEMANGKU KEPENTINGAN TERHADAP KEBERLANJUTAN PENGELOLAAN PROGRAM CSR PT SEMEN PADANG DI KELURAHAN LAMBUNG BUKIT

6.1. Pengantar

Pada bagian ini akan di kupas secara mendalam 2 (dua) topik penting sebagai materi untuk menjawab tujuan kedua penelitian, yakni : *pertama*, profil responden yakni para pemangku kepentingan yang terkait dengan pengelolaan program CSR PT Semen Padang yang dikenal dengan istilah program Basinerji Mambangun Nagari (BMN); dan *kedua*, persepsi para pemangku kepentingan yang terkait dengan keberlanjutan pengelolaan program CSR PT Semen Padang yang dikenal dengan istilah program Basinerji Mambangun Nagari (BMN). Profil responden dilihat dari indikator: jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, pekerjaan, serta peran dalam pengelolaan program BMN. Sedangkan untuk persepsi responden terkait keberlanjutan pengelolaan program BMN di Kelurahan Lambung Bukit, akan di lihat dari dua perspektif, yakni kondisi yang diharapkan dan kondisi saat ini. Untuk kedua perspektif tersebut, penilaian persepsi responden mencakup aspek sosial budaya, aspek kelembagaan, aspek finansial/keuangan, aspek lingkungan. Keempat persepsi responden para pemangku kepentingan dengan masing-masing terdiri dari beberapa indikator tersebut, akan di nilai dalam konteks pengelolaan program BMN dalam periode waktu akhir tahun 2015 sampai pertengahan tahun 2018.

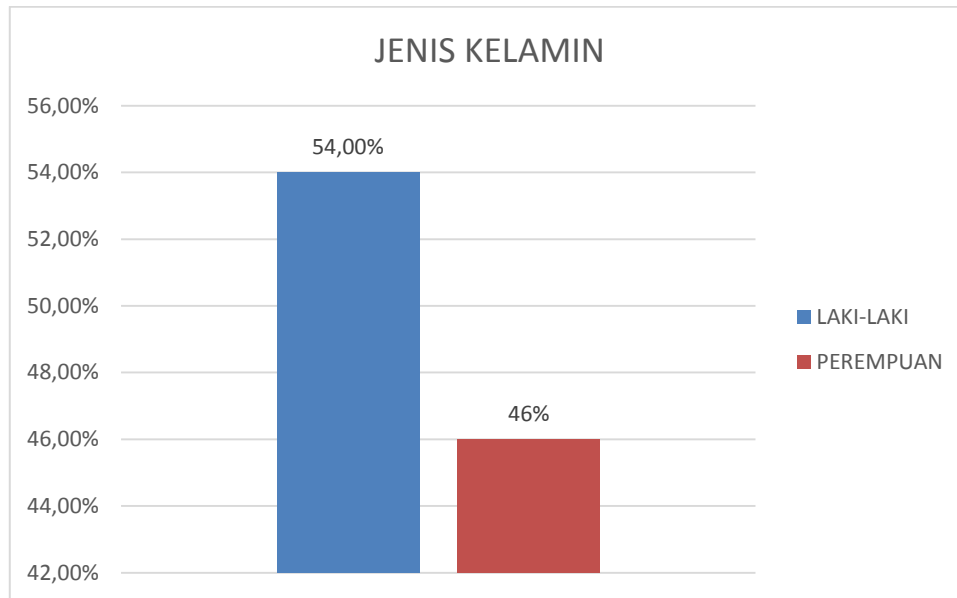
6.2. Profil Pemangku Kepentingan

a. Jenis Kelamin

Pemangku kepentingan yang menjadi responden dalam penelitian ini mempunyai sebaran jenis kelamin dengan proporsi yang berjenis kelamin laki-laki dengan perempuan relatif berimbang, yakni sejumlah 54% berjenis kelamin laki-laki dan sejumlah 46% berjenis kelamin perempuan. Dari proses diskusi yang dilakukan, ternyata jenis kelamin tidak mempengaruhi terhadap otoritas dalam penyampaian aspirasi, khususnya di kalangan generasi muda. Hal ini bisa dipahami karena rata-rata mereka sudah mempunyai akses informasi yang baik yang diperoleh dari

berbagai sumber, khususnya media sosial. Sebaran peran responden dalam pengelolaan program BMN berdasarkan jenis kelamin responden, dapat dilihat pada Grafik 1.

Grafik 1. Proporsi Responden menurut Jenis Kelamin



Sementara itu proporsi jenis kelamin responden menurut peran dalam pengelolaan program BMN dapat di lihat pada Tabel berikut.

Tabel 2. Proporsi Responden menurut Peran dalam Pengelolaan Program BMN

No	Peran Responden dalam Program BMN	Jumlah dan Persentase JK	
		Laki Laki	Perempuan
1	Penerima manfaat	10	9
2	Pengurus Forum PMKLB	1	-
3	Pengurus Lembaga Keuangan Nagari	-	2
4	Pembina/Ketua RT	1	-
5	Pembina/Ketua RW	1	-
6	Pembina/Lurah	1	-
7	Pembina/LPM	1	-
8	Local Community Organizer (LCO)	-	2
	Total Responden	15	13

Dari Tabel diatas, dari perspektif jenis kelamin terkait dengan pengelolaan program BMN, dapat didalami dari 3 (tiga) hal. *Pertama*, untuk kategori penerima manfaat, proporsi jumlah responden menurut jenis kelamin relatif berimbang, dimana yang berjenis kelamin laki laki berjumlah 53% dan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 47%. *Kedua*, apabila di tinjau dari proporsi jenis kelamin berdasarkan peran sebagai pengelola program BMN (LCO, Pengurus KUN, dan Pengurus Forum PMKLB), terdapat sejumlah 80% dari responden berjenis kelamin perempuan dan sejumlah 20% dari responden berjenis kelamin laki laki. Terakhir apabila di tinjau dari peran sebagai pembina program BMN (Lurah, LPM, Ketua RW, dan Ketua RT), terlihat bahwa masih dominan peran laki laki sebagai pembina, yakni 100% dari responden pembina program.

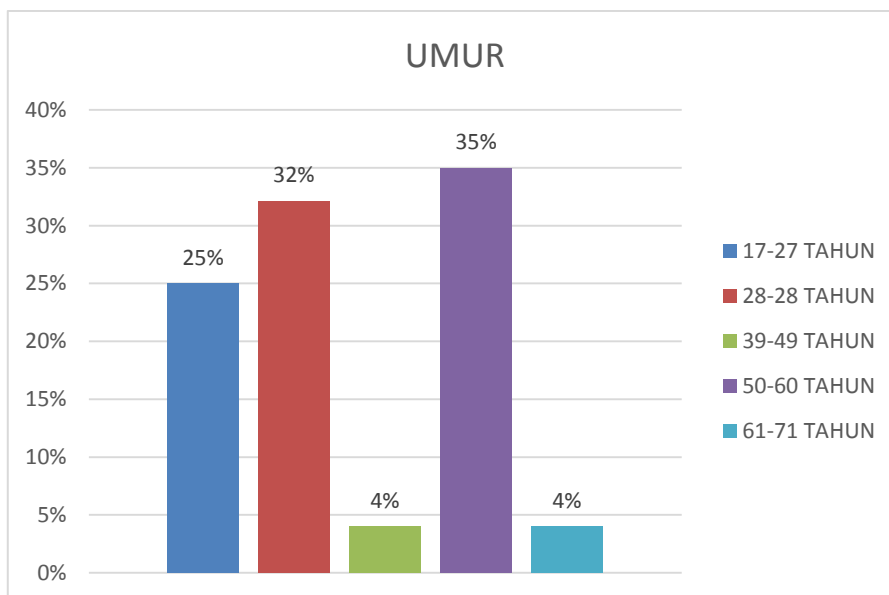
Berdasarkan fakta-fakta diatas, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa Forum PMKLB sebagai mitra PT Semen Padang dalam pengelolaan program BMN telah memberikan kesempatan yang relatif bagi warga masyarakat untuk berpartisipasi dari sisi jenis kelamin. Secara khusus, dapat dijelaskan sebagai berikut: *Pertama*, pengelola program BMN sudah memberikan kesempatan yang relatif sama kepada masyarakat berdasarkan jenis kelamin untuk menjadi penerima manfaat dari program BMN, baik pada program bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan ekonomi lokal. *Kedua*, pengelolaan program BMN sudah memberikan kesempatan bagi perempuan untuk berperan sebagai pengambil keputusan, baik di level komunitas maupun di level pendamping komunitas. *Ketiga*, di level komunitas yang berperan sebagai pembina program BMN masih dominan peran laki-laki dibandingkan dengan perempuan.

b. Umur

Responden dalam penelitian ini menurut sebaran umur, terlihat bahwa mayoritas responden, yakni sejumlah 82% berada pada kisaran umur 20-55 tahun. Selanjutnya sejumlah 18% dari responden berada pada kisaran umur 56-70 tahun. Kondisi ini memperlihatkan bahwa mayoritas responden berada pada kisaran umur yang relatif muda dan produktif. Proporsi mayoritas responden yang berada di usia produktif pada akhirnya bermanfaat dalam membangun dinamika diskusi, sehingga

mampu memberikan pendapat secara kritis dan objektif dalam menilai sejauhmana eksistensi program BMN di wilayah mereka bertempat tinggal.

Fakta dari Grafik 2, apabila dikaitkan dengan pengelolaan program BMN, maka para responden diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan pengelolaan program BMN sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Secara spesik dapat dijelaskan sebagai berikut: *Pertama*, para penerima manfaat diharapkan mampu memanfaatkan program dengan optimal untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kualitas lingkungan di Kelurahan Lambung Bukit. *Kedua*, para pengelola program BMN mampu mengelola program dengan optimal, baik sebagai pendamping untuk penerima manfaat maupun menjembatani dan mengadvokasi aspirasi komunitas ke pihak luar kelurahan, khususnya PT Semen Padang sebagai inisiator program BMN. *Ketiga*, perlu memberi ruang bagi kaum perempuan untuk berperan dalam memimpin di level RT, RW, LPMK, maupun Lurah. Sebaran peran responden dalam pengelolaan program BMN berdasarkan umur responden, dapat dilihat pada Grafik 2.



c. Tingkat Pendidikan

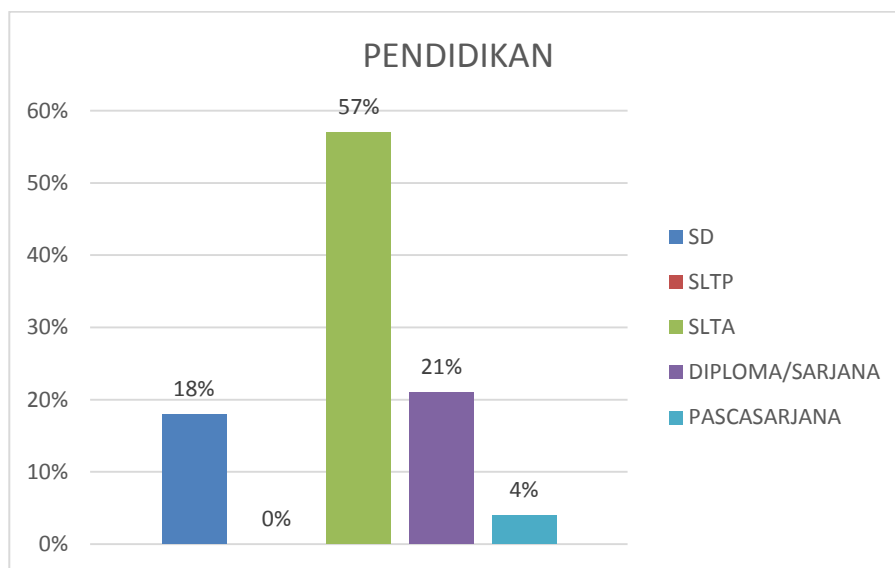
Faktor pendidikan responden juga mempengaruhi pilihan responden untuk menyampaikan aspirasi dan sikap terhadap keberadaan program BMN di wilayah mereka bertempat tinggal. Mayoritas responden yakni sejumlah 57% berjenjang pendidikan SLTA, bahkan sejumlah 21% dari responden berpendidikan sarjana dan

sejumlah 4% berpendidikan pascasarjana. Namun demikian juga terdapat sejumlah 18% dari responden berpendidikan SD. Apabila ditelusuri dari tingkat pendidikan para penerima manfaat program BMN, terlihat bahwa mayoritas responden, yakni sejumlah 84% dari responden telah mempunyai pendidikan relatif tinggi, yakni SLTA dan Diploma/Sarjana. Adapun secara kuantitatif terkait dengan tingkat pendidikan responden, dapat dilihat pada Grafik dan Tabel berikut.

Tabel 2. Sebaran Tingkat Pendidikan Responden sebagai Penerima Manfaat

No	Pendidikan Penerima Manfaat	Jumlah	Persentase (%)
1	SD	3	16
2	SLTP	0	0
3	SLTA	15	79
4	Diploma dan Sarjana	1	5
Total		19	100

Grafik 3. Sebaran Tingkat Pendidikan Responden sebagai Penerima Manfaat



Fakta ini dapat dimaknai secara umum sebagai adanya kesiapan dari sisi pendidikan responden untuk berpartisipasi dan berperan sesuai dengan tugas masing-masing dalam pengelolaan program BMN. Pendidikan yang tinggi setidaknya mengindikasikan bahwa responden mempunyai pengetahuan yang memadai tentang program BMN. Sementara dari sisi penerima manfaat, dengan tingkat pendidikan

yang tinggi akan menjadi modal untuk memperkuat posisi tawar-menawar agar program BMN sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat

d. Pekerjaan

Pekerjaan responden terbagi ke dalam pekerjaan utama dan pekerjaan sampingan. Pekerjaan utama responden tersebar ke dalam 6 (enam) pekerjaan dengan persentase antara 3% sampai dengan 29%. Sementara terkait dengan pekerjaan sampingan, 50% dari responden memilikinya dan 50% responden lainnya tidak memiliki pekerjaan sampingan. Terkait dengan data kuantitatif terkait sebaran responden menurut pekerjaan, dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3. Proporsi Sebaran Jenis Pekerjaan Utama Responden

No	Sebaran Jenis Pekerjaan Utama Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Ibu rumah tangga	8	29
2	Wirawasta	8	29
3	Guru PAUD	4	14
4	Petani	4	14
5	Mahasiswa	3	11
6	Aparatur Sipil Negara	1	3
Total Responden		28	100

Tabel 4. Proporsi Sebaran Jenis Pekerjaan Sampingan Responden

No.	Pekerjaan Sampingan Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Ada	14	50
2	Tidak ada	14	50
Total Responden		28	100

e. Peran dalam Program CSR

Dari sisi peran dalam program CSR PT Semen Padang di Kelurahan Lambung Bukit, responden terkelompok ke dalam 8 (delapan) peran yang mewakili para pemangku kepentingan. Mayoritas responden, yakni sejumlah 68% adalah para penerima manfaat, dengan keterlibatan dalam program BMN sebagai pelaku usaha mikro, garin mushala, guru, pekerja seni, dan kader yandu. Sementara sejumlah 32%

dari responden berperan bervariasi sesuai dengan komposisi pemangku kepentingan yang terkait dengan pengelolaan program CSR PT Semen Padang di Kelurahan Lambung Bukit. Secara kuantitatif, peran responden dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 5. Peran Responden dalam Pengelolaan Program BMN

No.	Peran Responden dalam Program CSR	Jumlah	Persentase (%)
1	Penerima manfaat	19	68,0
2	Pengurus Forum Pemberdayaan Masyarakat	1	3,6
3	Pengurus Lembaga Keuangan Nagari	2	7,0
4	Pembina/Ketua RT	1	3,6
5	Pembina/Ketua RW	1	3,6
6	Pembina/Lurah	1	3,6
7	Pembina/LPM	1	3,6
8	Local Community Organizer CSR	2	7,0
Total Responden		28	100,0

Berdasarkan deskripsi mengenai profil responden yang terkait dengan pengelolaan CSR PT Semen Padang di Kelurahan Lambung Bukit, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : *Pertama*, proporsi jenis kelamin relatif berimbang antara laki-laki dan perempuan; *Kedua*, mayoritas responden berada pada kisaran umur yang relatif muda dan produktif; *Ketiga*, mayoritas berpendidikan SLTA/diploma/sarjana dan ada yang pascasarjana, Bahkan untuk penerima manfaat lebih tinggi lagi persentase berpendidikan SLTA/Diploma/Sarjana; *Keempat*, sebagian responden mempunyai pekerjaan sampingan selain pekerjaan utama; serta *Kelima*, peran dari mayoritas responden adalah sebagai penerima manfaat.

6.3. Persepsi Responden terkait Keberlanjutan Pengelolaan Program CSR PT Semen Padang di Kelurahan Lambung Bukit

Pada bagian ini akan ditampilkan data kuantitatif dan secara kualitatif dalam bentuk deskripsi terkait keberlanjutan pengelolaan program CSR PT Semen Padang yang dikenal dengan istilah Basinerji Mambangun Nagari (BMN) di Kelurahan Lambung Bukit. Adapun keberlanjutan tersebut akan ditinjau dari empat aspek, yakni : kelembagaan, finansial, sosial budaya, serta lingkungan. Persepsi responden

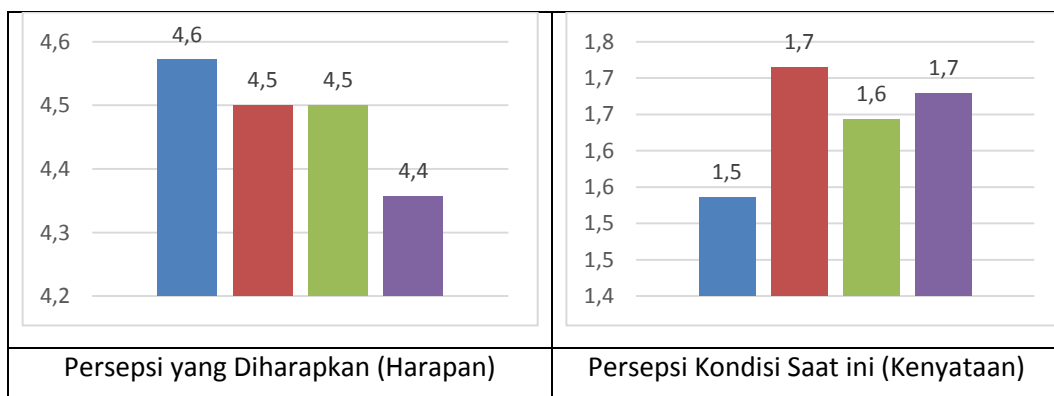
akan dilihat dari dua sisi, yakni kondisi yang diharapkan (harapan) dan kondisi saat ini (kenyataan).

6.3.1. Persepsi Pemangku Kepentingan tentang Aspek Kelembagaan

Aspek kelembagaan merupakan faktor penting dan utama dalam keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat. Demikian pentingnya aspek kelembagaan, maka pihak PT Semen Padang dalam program BMN, berinisiatif untuk menumbuhkan wadah kelembagaan di tingkat lokal untuk mengelola program. Kelembagaan lokal tersebut untuk Kelurahan Lambung Bukit terbagi ke dalam dua kelompok, yakni: *pertama*, kelembagaan lokal yang ditumbuhkan melalui program BMN. Dalam hal ini terdapat 3 kelembagaan lokal, yaitu : (1) Forum Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lambung Bukit (Forum PMKLB), (2) Lumbung Keuangan Nagari (LKN), dan Kelompok Usaha Nagari (KUN). *Kedua*, kelembagaan lokal yang sudah ada dan diperkuat dengan program BMN. Kelembagaan lokal kategori ini dikelompokkan ke dalam istilah Lembaga Sosial Ekonomi Masyarakat (LSEM), yang terdiri dari : (1) Bundo Kandang, (2) Kelompok Tani, (3) PKK, (4) Majelis Taklim, (5) Posyandu, (6) Karang Taruna, (7) Sanggar Seni Budaya, (8) Kelompok Siaga Bencana, serta (9) Komunitas Peduli Sungai.

Adapun persepsi responden terkait dengan aspek kelembagaan ini, dapat dijelaskan secara kuantitatif melalui Grafik dan Tabel serta secara kualitatif melalui deskripsi pada bagian berikut.

Grafik 4. Persepsi Responden terkait Aspek Kelembagaan



Tabel 6. Persepsi Responden terkait Aspek Kelembagaan (Kondisi Harapan)

No	Pernyataan	Jumlah Jawaban (A)					n	f(x)	$\frac{\sum f(x)}{n}$	
		STP	TP	BS	P	SP				
1	Adanya lembaga di tingkat lokal yang mengelola program dan kegiatan (mulai dari perencanaan sampai evaluasi)	0	0	0	12	16	28	128	4,6	
2	Lembaga lokal merupakan perwakilan dari berbagai kelompok masyarakat yang dipilih secara partisipatif dan transparan	0	0	1	12	15	28	126	4,5	
3	Lembaga lokal merupakan lembaga masyarakat yang mampu menampung aspirasi masyarakat	0	1	1	9	17	28	126	4,5	
4	Lembaga lokal merupakan lembaga masyarakat yang mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat ke pihak lain di luar kelurahan	0	0	2	14	12	28	122	4,4	
Jumlah										17,9
Kriteria								Sangat Penting		

Tabel 7. Persepsi Responden terkait Aspek Kelembagaan (Kondisi Saat Ini)

No.	Pernyataan	Jumlah Jawaban (B)			n	f(x)	$\frac{\sum f(x)}{n}$	
		K	C	B				
1	Adanya lembaga di tingkat lokal yang mengelola program dan kegiatan (mulai dari perencanaan sampai evaluasi)	0	11	17	28	43	1,5	
2	Lembaga lokal merupakan perwakilan dari berbagai kelompok masyarakat yang dipilih secara partisipatif dan transparan	0	8	20	28	48	1,7	
3	Lembaga lokal merupakan lembaga masyarakat yang mampu menampung aspirasi masyarakat	0	10	18	28	46	1,6	
4	Lembaga lokal merupakan lembaga masyarakat yang mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat ke pihak lain di luar kelurahan	0	9	19	28	47	1,7	
Jumlah								6,6
Kriteria						Baik		

Data kuantitatif terkait dengan kondisi yang diharapkan oleh responden sebagaimana yang terlihat pada Grafil dan Tabel diatas mengenai aspek kelembagaan dalam pengelolaan program BMN, maka kesimpulan responden tergolong pada kriteria ‘Sangat Penting’ dengan jumlah skor 17,9. Artinya responden mempunyai

harapan bahwa aspek kelembagaan menjadi aspek yang sangat penting untuk diperhatikan dalam pengelolaan program BMN di Kelurahan Lambung Bukit. Apabila ditelusuri dari setiap indikator pernyataan, maka skor tertinggi, sejumlah 4,6 terdapat pada harapan responden terkait dengan adanya lembaga di tingkat lokal yang mengelola program dan kegiatan (mulai dari perencanaan sampai evaluasi). Apabila dilihat dari persepsi responden dengan kenyataan yang dialami saat ini, persepsi responden tergolong “Baik” dengan jumlah skor 6,6. Artinya terkait dengan aspek kelembagaan sudah menjalankan fungsinya dengan baik dan sesuai dengan harapan responden. Jadi secara kualitatif dapat disimpulkan bahwa kelembagaan lokal (baik kelembagaan yang ditumbuhkan melalui program CSR BMN maupun kelembagaan yang sudah ada di masyarakat) telah berperan baik sesuai dengan fungsinya dan sesuai dengan harapan responden dalam pengelolaan program CSR BMN di Kelurahan Lambung Bukit.

Secara terperinci, argumentasi kualitatif yang mendasari kesimpulan terkait aspek kelembagaan dalam pengelolaan program CSR BMN di Kelurahan Lambung Bukit dapat dijelaskan dari persepsi responden terhadap kondisi saat ini sebagai berikut :

Pertama, mayoritas responden menilai adanya lembaga di tingkat lokal yang mengelola program dan kegiatan (mulai dari perencanaan sampai evaluasi). Program BMN telah memberi ruang bagi warga Kelurahan Lambung Bukit untuk mengelola program melalui penumbuhan lembaga lokal secara independen. Lembaga lokal ini proses pembentukannya diawali pada tahun 2015 melalui Musyawarah Warga yang diadakan di Kelurahan. Pada awalnya lembaga lokal ini dinamakan Forum Nagari, namun pada tahun 2018 berubah nama menjadi Forum PMKLB dan bertanggung jawab sebagai pengelola program Basinerji Mambangun Nagari. Selain itu, kelembagaan lokal lainnya juga ditumbuhkan dari program BMN yakni Lumbung Keuangan Nagari (LKN) yang mengelola dana program BMN. Terakhir adalah Kelompok Usaha Nagari (KUN) yang merupakan kelompok yang ditumbuhkan oleh masyarakat yang mempunyai usaha produktif dengan memanfaatkan kegiatan dana bergulir. Keberadaan ketiga kelembagaan lokal ini secara legal berdasarkan Surat Keputusan Lurah dan Camat.

Kedua, mayoritas responden menilai bahwa lembaga lokal merupakan perwakilan dari berbagai kelompok masyarakat yang dipilih secara partisipatif dan transparan. Penetapan Forum PMKLB dan LKN di Kelurahan Lambung Bukit dilakukan dalam forum Musyawarah Warga yang deklaratornya melibatkan unsur LSEM, tokoh agama/alim ulama, tokoh masyarakat/penghulu adat. Untuk mengoperasikan Forum PMKLB dan LKN, maka dipilihlah pengurus yang seluruhnya berasal dari kalangan generasi muda dengan pendidikan sarjana. Keberadaan anak muda terdidik dalam kepengurusan Forum PMKLB dan LKN ternyata mampu menghasilkan kinerja yang positif dan di apresiasi oleh pihak CSR PT Semen Padang dengan beberapa penghargaan. Kepengurusan Forum PMKLB dan LKN berlaku selama periode waktu 2015-2019. Sementara itu, KUN kepengurusannya disepakati di tingkat kelompok yang strukturnya terdiri dari rapat anggota, ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota. Saat ini untuk Kelurahan Lambung Bukit sudah ada dua KUN, yakni KUN Banang Sahalai dengan 6 orang anggota dan KUN Tanjung Sepakat dengan 10 orang anggota.

Ketiga, mayoritas responden menilai bahwa lembaga lokal merupakan lembaga masyarakat yang mampu menampung aspirasi masyarakat. Forum PMKLB secara partisipatif melakukan proses penjaringan aspirasi masyarakat melalui beberapa tahapan kegiatan, yakni : (1) penjaringan aspirasi masyarakat dalam rentang waktu 5 tahun ke depan melalui kegiatan pemetaan swadaya/pemetaan sosial untuk penyusunan *Community Action Plan* (CAP) berjangka waktu 5 tahun, (2) penjaringan aspirasi masyarakat untuk satu tahun melalui kegiatan penyusunan dokumen Rencana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (RKPM) berjangka waktu 1 tahun, (3) pembahasan aspirasi masyarakat melalui kegiatan Forum Musyawarah Warga yang di kenal dengan istilah Musyawarah Kito (Muskito) untuk membahas CAP dan RKPM, serta (4) penyusunan dan penilaian kelayakan proposal usulan kegiatan dari masyarakat melalui LSEM dan KUN sesuai dengan usulan RKPM. Melalui proses yang berjenjang tersebut, maka Forum PMKLB berperan untuk melakukan seleksi setiap usulan aspirasi masyarakat secara partisipatif sampai dihasilkannya skala prioritas kegiatan. Sementara LKN berperan menindaklanjuti hasil perencanaan dalam kegiatan penyusunan proposal kegiatan dan pengelolaan finansial untuk seluruh kegiatan setelah disetujui oleh pihak CSR PT Semen Padang.

Dalam rentang waktu 3 tahun terakhir, terdapat dua hal yang perlu dicermati terkait dengan aspirasi masyarakat, yakni : secara umum aspirasi masyarakat masih di dominasi oleh usulan pembangunan fisik, sementara PT Semen Padang lebih menekankan program pada kegiatan pemberdayaan. Walaupun demikian dalam 3 dokumen perencanaan tahunan (RKPM) berdasarkan usulan tahun 2015, 2016, dan 2017 sudah ada kecenderungan peningkatan proporsi kegiatan pemberdayaan. Lalu aspirasi masyarakat cenderung diakomodir seluruhnya sehingga dana program BMN terbagi bagi dalam jumlah yang kecil dan akibatnya nilai manfaat kegiatan menjadi terbatas dan tidak fokus.

Keempat, mayoritas responden menilai bahwa lembaga lokal merupakan lembaga masyarakat yang mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat ke pihak lain di luar kelurahan. Dalam hal ini, setelah aspirasi masyarakat dibahas dan disepakati di Forum Muskito menjadi dokumen RKPM Tahunan, selanjutnya LKN memproses aspirasi masyarakat ke tahap pengajuan usulan proposal kegiatan. Lalu usulan proposal kegiatan inilah yang diperjuangkan Forum PMKLB ke pihak CSR PT Semen Padang untuk didanai. Proses advokasi terhadap aspirasi masyarakat dilakukan oleh Forum PMKLB bersama CDO/LCO ke Kepala Biro CSR/Kepala Bidang Keuangan dan Administrasi PT Semen Padang. Pada tahap ini proposal usulan kegiatan bisa langsung disetujui atau perlu dilakukan revisi. Bila langsung disetujui, maka akan di proposal akan di proses untuk didanai (*financial action*), dan terakhir dana akan di transfer ke rekening Forum PMKLB dan juga ke rekening LKN untuk disalurkan ke penerima manfaat.

Walaupun dari aspek kelembagaan terkait keberlanjutan program CSR PT Semen Padang telah dipersepsikan “baik” menurut persepsi responden, namun masih terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan, yakni: *Pertama*, kelembagaan lokal yang ada dan telah mendapat mandat dari masyarakat, perlu diberikan otoritas yang lebih luas dari sisi perencanaan dan penganggaran program BMN yang terintegrasi oleh pihak PT Semen Padang sehingga keberadaan Forum PMKLB lebih diakui oleh masyarakat dan juga para pemangku kepentingan lainnya; *Kedua*, adanya inisiatif dari Forum PMKLB untuk melakukan kolaborasi dengan 8 institusi terkait dengan program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Lambung Bukit, sehingga peluang sumber pembiayaan program pemberdayaan masyarakat dan

penerima manfaat menjadi lebih luas, serta: *Ketiga*, kelembagaan lokal yang ada perlu diperkuat perannya dalam perencanaan pembangunan kelurahan dan tidak terbatas hanya pada perencanaan program CSR PT Semen Padang saja, apalagi dengan adanya Program Dana Kelurahan pada tahun 2019.

6.3.2. Persepsi Pemangku Kepentingan tentang Aspek Finansial

Aspek finansial merupakan faktor penting lainnya setelah aspek kelembagaan dalam keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat. Pentingnya aspek finansial terkait dengan dukungan pembiayaan agar program pemberdayaan masyarakat yang sudah direncanakan bisa dilaksanakan secara optimal dan bermanfaat bagi masyarakat. Adapun persepsi responden terkait dengan aspek finansial ini, dapat dijelaskan secara kuantitatif melalui Tabel dan Grafik serta secara kualitatif melalui deksripsi pada bagian berikut.

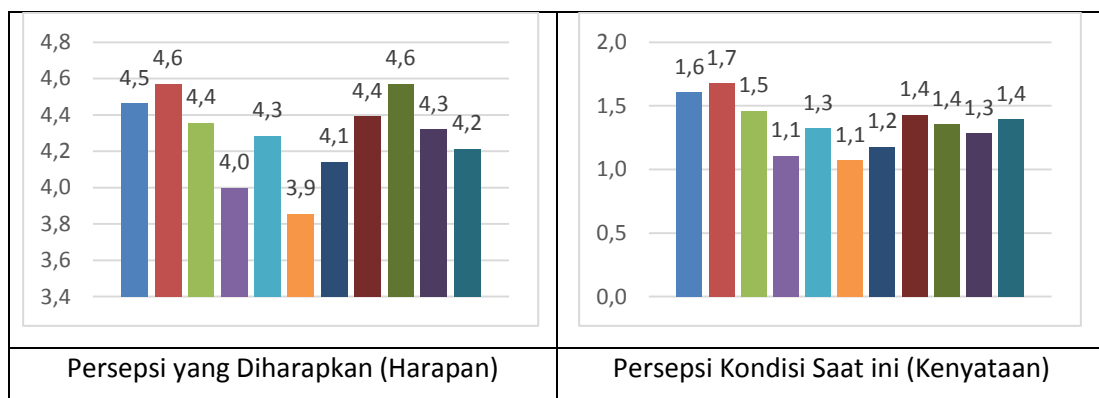
Tabel 8. Persepsi Responden terkait Aspek Finansial (Kondisi Harapan)

No.	Pernyataan	Jumlah Jawaban (A)					n	f(x)	$\frac{\sum f(x)}{n}$
		STP	TP	BS	P	SP			
1	Adanya lembaga di tingkat lokal yang mengelola keuangan	0	0	3	9	16	28	125	4,5
2	Lembaga pengelola keuangan mempunyai pedoman tertulis dalam mengelola (SOP, dll)	0	0	1	10	17	28	128	4,6
3	Kegiatan dana bergulir untuk pengembangan usaha ekonomi masyarakat	0	1	3	9	15	28	122	4,4
4	Sanksi dan penghargaan bagi peminjam dan bergulir	1	0	4	16	7	28	112	4,0
5	Peminjaman tanpa agunan (jaminan)	1	1		13	13	28	120	4,3
6	Mekanisme tanggung renteng bila terjadi gagal bayar di kelompok	0	2	5	16	5	28	108	3,9
7	Sistem bagi hasil antara pengelola pinjaman dengan peminjam	0	3	5	9	13	28	116	4,1
8	Prinsip transparansi dan akuntabilitas dari pengelola	0	0	3	11	14	28	123	4,4
9	Usaha yang dibiayai program dana bergulir beruntung secara optimal	0	0	3	12	16	28	128	4,6
10	Makin meningkatnya proporsi dana swadaya masyarakat dalam program	0	1	2	12	13	28	121	4,3
11	Pendapatan yang diperoleh dari dana bergulir dijadikan sebagai tambahan modal lembaga selain untuk biaya operasional	0	1	3	13	11	28	118	4,2
Jumlah								47,18	
Kriteria								Sangat Penting	

Tabel 9. Persepsi Responden terkait Aspek Finansial (Kondisi Realitas)

No.	Pernyataan	Jumlah Jawaban (B)			n	f(x)	$\frac{\sum f(x)}{n}$
		T	C	A			
1	Adanya lembaga di tingkat lokal yang mengelola keuangan	1	9	18	28	45	1,6
2	Lembaga pengelola keuangan mempunyai pedoman tertulis dalam mengelola (SOP, dll)	0	9	19	28	47	1,7
3	Kegiatan dana bergulir untuk pengembangan usaha ekonomi masyarakat	1	13	14	28	41	1,5
4	Sanksi dan penghargaan bagi peminjam dan bergulir	2	21	5	28	31	1,1
5	Peminjaman tanpa agunan (jaminan)	2	15	11	28	37	1,3
6	Mekanisme tanggung renteng apabila terjadi gagal bayar di kelompok	5	16	7	28	30	1,1
7	Sistem bagi hasil antara pengelola pinjaman dengan peminjam	5	13	10	28	33	1,2
8	Prinsip transparansi dan akuntabilitas (pengelola bertanggung jawab secara transparan kepada masyarakat dan multipihak)	4	8	16	28	40	1,4
9	Usaha yang dibiayai program dana bergulir memperoleh keuntungan optimal	4	10	14	28	38	1,4
10	Makin meningkatnya proporsi dana swadaya masyarakat dalam program	4	12	12	28	36	1,3
11	Pendapatan yang diperoleh dari dana bergulir dijadikan sebagai tambahan modal lembaga selain untuk biaya operasional	3	11	14	28	39	1,4
Jumlah							14,9
Kriteria							Baik

Grafik 5. Persepsi Responden terkait Aspek Finansial



Demikian pentingnya aspek finansial, maka pihak PT Semen Padang dalam program BMN, berinisiatif untuk menumbuhkan wadah kelembagaan di tingkat lokal. Kelembagaan lokal terkait pengelolaan finansial dari program CSR PT Semen

Padang terbagi dua, yakni Forum PMKLB yang mengelola program setelah di proses di Forum Muskito (RKPM Tahunan), serta LKN yang mengelola finansial program, mulai dari penyusunan proposal kegiatan, pemanfaatan dana program yang akan dimanfaatkan LSEM, serta kegiatan simpan pinjam melalui kegiatan KUN.

Data kuantitatif terkait dengan kondisi yang diharapkan oleh responden sebagaimana yang terlihat pada Grafik dan Tabel mengenai aspek finansial dalam pengelolaan program BMN, maka kesimpulan responden tergolong pada kriteria ‘Sangat Penting’ dengan jumlah skor 47,18. Artinya responden mempunyai harapan bahwa aspek finansial menjadi aspek yang sangat penting untuk diperhatikan dalam pengelolaan program BMN di Kelurahan Lambung Bukit. Apabila ditelusuri dari setiap indikator pernyataan, maka skor tertinggi, sejumlah 4,6 terdapat pada harapan responden terkait dengan lembaga pengelola keuangan mempunyai pedoman tertulis dalam mengelola (SOP, dll) serta usaha yang dibiayai program dana bergulir memperoleh keuntungan optimal.

Apabila dilihat dari persepsi responden dengan kenyataan yang dialami saat ini, persepsi responden tergolong “Baik” dengan jumlah skor 14,9. Artinya terkait dengan aspek finansial sudah menjalankan fungsinya dengan baik dan sesuai dengan harapan responden. Jadi secara kualitatif dapat disimpulkan bahwa aspek finansial sudah dikelola dengan transparan dan akuntabel sesuai dengan harapan responden dalam pengelolaan finansial pada program BMN di Kelurahan Lambung Bukit.

Secara terperinci, argumentasi kualitatif yang mendasari kesimpulan terkait aspek finansial dalam pengelolaan program CSR BMN di Kelurahan Lambung Bukit, dapat dijelaskan dari persepsi responden terhadap kondisi saat ini sebagai berikut : *Pertama*, mayoritas responden menilai bahwa ada lembaga di tingkat lokal yang mengelola keuangan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa program BMN menekankan prinsip partisipatif, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Prinsip partisipatif diwujudkan dengan melalui penumbuhan lembaga lokal yang mengelola finansial, mulai dari penyusunan proposal kegiatan, mengajukan proposal kegiatan sampai di setuju, pendampingan, dan monev pemanfaatan dana, serta penyusunan laporan finansial kegiatan. Lembaga lokal yang ditumbuhkan adalah LKN dan KUN.

Kedua, mayoritas responden menilai bahwa lembaga pengelola keuangan sudah mempunyai pedoman tertulis dalam mengelola (SOP, dll). Dokumen pedoman pengelolaan finansial dari program BMN dibutuhkan untuk menjadi panduan bagi multi pihak agar dalam pengelolaannya tetap berada dalam aturan yang disepakati. Faktanya, dalam program BMN sudah diterbitkan beberapa dokumen terkait dengan pengelolaan finansial, yakni :

- a) Dokumen Standard Operating Procedure (SOP) CSR PT Semen Padang Basinergi Mambangun Nagari berjudul “Lumbung Keuangan Nagari (LKN)” dengan nomor dokumen 10/SOP/PT/CSR/SP/2015. Dokumen ini memuat secara lengkap tata kelola finansial program BMN oleh LKN, yang meliputi : (1) Pengertian, (2) Tujuan, (3) Komunitas Sasaran, (4) Penanggung Jawab, (5) Pelaksana, (6) Keluaran, (7) Indikator Kinerja, (8) Sistem Dokumentasi, (9) Pelaksanaan Kegiatan, serta (10) Lampiran. Adapun bagian Lampiran meliputi : (1) Berita Acara Pembentukan Tim Seleksi Calon Pengelola LKN, (2) Pengelola LKN, serta (3) Penilaian Kinerja LKN.
- b) Dokumen Standard Operating Procedure (SOP) CSR PT Semen Padang Basinergi Mambangun Nagari berjudul “Penyusunan Proposal Kegiatan” dengan nomor dokumen 12/SOP/PT/CSR/SP/2015. Dokumen ini memuat secara lengkap tata kelola penyusunan proposal kegiatan, yang meliputi : (1) Pengertian, (2) Ketentuan Dasar, (3) Tujuan, (4) Waktu Pelaksanaan Penilaian, (5) Penanggung Jawab, (6) Pelaksana, (7) Keluaran, (8) Indikator Kinerja, Sistem (9) Dokumentasi, (10) Pelaksanaan Kegiatan, (11) Lampiran. Adapun bagian Lampiran terdiri dari : (1) Rekapitulasi Daftar Usulan Proposal LSEM/KUN/ Panitia Pelaksana, (2) Rekapitulasi hasil Penilaian Kelayakan Proposal Kegiatan LSEM/KUN/ Panitia Pelaksana, (3) Memo Analisa Pembiayaan untuk Usaha Ekonomi, (4) Pedoman Penyusunan Proposal (Non Ekonomi), (5) Contoh Proposal Teknis.

Ketiga, baru sebagian responden yang menilai bahwa kegiatan dana bergulir ditujukan untuk pengembangan usaha ekonomi masyarakat di Kelurahan Lambung Bukit. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kegiatan dana bergulir sudah

dilakukan melalui wadah KUN dengan sasaran penerima manfaat pelaku usaha mikro. Kegiatan dana bergulir ini diawali dengan inisiatif warga miskin yang berminat dan mempunyai usaha mikro untuk menumbuhkan kelompok, yang dikenal dengan istilah Kelompok Usaha Nagari (KUN). Saat ini di Kelurahan Lambung Bukit terdapat 2 KUN (Banang Sahalai dan Tanjung Sepakat). Kedua KUN ini sudah memperoleh pembiayaan usaha dalam 2-3 tahap. KUN Banang Sahalai telah memperoleh dana bergulir dalam 2 tahap pada tahun 2016 (6 anggota dengan total pinjaman Rp 18.880.000) dan tahun 2018 (6 anggota dengan total pinjaman Rp 21.240.000). Sedangkan untuk KUN Tanjung Sepakat telah memperoleh dana bergulir dalam 3 tahap, mulai pada tahun 2016 (10 anggota dengan total pinjaman Rp 28.000.000), tahun 2017 (Rp 27.440.000) dan tahun 2018 (5 anggota dengan total pinjaman Rp 19.220.000). Khusus untuk pembiayaan modal usaha per orang dengan nilai diatas Rp 5 juta rupiah, prosedurnya langsung diajukan ke Biro CSR PT Semen Padang melalui Forum PMKLB tingkat kecamatan sesuai dengan mekanisme program kemitraan/PKBL PT Semen Padang. Namun sebagian responden lagi belum merasakan manfaat dari kegiatan dana bergulir untuk pengembangan usaha mereka. Keterbatasan dana yang dikelola LKN menyebabkan sektor usaha masyarakat lainnya belum memperoleh akses pembiayaan, khususnya usaha di sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, dan perkebunan rakyat).

Keempat, mayoritas responden menilai bahwa sanksi dan penghargaan bagi peminjam dan bergulir belum dilakukan secara optimal, padahal merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kedisiplinan masyarakat dalam melakukan peminjaman dan pengembalian pinjaman mikro. Sejak program KUN ini dilaksanakan, belum terjadi adanya kemacetan pengembalian sehingga belum ada sanksi yang diberlakukan. Hal ini terjadi karena kedisiplinan pada penerima manfaat dan juga pendampingan intensif dari LKN terhadap KUN. Namun belum ada juga penghargaan yang diberikan bagi peminjam yang paling disiplin.

Kelima, lebih dari sebagian responden menilai bahwa perlu dilakukan sistem peminjaman dengan agunan. Fakta ini disebabkan karena kurang tahu dan kurang pahamiya responden terkait sistem peminjaman yang lebih berpihak pada pelaku usaha mikro. Padahal kelompok sasaran dari kegiatan dana bergulir adalah rumah

tangga miskin yang tidak punya asset yang bisa dijaminan sehingga sistem peminjaman yang diberlakukan adalah tanpa agunan (jaminan). Fakta lainnya, seluruh penerima program merupakan rumah tangga miskin yang ada di Kelurahan Lambung Bukit yang telah melalui proses seleksi yang berjenjang sehingga program sesuai dengan sasaran yang dituju.

Keenam, mayoritas responden menilai bahwa mekanisme tanggung renteng belum diperlukan apabila terjadi gagal bayar di kelompok. Penilaian ini timbul disebabkan karena kurang tahu dan kurang pahamnya responden terhadap mekanisme yang berpihak pada pelaku usaha mikro tersebut. Mekanisme ini merupakan salah satu upaya untuk membangun sistem pengawasan antar sesama peminjam dalam satu kelompok. Dengan sistem ini, sesama peminjam akan saling bertanggung jawab dalam kelompok agar tidak terjadi gagal bayar. Bila terjadi, maka seluruh anggota kelompok menanggung kegagalan bayar dari anggotanya. Selain itu dengan sistem ini juga akan meringankan pekerjaan pengelola program dalam melakukan pengawasan penggunaan pinjaman agar sesuai dengan usulan untuk usaha produktif sehingga mampu membayar dan melunasi. Mekanisme ini belum diterapkan dalam pengelolaan program finansial di LKN Kelurahan Lambung Bukit.

Ketujuh, lebih sebagian dari responden menilai bahwa sistem bagi hasil antara pengelola pinjaman dengan peminjam belum diperlukan. Fakta ini disebabkan karena kurang tahu dan kurang pahamnya responden dengan manfaat dari sistem yang berpihak pada pelaku usaha mikro ini. Sistem ini sebenarnya menempatkan masyarakat sebagai peminjam dengan pengelola dalam posisi yang setara dengan hak dan kewajiban yang setara. Dengan kata lain, saling berbagi manfaat dan juga saling berbagi resiko. Namun sistem yang sebenarnya sesuai dengan praktek ekonomi Islam ini, belum diterapkan dalam program simpan pinjam di LKN. Alhasil, para peminjam masih dibebani dengan bunga walaupun dengan jumlah yang terbatas yang tentu saja lebih ringan sehingga mampu membebaskan masyarakat dari pinjaman berbunga tinggi yang dilakukan oleh pihak lain di Kelurahan Lambung Bukit.

Kedelapan, lebih dari sebagian responden menilai bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas (pengelola bertanggung jawab secara transparan kepada masyarakat dan multipihak) sudah dipraktekkan dalam kegiatan LKN. Prinsip transparansi dan

akuntabilitas menjadi hal yang mendasar dalam pengelolaan finansial pada program BMN. Prinsip transparansi diwujudkan dengan transparannya setiap proses terkait pengelolaan finansial dan laporan penggunaan dana dipublikasikan kepada multi pihak yang terlibat dalam program CSR BMN di Kelurahan Lambung Bukit. Sedangkan prinsip akuntabilitas diwujudkan dalam bentuk pertanggungjawaban pengelolaan finansial ke penerima manfaat serta multi pihak yang terlibat dalam program CSR BMN di Kelurahan Lambung Bukit.

Kesembilan, sebagian responden menilai bahwa usaha yang dibiayai program dana bergulir sudah memperoleh keuntungan optimal dan sebagian lagi menilai belum. Pinjaman yang diperoleh masyarakat apabila dimanfaatkan untuk kegiatan memulai usaha atau pengembangan usaha, tentu berdampak pada meningkatnya produktifitas dan keuntungan usaha. Dari pinjaman yang digulirkan, belum secara nyata memberikan keuntungan bagi seluruh peminjam, namun sudah ada beberapa peminjam yang berhasil meningkatkan skala usaha rumahtangganya sehingga keuntungannyapun meningkat.

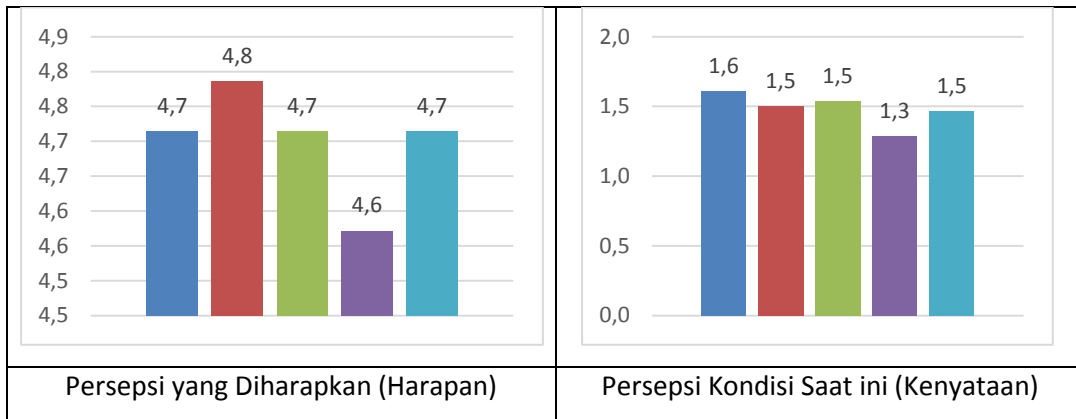
Kesepuluh, lebih sebagian responden menilai bahwa proporsi dana swadaya masih kurang dan sisanya menilai bahwa proporsi dana swadaya makin meningkat dalam program. Terjadinya peningkatan proporsi dana swadaya atau dana mandiri dari masyarakat merupakan salah satu indikator dari keberhasilan program dan kegiatan pemberdayaan. Dengan tingginya proporsi dana swadaya, maka masyarakat diharapkan akan punya rasa memiliki dan bertanggung jawab untuk mengelola dana swadaya untuk peningkatan skala usaha. Fakta di lapangan memperlihatkan bahwa pendanaan untuk program pinjaman yang di kelola LKN masih tergantung pada dana program yang digulirkan oleh program CSR BMN.

Kesebelas, sebagian responden menilai bahwa pendapatan yang diperoleh dari dana bergulir belum dijadikan sebagai tambahan modal selain untuk biaya operasional dan sebagian lagi menilai sebaliknya. Dengan belum adanya proporsi dana swadaya yang dikelola oleh LKN, maka pendapatan yang diperoleh dari perguliran dana juga belum ada. Selain itu, tambahan modal dari lembaga lain selain dari program CSR BMN juga belum ada. Sejak kegiatan pinjaman bergulir untuk usaha mikro ini dimulai, biaya operasional pengelola LKN baru bisa diperoleh dari alokasi dana yang diperuntukkan dari program CSR BMN setiap tahun.

6.3.3. Persepsi Pemangku Kepentingan tentang Aspek Sosial Budaya

Adapun persepsi responden terkait dengan aspek sosial budaya dalam pengelolaan program CSR BMN di Kelurahan Lambung Bukit, dapat dijelaskan secara kuantitatif melalui Tabel dan Grafik serta secara kualitatif melalui deksripsi pada bagian berikut.

Grafik 6. Persepsi Responden terkait Aspek Sosial Budaya



Tabel 10. Persepsi Responden terkait Aspek Sosial Budaya (Kondisi Harapan)

No	Pernyataan	Jumlah Jawaban (A)					n	f(x)	$\frac{\sum f(x)}{n}$
		STP	TP	BS	P	SP			
1	Adanya kegiatan yang menggali dan mengelola potensi budaya setempat (kearifan lokal, pengetahuan lokal, seni, adat istiadat, bahasa, dll)	0	0	1	6	21	28	132	4,7
2	Rasa saling percaya dan gotong royong sebagai sesuatu kekuatan	0	0	0	6	22	28	134	4,8
3	Pendidikan dan kesehatan menjadi perhatian utama dalam program	0	0	0	9	19	28	132	4,7
4	Partisipasi masyarakat dalam seluruh tahapan kegiatan (perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi)	0	0	0	12	16	28	128	4,6
5	Perhatian terhadap kelompok warga kurang mampu, berkebutuhan khusus, dan kelompok warga yang memerlukan perhatian khusus.	0	0	0	8	20	28	132	4,7
Jumlah								23,5	
Kriteria								Sangat Penting	

Tabel 11. Persepsi Responden terkait Aspek Sosial Budaya (Kondisi Realitas)

No	Pernyataan	Jumlah Jawaban (B)			n	f(x)	$\frac{\sum f(x)}{n}$
		T	C	A			
1	Adanya kegiatan yang menggali dan mengelola potensi budaya setempat (kearifan lokal, pengetahuan lokal, seni, adat istiadat, bahasa)	0	11	17	28	45	1,6
2	Rasa saling percaya dan gotong royong sebagai sesuatu kekuatan	0	14	14	28	42	1,5
3	Pendidikan dan kesehatan menjadi perhatian utama dalam program	1	11	16	28	43	1,5
4	Partisipasi masyarakat dalam seluruh tahapan kegiatan (perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi)	2	16	10	28	36	1,3
5	Perhatian terhadap kelompok warga kurang mampu, berkebutuhan khusus, dan kelompok warga yang memerlukan perhatian khusus.	3	9	16	28	41	1,5
Jumlah							7,4
Kriteria							Baik

Aspek sosial budaya merupakan aspek yang menjadi pondasi dalam program pemberdayaan melalui CSR. Aspek sosial budaya terkait dengan sejauhmana program CSR memperoleh kepercayaan dari komunitas dan masyarakat sehingga komunitas dan masyarakat mau berinisiatif untuk berpartisipasi dalam program. Partisipasi tersebut dilakukan dalam setiap tahapan program, mulai dari persiapan, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, serta evaluasi. Selain itu, program CSR juga perlu memperhatikan aspek budaya setempat, baik pengetahuan lokal, kearifan lokal, adat istiadat, seni, bahasa, dll.

Data kuantitatif terkait dengan kondisi yang diharapkan oleh responden sebagaimana yang terlihat pada Grafil dan Tabel diatas mengenai aspek sosial budaya dalam pengelolaan program BMN, maka kesimpulan responden tergolong pada kriteria ‘Sangat Penting’ dengan jumlah skor 23,5. Artinya responden mempunyai harapan bahwa aspek sosial budaya menjadi aspek yang sangat penting untuk diperhatikan dalam pengelolaan program BMN di Kelurahan Lambung Bukit. Apabila ditelusuri dari setiap indikator pernyataan, maka skor tertinggi, sejumlah 4,8 terdapat pada harapan responden terkait dengan adanya rasa saling percaya dan gotong royong antar warga sebagai sebuah kekuatan kolektif untuk membangun. Apabila dilihat dari persepsi responden dengan kenyataan yang dialami saat ini, persepsi responden tergolong “Baik” dengan jumlah skor 6,6. Artinya terkait dengan

aspek sosial budaya sudah menjalankan fungsinya dengan baik dan sesuai dengan harapan responden. Jadi secara kualitatif dapat disimpulkan bahwa program CSR BMN yang terkait dengan kegiatan sosial budaya telah ada dan dikelola baik sesuai dengan fungsinya dan sesuai dengan harapan responden dalam pengelolaan program BMN di Kelurahan Lambung Bukit.

Secara terperinci, argumentasi yang mendasari kesimpulan terkait BMN di Kelurahan Lambung Bukit dapat dijelaskan dari persepsi responden terhadap kondisi saat ini sebagai berikut :

Pertama, lebih dari sebagian responden menilai bahwa sudah ada kegiatan yang menggali dan mengelola potensi budaya setempat (kearifan lokal, pengetahuan lokal, seni, adat istiadat, bahasa, dll), artinya program CSR BMN sudah memberi ruang bagi pengembangan potensi budaya setempat. Hal ini dibuktikan dengan adanya kegiatan yang terkait dengan budaya yang dibiayai dari program, misalnya pengadaan peralatan seni dan adat istiadat serta renovasi lapangan untuk kegiatan seni dan adat istiadat di tiga sanggar seni yang ada di Kelurahan Lambung Bukit. Bagi responden yang menilai cukup dibuktikan dengan kegiatan terkait potensi budaya setempat yang belum dikembangkan secara optimal, fokus, dan berkelanjutan.

Kedua, hasil penilaian responden cenderung berimbang antara cukup dengan baik terkait dengan sikap saling percaya dan gotong royong sebagai sesuatu kekuatan. Baiknya sikap saling percaya dan gotong royong dibuktikan dengan masih lestarnya kegiatan yang dikenal dengan julo-julo dan kongsi sosial di Kelurahan Lambung Bukit. Di satu keluarga ada yang ikut 4 jenis kegiatan julo-julo, yakni untuk membangun/rehabilitasi rumah, biaya pernikahan, peralatan rumah tangga, maupun mengolah lahan pertanian. Secara bergiliran antar warga saling bergotong royong untuk menuntaskan kegiatan tersebut. Sementara itu, kongsi sosial terkait dengan kegiatan penyelenggaraan kematian yang biasanya dihadiri oleh banyak warga sebagai tanda ikut berduka. Pada sisi yang lain, masih adanya konflik dalam kelompok tani, maupun sikap apatis masyarakat adalah contoh dari masih belum optimalnya rasa saling percaya. Kegiatan gotong royong, baik untuk kegiatan sosial, budaya, lingkungan, maupun ekonomi belum optimal menjadi saluran

bersama antar masyarakat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sosial, budaya, lingkungan, maupun ekonomi yang terjadi di Kelurahan Lambung Bukit.

Ketiga, lebih dari sebagian responden menilai bahwa pendidikan dan kesehatan menjadi perhatian utama dalam program. Faktanya dalam tiga tahun program CSR BMN, sudah ada beberapa kegiatan yang dilakukan untuk bidang pendidikan dan kesehatan. Beberapa diantaranya adalah beasiswa/bantuan biaya pendidikan, revitalisasi posyandu, dan sekolah hijau. Namun sebagian responden lainnya menilai kegiatan tersebut masih belum memadai untuk menyelesaikan berbagai masalah pendidikan dan kesehatan yang melingkupi Kelurahan Lambung Bukit. Masih tingginya angka pengangguran generasi muda terdidik, masih rendahnya kesadaran warga akan kesehatan diri/lingkungan, serta kesulitan dalam melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi merupakan beberapa masalah yang membutuhkan jalan keluar untuk diatasi.

Keempat, lebih dari sebagian responden menilai bahwa partisipasi masyarakat dalam seluruh tahapan kegiatan (perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi) masih belum baik. Fakta menunjukkan bahwa secara prosedural, sudah ada ruang yang disediakan untuk partisipasi masyarakat, namun baru pada tahap perencanaan dan pelaksanaan. Dalam prakteknya partisipasi pada tahap perencanaan ini masih didominasi oleh kelompok masyarakat elit/punya akses dan belum menyentuh kelompok masyarakat yang kurang berdaya (rentan, terisolasi, maupun berkebutuhan khusus). Umpan balik dan diskusi dinamis belum terjadi karena masih terbatasnya inisiatif dan daya kritis masyarakat untuk memperjuangkan hak mereka dalam pembangunan. Sementara pada tahap monitoring dan evaluasi belum dilakukan secara partisipatif dan hanya melibatkan pihak CSR PT Semen Padang dan kelembagaan lokal yang ditugaskan serta aparat kelurahan.

Kelima, lebih dari sebagian responden menilai bahwa perhatian terhadap kelompok warga kurang mampu, berkebutuhan khusus, dan kelompok warga yang memerlukan perhatian khusus lainnya sudah baik. Faktanya program CSR BMN, khususnya kegiatan dana bergulir yang dikelola LKN memang diperuntukkan untuk warga kurang mampu agar mempunyai usaha mikro. Namun untuk kelompok warga berkebutuhan khusus belum menjadi perhatian untuk diberdayakan. Begitu pula masih cukup banyak dengan warga kurang mampu lainnya yang belum di akses oleh

kegiatan dana bergulir mengingat keterbatasan ketersediaan dana yang digulirkan. Selain itu masih rendahnya kesadaran masyarakat akan kegiatan pemberdayaan sehingga menganggap dana bergulir adalah bantuan lepas.

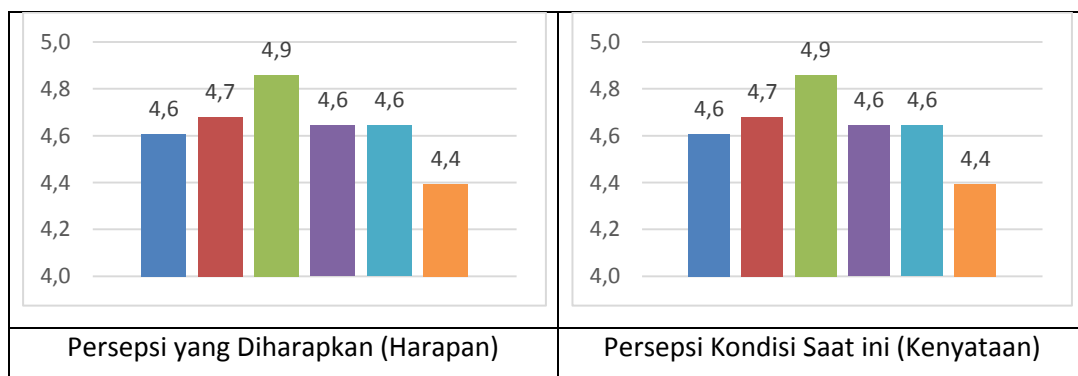
6.3.4. Persepsi Pemangku Kepentingan tentang Aspek Lingkungan

Aspek lingkungan merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam program CSR. Adapun persepsi responden terkait dengan aspek lingkungan dalam pengelolaan program CSR BMN di Kelurahan Lambung Bukit, dapat dijelaskan secara kuantitatif pada Tabel dan Grafik serta secara kualitatif pada bagian berikut.

Tabel 12. Persepsi Responden terkait Aspek Lingkungan (Kondisi Harapan)

No	Pernyataan	Jumlah Jawaban (A)					n	f(x)	$\frac{\sum f(x)}{n}$
		STP	TP	BS	P	SP			
1	Pemanfaatan limbah untuk usaha produktif	1	0	0	7	20	28	129	4,6
2	Edukasi untuk siswa/masyarakat tentang pengelolaan limbah	0	0	0	9	19	28	131	4,7
3	Perubahan prilaku hidup sehat dan bersih	0	0	0	4	24	28	136	4,9
4	Perlindungan terhadap kuantitas/kualitas air (irigasi, kolam, dan biopori)	0	0	0	10	18	28	130	4,6
5	Masyarakat berpartisipasi aktif dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan	0	0	1	8	19	28	130	4,6
6	Pengelolaan limbah dan sampah secara berkelanjutan (bank sampah, rumah kompos)	1	0	2	9	16	28	123	4,4
Jumlah									27,8
Kriteria									Sangat Penting

Grafik 7. Persepsi Responden terkait Aspek Lingkungan



Tabel 13. Persepsi Responden terkait Aspek Lingkungan (Kondisi Realitas)

No	Pernyataan	Jumlah Jawaban (B)			n	f(x)	$\frac{\sum f(x)}{n}$
		TT	BA	SA			
1	Pemanfaatan limbah untuk usaha produktif	10	12	6	28	24	0,9
2	Edukasi untuk siswa dan masyarakat tentang pengelolaan limbah	7	13	8	28	29	1,0
3	Perubahan perilaku hidup sehat dan bersih	5	15	8	28	27	1,0
4	Perlindungan terhadap kuantitas dan kualitas air (irigasi, kolam, biopori)	6	14	8	28	30	1,1
5	Masyarakat berpartisipasi aktif dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan	6	12	10	28	32	1,1
6	Pengelolaan limbah dan sampah secara berkelanjutan (bank sampah, rumah kompos)	11	12	5	28	32	1,1
Jumlah							6,2
Kriteria							Cukup

Data kuantitatif terkait dengan kondisi yang diharapkan oleh responden sebagaimana yang terlihat pada Grafil dan Tabel diatas mengenai aspek lingkungan dalam pengelolaan program CSR BMN, maka kesimpulan responden tergolong pada kriteria ‘Sangat Penting’ dengan jumlah skor 27,8. Artinya responden mempunyai harapan bahwa aspek lingkungan menjadi aspek yang sangat penting untuk diperhatikan dalam pengelolaan program CSR BMN di Kelurahan Lambung Bukit. Apabila ditelusuri dari setiap indikator pernyataan, maka skor tertinggi, sejumlah 4,9 terdapat pada harapan responden terkait dengan adanya perubahan perilaku warga masyarakat untuk hidup sehat dan bersih. Apabila dilihat dari persepsi responden dengan kenyataan yang dialami saat ini, persepsi responden tergolong “Cukup” dengan jumlah skor 6,2. Artinya terkait dengan aspek lingkungan belum menjalankan fungsinya dengan baik dan sesuai dengan harapan responden. Jadi secara kualitatif dapat disimpulkan bahwa aspek lingkungan belum optimal diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan pada program CSR BMN sebagaimana harapan responden di Kelurahan Lambung Bukit.

Secara terperinci, argumentasi yang mendasari kesimpulan terkait aspek lingkungan dari program CSR BMN di Kelurahan Lambung Bukit dapat dijelaskan dari persepsi responden terhadap kondisi saat ini sebagai berikut :

Pertama, mayoritas responden menilai bahwa kegiatan dalam program CSR BMN terkait pemanfaatan limbah untuk usaha produktif belum dilakukan dan walau

sudah ada, pelaksanaannya juga belum optimal. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kegiatan pemanfaatan limbah untuk usaha produktif masih dilakukan atas inisiatif warga, misalnya di Kampung Sungkai terdapat kelompok tani yang memanfaatkan fasilitas Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) bantuan pemerintah Kota Padang tahun 2014 lalu untuk memproduksi pupuk organik. Namun pupuk yang dihasilkan jumlahnya terbatas untuk pemenuhan kebutuhan petani anggota kelompok. Usaha kerajinan dari limbah rumah tangga juga sudah mulai dirintis namun belum memperoleh akses untuk pengembangannya menjadi usaha mikro di rumah tangga maupun komunitas (PKK, KWT, karang taruna).

Kedua, mayoritas responden menilai bahwa kegiatan edukasi untuk siswa dan masyarakat tentang pengelolaan limbah belum memadai dilakukan padahal kegiatan ini penting untuk menumbuhkan kesadaran dan perubahan perilaku siswa dan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Sebenarnya sudah ada kegiatan Sekolah Hijau, bahkan SD di Batu Busuk memperoleh penghargaan Adiwiyata terkait pengelolaan lingkungan sekolah, namun belum diperluas menjadi RT Hijau dan Kampung Hijau. Selain itu kegiatan sosialisasi dan pengadaan sarana persampahan ke sekolah belum dilanjutkan dengan pendampingan berkelanjutan.

Ketiga, mayoritas responden menilai bahwa pengelolaan program CSR BMN belum optimal dalam merubah perilaku hidup sehat dan bersih dari masyarakat. Fakta dilapangan memperlihatkan bahwa masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam memelihara kebersihan dan perilaku hidup sehat. Kolaborasi antar pihak untuk menyelesaikan masalah ini juga belum ada, walau program CS BMN sudah berinisiatif melakukannya dengan keterbatasan sumberdaya yang dimiliki.

Keempat, mayoritas responden menilai bahwa upaya perlindungan terhadap kuantitas dan kualitas air (mata air, irigasi, kolam, biopori) melalui kegiatan CSR BMN masih terbatas. Kelurahan Lambung Bukit dengan letaknya di bagian hulu, berpotensi untuk memanfaatkan sumberdaya air yang ada untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Dalam skala besar, PT Semen Padang yang sejak zaman Belanda memanfaatkan sumber air untuk PLTA di Kampung Batu Busuk dan saat ini juga ada pabrik air mineral yang beroperasi di Kampung Pinang. Sementara warga masyarakat juga memanfaatkan aliran sungai yang melewati kampung untuk usaha

kolam ikan air deras, juga ada bendungan irigasi, serta kebutuhan air untuk mengairi areal pertanian warga masyarakat yang cukup luas. Mengingat strategisnya ketersediaan sumberdaya air yang berperan untuk banyak aksi, aktifitas masyarakat, fasilitas pemerintah, dan bisnis korporasi, maka upaya perlindungan terhadap kualitas dan kuantitas air perlu menjadi perhatian yang serius dari multi pihak, termasuk warga masyarakat.

Kelima, lebih dari sebagian responden menilai bahwa masyarakat belum berpartisipasi aktif dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Kondisi bentang alam Kelurahan Lambung Bukit yang terletak di daerah hulu dan berbatasan dengan hutan sebenarnya menyimpan potensi dan ancaman. Potensi untuk mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam serta ancaman terjadinya bencana ekologis apabila sumberdaya alam tidak dikelola dengan baik. Fakta memperlihatkan bahwa program CSR BMN, belum fokus untuk menjadikan pengelolaan kelestarian alam dan lingkungan berbasis komunitas sebagai unggulan dalam program. Walaupun sudah ada, namun partisipasi masyarakat untuk meningkatkan nilai manfaat dari kegiatan CSR BMN tersebut belum optimal dilakukan.

Keenam, mayoritas responden menilai bahwa pengelolaan limbah dan sampah secara berkelanjutan (bank sampah, rumah kompos) belum dilakukan secara memadai dalam program CSR BMN. Fakta memperlihatkan bahwa adanya keterbatasan kemampuan program CSR BMN dalam memenuhi aspirasi masyarakat, khususnya dalam kegiatan yang terkait dengan lingkungan. Namun sebenarnya sudah ada inisiatif masyarakat dan program multi pihak yang dilakukan, seperti adanya Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) di Kampung Sungkai.

Berdasarkan uraian panjang lebar terkait deskripsi keberlanjutan pengelolaan program CSR PT Semen Padang yang dikenal dengan istilah Basinerji Mambangun Nagari (BMN) di Kelurahan Lambung Bukit yang ditinjau dari empat aspek, yakni : kelembagaan, finansial, sosial budaya, serta lingkungan, maka skor rata-rata dari persepsi responden untuk setiap aspek yang menjadi harapan dan realitas, dapat diringkas pada Tabel berikut.

Tabel 14. Kesimpulan Persepsi Responden terkait Keberlanjutan Program CSR BMN

No.	Persepsi Responden Pemangku Kepentingan	Rata-rata Jawaban Responden	
		Harapan	Kenyataan
1	Persepsi tentang Aspek Kelembagaan dalam Konteks Program CSR	17,90	6,60
2	Persepsi tentang Aspek Finansial/Keuangan dalam Konteks Program CSR	47,18	14,90
3	Persepsi tentang Aspek Sosial Budaya dalam Konteks Program CSR	23,50	7,40
4	Persepsi tentang Aspek Lingkungan dalam Konteks Program CSR	27,80	6,20
Jumlah		116,38	35,10
Rata-rata		29,10	8,78
Kriteria		Sangat Tinggi	Baik

BAB 7

PENUTUP

7.1. Kesimpulan

Berdasarkan kajian “Keberlanjutan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) untuk Pemberdayaan Komunitas (Studi Kasus pada Program CSR PT Semen Padang di Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, Kota Padang)”, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Pengelolaan program CSR PT Semen Padang di Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, Kota Padang dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sudah mengedepankan beberapa prinsip-prinsip pemberdayaan komunitas, yakni : *Pertama*, berbasis komunitas; prinsip berbasis komunitas dalam program CSR BMN telah dilakukan dengan menumbuhkan kelembagaan lokal untuk mengelola program (Forum PMKLB dan LKN) serta memperkuat kelembagaan lokal yang ada (LSEM). *Kedua*, transparansi dan akuntabilitas; dimana kegiatan-kegiatan dalam program CSR BMN dilakukan secara transparan dan dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan. Namun masih ada beberapa prinsip-prinsip pemberdayaan komunitas yang belum optimal dilakukan, yakni : *Pertama*, partisipasi; prinsip partisipasi yang dilakukan masih terbatas pada partisipasi prosedural terkait proses perencanaan program CSR BMN mulai dari kegiatan pembentukan Tim Pemetaan Swadaya sampai kegiatan penyusunan RKPM. Sementara secara substansial partisipasi belum optimal dilakukan. *Kedua*, integrasi; prinsip integrasi yang dilakukan baru terbatas dalam prosedural atau tahapan program CSR BMN (tahap persiapan sampai evaluasi), namun belum ada integrasi dalam substansi kegiatan/program. *Ketiga*, kolaborasi; prinsip kolaborasi multi pihak antar pelaku CSR BMN di Kelurahan Lambung Bukit masih terbatas pada internal CSR dan belum melibatkan pelaku pemberdayaan yang lain (perguruan tinggi, pemerintah, LSM/organisasi sosial kemasyarakatan, dan lembaga penelitian).

- 2) Adanya harapan yang sangat tinggi dari para pemangku kepentingan terkait keberlanjutan program CSR PT Semen Padang di Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, Kota Padang dan harapan tersebut secara umum, cenderung sudah sesuai dengan kenyataan. Namun apabila ditelusuri dari keempat aspek keberlanjutan, aspek lingkungan masih belum memenuhi harapan, sementara aspek kelembagaan, finansial, dan sosial budaya sudah memenuhi harapan para pemangku kepentingan.

7.2. Saran

Berdasarkan kajian “Keberlanjutan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) untuk Pemberdayaan Komunitas (Studi Kasus pada Program CSR PT Semen Padang di Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, Kota Padang)”, dapat disarankan sebagai berikut :

- 1) Perlu dioptimalkan penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan komunitas, yakni: *Pertama*, prinsip partisipasi yang lebih mengedepankan substansial (adanya ruang negosiasi komunitas dalam pengambilan keputusan sehingga tumbuh inisiatif lokal dan meningkatnya nilai swadaya lokal sehingga program memberikan manfaat dan dampak positif. *Kedua*, prinsip integrasi yang lebih mengedepankan integrasi antar kegiatan sehingga lebih fokus (spesifik) dengan tema yang strategis untuk memberikan manfaat dan dampak positif. *Ketiga*, prinsip kolaborasi yang lebih mengedepankan keterlibatan multi pihak yang peduli dengan pemberdayaan komunitas (pemerintah/instansi terkait, perguruan tinggi, LSM/organisasi sosial kemasyarakatan, dan lembaga penelitian).
- 2) Perlu mengoptimalkan kegiatan yang terkait dengan aspek lingkungan mengingat bentang alam yang rawan dan terjadinya berbagai bencana ekologis, serta adanya asset komunitas yang bisa dioptimalkan untuk meningkatkan partisipasi komunitas, nilai manfaat dan dampak dalam kerangka memelihara kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Ghani Mohammad. 2016. Model CSR Berbasis Komunitas. Integrasi Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Korporasi. IPB Press. Bogor. 246 Hal.
- Afrizal. 2014. Metode Penelitian Kualitatif. Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu. PT Raja Grafindo Perkasa. Jakarta.
- Anandini, Fera. 2011. Identifikasi Prospek Keberlanjutan Kegiatan Penyediaan Air Bersih Berbasis Masyarakat Setelah Program *Water and Sanitation for Low Income Community 2* Berakhir (Studi Kasus: Kabupaten Bogor). Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol. 22 No. 3, Desember 2011, hlm. 161 – 178.
- Asful, Ferdhinal; Satria, Beni; Junaidi, Indra; Armansyah; Putri, Afrianingsih. 2015. Identifikasi Komunitas dan Pemetaan Sosial dalam Rangka Perencanaan Program Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR) PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region I DPPU Terminal BBM Teluk Kabung. Laporan Penelitian. 174 Hal.
- Karlos. 2009. Dampak Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Perkebunan Nusantara III Kebun Rantauprapat terhadap Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu. Artikel Ilmiah dalam WAHANA HIJAU Jurnal Perencanaan & Pengembangan Wilayah, Vol.4, No.3, April 2009. 10 Hal.
- Karomah, Umi Yaumidin. 2013. Kewirausahaan Sosial dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Tantangan Sinergi Multi-Sektor dan Multi-Dimensi. Artikel Ilmiah dalam Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol 21, No.1 Juli 2013. 21 Hal.
- Mardikanto, Totok. 2013. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Penerbit Alfabeta. Bandung. 341 Hal.
- Mardikanto, Totok. 2014. Pemberdayaan Masyarakat oleh Perusahaan. Corporate Social Responsibility. UNS Press. Solo. 520 Hal
- Nanga, Muana. 2000. Mencermati Pergeseran dalam Paradigma Pembangunan. Artikel Ilmiah dalam Jurnal Meditek, Vol 8 No.2. Januari-April 2000. 13 Hal.
- Neuman, W. Lawrence. 2013. Metodologi Penelitian Sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Edisi 7. Penerbit PT. Indeks. Jakarta.
- Roza, Suswita. 2014. Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Program CSR. Artikel Ilmiah dalam *Mankeu*, Vol.3 No.1, 2014: 374-463.
- Ria, Asa Pranoto dan Dede Yusuf. 2014. Program CSR Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kemandirian Ekonomi Pasca Tambang di Desa Sarijaya. Artikel Ilmiah di Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 18, Nomor 1, Juli 2014. 14 Hal.
- Rukminto, Adi Isbandi. 2008. Intervensi Komunitas. Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. Rajawali Pers. Jakarta. 410 Hal.

- Syahyuti. 2007. Penerapan Pendekatan Pemberdayaan dalam Kegiatan Pembangunan Pertanian: Perbandingan Kegiatan P4K, PIDRA, P4MI, dan Primatani. Artikel Ilmiah di Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi. Volume 25 No. 2, Desember 2007. 13 Hal.
- PT. Semen Padang. 2015. Standard Operating Procedure CSR PT Semen Padang. Basinergi Mambangun Nagari.
- Zubaedi. 2007. Wacana Pembangunan Alternatif. Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat. Ar-Ruzz Media Group. Jogjakarta. 310 Hal